



**KONTEN ARTIKEL DALAM SURAT KABAR SUARA
MERDEKA DI SEMARANG TAHUN 1984-1998**

SKRIPSI

Oleh

AHMAD ZAIN BAIHAQI

NIM.220110301061

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS JEMBER

2026



**KONTEN ARTIKEL DALAM SURAT KABAR SUARA
MERDEKA DI SEMARANG TAHUN 1984-1998**

SKRIPSI

Oleh

AHMAD ZAIN BAIHAQI

NIM.220110301061

Skripsi diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan studi pada program Ilmu Sejarah (S1) dan mencapai gelar
Sarjana Humaniora

PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS JEMBER

2026

MOTTO

لَا رَاحَةَ إِلَّا بَعْدَ التَّعَبِ

Tidak ada kenikmatan istirahat, kecuali setelah kesulitan

PERSEMBAHAN

Dengan rasa hormat, karya ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak Fatikhun dan Ibu Ainun Nafiah, sebagai kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberikan kasih sayang, doa, dukungan, pengorbanan, serta kerja keras yang tiada henti demi keberhasilan penulis. Terima kasih atas segala perjuangan, nasihat, dan motivasi yang selalu menguatkan penulis dalam menempuh pendidikan hingga menyelesaikan skripsi ini.
2. Ahmad Zulvan Baihaqi, selaku kakak penulis yang selalu memberikan dukungan, perhatian, motivasi, serta semangat kepada penulis dalam menghadapi berbagai tantangan selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi.
3. Abel, selaku adik penulis yang senantiasa memberikan kebahagiaan, semangat, dan dukungan kepada penulis sehingga menjadi salah satu penyemangat dalam menyelesaikan pendidikan ini. .
4. Almamater Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember, yang telah menjadi tempat penulis menimba ilmu, pengalaman, dan mengembangkan kemampuan akademik selama masa perkuliahan.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Zain Baihaqi

NIM : 220110301061

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Konten Artikel dalam Surat Kabar Suara Merdeka di Semarang Tahun 1984-1998” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 30 Juni 2026

Yang menyatakan,



Ahmad Zain Baihaqi

NIM. 220110301061

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul “Konten Artikel dalam Surat Kabar *Suara Merdeka* di Semarang Tahun 1984-1998” ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing, untuk diujikan :

Dosen Pembimbing,

Krisnanda Theo Primaditya S.Pd. M.A.
NIP. 199705102024061001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS ILMU BUDAYA

Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember 68121
Telepon (0331) 337188 - Fax. 332738 - email : fib@unej.ac.id
Laman : <http://fib.unej.ac.id>

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul :

Konten Artikel dalam Surat Kabar Suara Merdeka di Semarang Tahun 1984-1998

ditulis oleh:

Nama : AHMAD ZAIN BAIHAQI

NIM : 220110301061

Jurusan/Prodi : Sejarah

Diujikan pada : Kamis, 04 Juni 2026

telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Sejarah Fakultas ilmu Budaya Universitas Jember, pada Jum'at, 26 Juni 2026

Tim Penguji

1. Krisnanda Theo Primaditya S.Pd. M.A. (199705102024061001) Sebagai Dosen Pembimbing Utama
3. Dr. Eko Crys Endrayadi, M.Hum. (197108251999031001) Sebagai Dosen Penguji Utama
4. Dewik Untarawati M.Hum. (199404132024062002) Sebagai Dosen Penguji Anggota

Mengetahui Dekan,



Prof. Nawiyanto, M.A., Ph.D.

NIP. 196612211992011001

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “*Konten Artikel dalam Surat Kabar Suara Merdeka di Semarang Tahun 1984–1998*” dengan baik. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember.

Penyusunan Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan kontribusi berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Nawiyanto, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember.
2. Dr. Eko Crys Endrayadi, M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Jember, sekaligus dosen penguji I
3. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan pembelajaran berharga kepada penulis selama menempuh pendidikan.
4. Krisnanda Theo Primaditya, S.Pd., M.A., selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta meluangkan waktu dan pikiran dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Dewik Untarawati, M.Hum., selaku dosen penguji II yang telah memberikan kritik, saran, dan evaluasi yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini.
6. Kedua orang tua serta keluarga penulis yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, perhatian, dan pengorbanan tanpa henti kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh anggota Mahasiswa Pecinta Kelestarian Alam (SWAPENKA) dan teman Program Studi Ilmu Sejarah Universitas Jember yang telah memberikan banyak pengalaman, dukungan, kebersamaan, serta cerita selama masa perkuliahan.

8. Sahabat dan teman-teman terdekat yang selalu memberikan motivasi, dan selalu kebersamai penulis dalam dunia Pendakian.
9. Seseorang yang tidak dapat disebutkan namanya, yang telah kebersamai, mendukung, mendengarkan, dan memberikan perhatian kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini hingga dapat terselesaikan.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan bagi pembaca dan menjadi kontribusi dalam kajian sejarah pers dan media di Indonesia.

Jember, 17 Mei 2026

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO	i
PERSEMBAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR ISTILAH	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
RINGKASAN	xvii
<i>SUMMARY</i>	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan dan Manfaat	13
1.3.1 Tujuan	13
1.3.2 Manfaat	14
1.4 Ruang Lingkup Penelitian	14
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	18
BAB 3 PENDEKATAN DAN KERANGKA TEORETIS, METODE	
PENELITIAN DAN SISTEMATIKA PENULISAN	26
3.1 Pendekatan dan Kerangka Teoretis	26
3.2 Metode Penelitian	29
3.3 Sistematika Penulisan	30

BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	32
4.1 Latar Belakang Munculnya Konten Artikel dalam Surat Kabar <i>Suara Merdeka</i>	32
4.1.1 Kondisi Politik di Semarang dan Kaitannya dengan Pers	33
4.1.2 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya di Semarang	37
4.1.3 Kondisi Konten Artikel dan Proses Penerbitan Surat Kabar <i>Suara Merdeka</i> Sebelum Pemberlakuan SIUPP	40
4.2 Konten Artikel dalam Surat Kabar <i>Suara Merdeka</i>	51
4.2.1 Konten Artikel Ekonomi	51
4.2.2 Konten Artikel Sosial Budaya	62
4.2.3 Konten Artikel Politik Pembangunan	81
4.3 Dampak Konten Artikel Surat Kabar <i>Suara Merdeka</i> Terhadap Masyarakat di Semarang	99
4.3.1 Dampak Ekonomi Konten Artikel Surat Kabar <i>Suara Merdeka</i> Terhadap Masyarakat di Semarang	99
4.3.2 Dampak Sosial Konten Artikel Surat Kabar <i>Suara Merdeka</i> Terhadap Masyarakat di Semarang	103
4.3.3 Dampak Politik Pembangunan Konten Artikel Surat Kabar <i>Suara Merdeka</i> Terhadap Masyarakat di Semarang	108
BAB 5 KESIMPULAN	112
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	123

DAFTAR SINGKATAN

Golkar : Golongan Karya

LP3ES : Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial

SIUPP : Surat Izin Usaha Penerbitan Pers

VOC : Vereenigde Oost-Indische Compagnie

DAFTAR ISTILAH

Agenda-setting	: Kemampuan media massa dalam menentukan isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat melalui intensitas dan penonjolan pemberitaan.
Hegemoni	: Bentuk dominasi ideologi atau pengaruh kekuasaan terhadap masyarakat melalui persetujuan sosial.
Kontrol ideologis	: Pengendalian media melalui penyebaran nilai dan ideologi tertentu yang mendukung kekuasaan.
Legitimasi kekuasaan	: Upaya penguasa memperoleh dukungan dan pengakuan masyarakat terhadap kekuasaannya.
Media massa	: Sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat luas secara serentak.
Opini publik	: Pendapat atau pandangan masyarakat terhadap suatu isu yang berkembang di ruang publik.
Pers daerah	: Media pers yang berkembang di daerah tertentu dan berfokus pada isu lokal masyarakat setempat.
Propaganda	: Penyebaran informasi atau gagasan tertentu untuk memengaruhi pandangan masyarakat.
Reformasi	: Masa perubahan politik Indonesia setelah runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 yang ditandai dengan keterbukaan demokrasi dan kebebasan pers.
Relasi kuasa	: Hubungan kekuasaan antara pihak yang memengaruhi dan pihak yang dipengaruhi dalam kehidupan sosial dan politik.
Resistensi	: Bentuk penolakan atau perlawanan terhadap dominasi kekuasaan atau ideologi tertentu.

Stabilitas politik	: Kondisi politik yang terkendali dan minim konflik dalam suatu negara.
Struktur sosial	: Susunan hubungan sosial dalam masyarakat yang membentuk pola kehidupan sosial.
Swasensor	: Tindakan media menyaring atau membatasi isi pemberitaan sendiri untuk menghindari tekanan pemerintah.
Teori normative	: Teori yang membahas hubungan media dengan nilai, norma, dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat.
Wacana	: Cara penyampaian gagasan atau pemikiran mengenai suatu isu dalam ruang publik.

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul Gambar	Halaman
Gambar 4.1	“IGGI Setuju Sediakan 2,1 Milyar Dollar Lagi Untuk Bantu Indonesia” Tahun 1977	46
Gambar 4.2	“Hari Kemenangan Buruh” Tahun 1965	48
Gambar 4.3	“Terjadi 172 Kasus Pelanggaran Pemilu di Jateng dan DIY” Tahun 1977	50
Gambar 4.4	“Harga Kebutuhan Pokok Melonjak” Tahun 1997	54
Gambar 4.5	“Harga Kebutuhan Pokok Mulai Naik” Tahun 1997	58
Gambar 4.6	“Harga Bahan Pokok Merambat Naik” Tahun 1997	60
Gambar 4.7	“Wajib Belajar 9 Tahun, Berhadapan dengan Kawin Muda” Tahun 1992	63
Gambar 4.8	“Para Guru Diminta Siapkan Diri untuk Laksanakan Wajib Belajar”	66
Gambar 4.9	“Gambang Semarang”	70
Gambar 4.10	“ ‘Gambang Semarang’ Layak Dijadikan Identitas Kota ATLAS”	73
Gambar 4.11	“Klenteng Sam Po Kong Potensial Serap Wisatawan”	76
Gambar 4.12	“Pengunjung Pawai Sam Poo Membeludak”	79
Gambar 4.13	“Penyediaan Jalan By Pass dan Tol Dirasakan Mendesak”	84
Gambar 4.14	“Jalan Tol Semarang–Bawen Bukan Prioritas untuk Segera Dibangun”	87
Gambar 4.15	“Jalan Lingkar Semarang Selesai”	90
Gambar 4.16	“Terminal Bis Terboyo Akhir Mei Dioperasikan”	93
Gambar 4.17	“Hari Pertama di Terminal Terboyo: Semua Berjalan Tertib Meski Ada Kekurangan”	96

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
Lampiran A	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.	117
Lampiran B	Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01/Per/Menpen/1984	118
Lampiran C	Surat Permohonan Ijin Penelitian Unit Redaksi Suara Merdeka	119

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji konten artikel dalam surat kabar *Suara Merdeka* di Semarang tahun 1984–1998 dengan latar belakang kondisi pers pada masa Orde Baru yang berada di bawah kontrol pemerintah melalui kebijakan stabilitas nasional dan pengawasan media. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang munculnya konten artikel dalam *Suara Merdeka*, bentuk konten artikel yang dimuat, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber penelitian diperoleh melalui arsip surat kabar *Suara Merdeka*, buku, jurnal, dan sumber pendukung lainnya yang berkaitan dengan sejarah pers, komunikasi massa, dan perkembangan sosial masyarakat Semarang pada masa Orde Baru. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah pers dan komunikasi massa dengan menggunakan teori fungsi pers dan teori hegemoni media. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten artikel dalam surat kabar *Suara Merdeka* dipengaruhi oleh kondisi politik Orde Baru yang menempatkan pers sebagai pendukung pembangunan nasional, namun tetap memberikan ruang bagi pemberitaan mengenai kondisi sosial masyarakat Semarang. Konten artikel ekonomi banyak membahas kenaikan harga kebutuhan pokok, kondisi pasar tradisional, dan dampak krisis ekonomi tahun 1997–1998. Konten artikel sosial budaya menyoroti persoalan pendidikan, budaya lokal, dan identitas budaya masyarakat Semarang, sedangkan konten artikel politik pembangunan membahas pembangunan infrastruktur kota, transportasi, dan fasilitas umum. Keberadaan konten artikel tersebut memberikan dampak sosial berupa terbentuknya opini publik, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap persoalan sosial dan pembangunan, serta dampak ekonomi berupa penyebaran informasi mengenai kondisi pasar dan perkembangan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, *Suara Merdeka* tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai dokumentasi sosial dan representasi hubungan antara media, masyarakat, dan kekuasaan pada masa Orde Baru.

Kata Kunci: Konten Artikel, Orde Baru, Pers Lokal, Semarang, *Suara Merdeka*.

ABSTRACT

This study examines the content of articles in the Suara Merdeka newspaper in Semarang during 1984–1998 against the backdrop of press conditions under the New Order, which were tightly controlled by government stability policies and media supervision. This research aims to determine the background to the emergence of article content in Suara Merdeka, the form of article content published, and its impact on the social and economic life of the people of Semarang. This research employs historical methods, including heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Research sources were obtained through the Suara Merdeka newspaper archives, books, journals, and other supporting sources related to the history of the press, mass communication, and the social development of Semarang society during the New Order era. The approach used in this research is a historical approach to the press and mass communication using press function theory and media hegemony theory. The research results show that the content of articles in the Suara Merdeka newspaper was influenced by the political conditions of the New Order, which positioned the press as a supporter of national development while still providing space for reporting on the social conditions of the people of Semarang. Economic articles discuss rising prices of basic necessities, traditional market conditions, and the impact of the 1997–1998 economic crisis. The socio-cultural article highlights issues in education, local culture, and the cultural identity of the people of Semarang, while the political development article discusses the development of city infrastructure, transportation, and public facilities. The article's content has a social impact by shaping public opinion and increasing public awareness of social and development issues, and an economic impact by disseminating information about market conditions and community economic development. Thus, Suara Merdeka not only functions as an information medium, but also as social documentation and representation of the relationship between media, society, and power during the New Order era.

Keywords: Article Content, New Order, Local Press, Semarang, Suara Merdeka.

RINGKASAN

Konten Artikel dalam Surat Kabar *Suara Merdeka* di Semarang Tahun 1984–1998.

Ahmad Zain Baihaqi; 220110301061; 2026; Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember.

Skripsi ini membahas mengenai konten artikel dalam surat kabar *Suara Merdeka* di Semarang tahun 1984–1998. Pers merupakan salah satu media komunikasi massa yang memiliki fungsi penting dalam menyampaikan informasi, membentuk opini publik, dan menjadi sarana kontrol sosial dalam masyarakat. Masa Orde Baru, perkembangan pers di Indonesia berada dalam situasi yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang menekankan stabilitas nasional dan pembangunan. Pemerintah menerapkan berbagai bentuk pengawasan terhadap media massa melalui regulasi dan kebijakan pers, sehingga media dituntut untuk mendukung pembangunan nasional serta menjaga stabilitas politik. Kondisi tersebut memengaruhi pola pemberitaan berbagai surat kabar, termasuk *Suara Merdeka* sebagai salah satu surat kabar lokal terbesar di Jawa Tengah.

Suara Merdeka memiliki posisi penting dalam perkembangan pers daerah di Semarang karena mampu menyampaikan berbagai informasi yang berkaitan dengan kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan pembangunan masyarakat lokal. Konten artikel yang dimuat dalam surat kabar ini tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga menjadi dokumentasi sosial yang merekam berbagai perubahan masyarakat Semarang pada masa Orde Baru hingga menjelang Reformasi tahun 1998. Artikel-artikel yang dimuat memperlihatkan bagaimana media lokal berusaha menjalankan fungsi jurnalistiknya di tengah sistem politik yang membatasi kebebasan pers. Selain itu, keberadaan *Suara Merdeka* menunjukkan bahwa pers daerah tetap memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat lokal melalui pemberitaan mengenai persoalan ekonomi, pendidikan, budaya, dan pembangunan kota.

Tujuan dari kajian ini yaitu: (1) menjelaskan latar belakang munculnya konten artikel dalam surat kabar *Suara Merdeka* di Semarang tahun 1984–1998; (2)

mendesripsikan bentuk konten artikel yang dimuat dalam surat kabar *Suara Merdeka* meliputi bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik pembangunan; serta (3) menganalisis dampak konten artikel surat kabar *Suara Merdeka* terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Semarang pada tahun 1984–1998.

Skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) heuristik atau pengumpulan sumber sejarah, (2) kritik ekstern dan intern untuk menguji validitas sumber, (3) interpretasi terhadap fakta sejarah yang diperoleh, dan (4) historiografi atau penulisan sejarah secara sistematis. Sumber penelitian diperoleh dari arsip surat kabar *Suara Merdeka*, buku, jurnal, artikel ilmiah, dan berbagai sumber pendukung lainnya yang berkaitan dengan sejarah pers, komunikasi massa, dan perkembangan sosial masyarakat Semarang. Peneliti menggunakan pendekatan sejarah pers dan komunikasi massa dengan memanfaatkan teori fungsi pers dan teori hegemoni media untuk memahami hubungan antara media, masyarakat, dan kekuasaan pada masa Orde Baru.

Kondisi Kota Semarang pada periode 1984–1998 mengalami perkembangan yang cukup pesat dalam bidang ekonomi, sosial, dan pembangunan perkotaan. Semarang berkembang sebagai pusat perdagangan, industri, dan transportasi di Jawa Tengah sehingga mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Perkembangan kota juga diikuti dengan berbagai persoalan sosial seperti urbanisasi, kepadatan penduduk, kebutuhan pendidikan, dan pembangunan fasilitas umum. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi munculnya berbagai konten artikel dalam *Suara Merdeka*. Selain itu, situasi politik Orde Baru yang menempatkan pers sebagai pendukung pembangunan turut membentuk karakter pemberitaan surat kabar tersebut.

Konten artikel ekonomi dalam *Suara Merdeka* banyak membahas persoalan kenaikan harga kebutuhan pokok, kondisi pasar tradisional, distribusi barang, dan dampak krisis ekonomi menjelang tahun 1998. Artikel-artikel ekonomi memperlihatkan kondisi masyarakat secara langsung melalui laporan lapangan dan wawancara dengan pedagang maupun pembeli di pasar tradisional Semarang. Sementara itu, konten artikel sosial budaya menyoroti persoalan pendidikan, budaya lokal, tradisi masyarakat, serta identitas budaya Semarang seperti Gambang

Semarang dan Klenteng Sam Poo Kong. Adapun konten artikel politik pembangunan lebih banyak membahas pembangunan infrastruktur kota, jalan tol, terminal, dan fasilitas transportasi sebagai bagian dari kebijakan pembangunan Orde Baru.

Keberadaan konten artikel dalam surat kabar *Suara Merdeka* memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat Semarang. Dari aspek sosial, pemberitaan dalam surat kabar mampu membentuk opini publik, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap persoalan sosial dan pembangunan, serta memperkuat identitas budaya lokal masyarakat Semarang. Dari aspek ekonomi, pemberitaan mengenai harga kebutuhan pokok, pasar tradisional, dan pembangunan infrastruktur turut memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat dan memberikan informasi mengenai kondisi ekonomi daerah. *Suara Merdeka* tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai dokumentasi sosial dan representasi hubungan antara media, masyarakat, dan kekuasaan pada masa Orde Baru hingga menjelang Reformasi tahun 1998.

SUMMARY

Article Content in the *Suara Merdeka* Newspaper in Semarang During 1984–1998.

Ahmad Zain Baihaqi; 220110301061; 2026; History Study Program, Faculty of Humanities, University of Jember.

This study discusses the content of articles in the *Suara Merdeka* newspaper in Semarang, 1984–1998. The press is a mass communication medium that plays a crucial role in conveying information, shaping public opinion, and serving as a means of social control. During the New Order era, the development of the press in Indonesia was shaped by government policies that emphasized national stability and development. The government implemented various forms of media oversight through press regulations and policies that required the media to support national development and maintain political stability. This situation influenced the reporting patterns of various newspapers, including *Suara Merdeka*, one of the largest local newspapers in Central Java.

Suara Merdeka played a crucial role in the development of the regional press in Semarang by conveying a variety of information on the social, economic, cultural, and developmental conditions of the local community. The articles published in this newspaper not only serve as a medium of information but also serve as social documentation, documenting the various changes in Semarang society from the New Order era to the Reformation era in 1998. The articles demonstrate how local media strive to fulfilled their journalistic function amid a political system that restricted press freedom. Furthermore, the existence of *Suara Merdeka* demonstrated that the regional press remained closely connected to the lives of local communities through reporting on economic, educational, cultural, and urban development issues.

The objectives of this study are: (1) to explain the background to the emergence of articles in the *Suara Merdeka* newspaper in Semarang from 1984 to 1998; (2) to describe the format of articles published in the *Suara Merdeka* newspaper, covering the economic, socio-cultural, and political development

sectors; and (3) to analyze the impact of Suara Merdeka articles on the social and economic life of the Semarang community from 1984 to 1998.

This study uses a historical research method that includes several stages: (1) heuristics or the collection of historical sources, (2) external and internal criticism to test the validity of the sources, (3) interpretation of the historical facts obtained, and (4) historiography or systematic historical writing. Research sources were obtained from the Suara Merdeka newspaper archives, books, journals, scientific articles, and various other supporting sources related to the history of the press, mass communication, and the social development of Semarang society. The researcher uses a press and mass communication history approach, drawing on the theory of press functions and the theory of media hegemony to understand the relationship among media, society, and power during the New Order era.

During the period 1984–1998, Semarang City experienced quite rapid economic, social, and urban development. Semarang developed as a center of trade, industry, and transportation in Central Java, thus driving increased economic activity in the community. The city's development was also accompanied by various social issues such as urbanization, population density, educational needs, and the construction of public facilities. These conditions are among the factors influencing the emergence of various article content in Suara Merdeka. Furthermore, the New Order's political climate, which positioned the press as a supporter of development, also shaped the character of the newspaper's reporting.

Suara Merdeka's economic articles focused heavily on rising prices of basic necessities, the condition of traditional markets, the distribution of goods, and the impact of the economic crisis leading up to 1998. These articles presented firsthand accounts of the community's conditions through field reports and interviews with traders and buyers in Semarang's traditional markets. Meanwhile, socio-cultural articles highlighted issues in education, local culture, community traditions, and Semarang's cultural identity, including Gambang Semarang and the Sam Poo Kong Temple. Political and development articles focused more on the development of city infrastructure, toll roads, terminals, and transportation facilities as part of the New Order's development policies.

Suara Merdeka's articles had a social and economic impact on the people of Semarang. From a social perspective, newspaper coverage helped shape public opinion, raise awareness of social and development issues, and strengthen the Semarang community's local cultural identity. From an economic perspective, coverage of basic necessities, traditional markets, and infrastructure development contributed to the city's development, influencing community economic activities and providing information on regional economic conditions. Suara Merdeka served not only as an information medium but also as social documentation and a representation of the relationship between media, society, and power during the New Order era until the Reformation in 1998.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pers merupakan salah satu pilar penting dalam sistem komunikasi massa yang memiliki fungsi strategis dalam kehidupan masyarakat. Menurut Effendy, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada publik.¹ Sementara itu, McQuail menjelaskan bahwa pers memiliki peranan vital dalam menyediakan informasi, membentuk opini publik, serta menjadi forum bagi diskusi dan kontrol sosial.²

Pers tidak hanya sebatas pada penyampaian informasi, tetapi juga berperan dalam pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan mediasi antara masyarakat dan pemerintah. Hill menekankan bahwa dalam konteks negara berkembang, pers sering kali berada dalam ketegangan antara kepentingan politik dan profesionalisme jurnalistik.³ Tujuan dari keberadaan pers adalah untuk menciptakan masyarakat yang sadar informasi, partisipatif, dan kritis terhadap

¹ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 52.

² Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa McQuail*, Edisi keenam (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 34.

³ David T. Hill, *The Press in New Order Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 88.

dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi.

Sejarah jurnalistik pada hakikatnya dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut dikenal secara modern. Salah satu bentuk awal praktik jurnalistik dapat ditemukan dalam proses penulisan kitab-kitab suci, termasuk Alkitab. Para penulis Injil terdahulu tidak hanya mencatat peristiwa keagamaan, melainkan juga menyusun narasi historis, moral, dan sosial untuk menyampaikan pesan kepada umat secara luas.⁴

Perkembangan signifikan dalam pers dimulai pada abad ke-15 seiring ditemukannya mesin cetak oleh Johannes Gutenberg di Jerman sekitar tahun 1440. Penemuan ini memicu lahirnya surat kabar cetak pertama, *Relation aller Fürnemmen und gedenckwürdigen Historien*, yang diterbitkan pada tahun 1605 di Strasbourg. Sejak saat itu, penyebaran informasi melalui media cetak menjadi lebih terstruktur dan meluas ke berbagai belahan dunia.⁵

Di wilayah Hindia Belanda, cikal bakal pers sudah mulai muncul sejak awal tahun 1700-an. Sebelum terbitnya *Bataviasche Nouvelles* pada tahun 1744, sudah terdapat bentuk komunikasi cetak dalam wujud dokumen administratif dan bulletin internal yang dikelola oleh pihak VOC, seperti *Dagregisters van het Kasteel Batavia*, yang mencatat peristiwa-peristiwa harian penting di pusat kekuasaan kolonial.⁶ Selain itu, catatan seperti *Memorie van Overgave* dan pamflet kebijakan juga disebarluaskan kepada pejabat-pejabat kolonial sebagai bentuk awal praktik penerbitan berita internal. Adapun surat kabar dalam arti lebih formal mulai berkembang pada pertengahan abad ke-19, khususnya dengan munculnya surat kabar berbahasa Melayu seperti *Bintang Timor* pada tahun 1866 dan *Bintang Barat* pada tahun 1876, meskipun sebagian besar masih dikendalikan

⁴ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 1985), hlm. 23-24.

⁵ Elizabeth Eisenstein, *The Printing Revolution in Early Modern Europe* (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), hlm. 45.

⁶ Kacung Marijan Nasution, *Sejarah Pers Indonesia: Perspektif Politik dan Jurnalistik* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 112.

oleh kalangan Indo-Eropa.⁷ Surat kabar *Selompret Melajoe* pada tahun 1860 yang terbit di Surakarta menjadi salah satu pelopor media berbahasa lokal yang cukup populer di kalangan masyarakat bumiputra. Surat kabar tersebut mulai menyuarakan isu-isu sosial dan kebijakan kolonial secara lebih terbuka, walaupun tetap diawasi secara ketat oleh pemerintah Hindia Belanda.

Di wilayah Semarang, sebelum *Suara Merdeka* pada tahun 1950, telah terdapat sejumlah surat kabar lokal yang memainkan peran penting dalam penyebaran informasi dan pembentukan opini masyarakat. Surat kabar *Sinar Djawa* dan *Semarangsche Handelsblad* adalah dua contoh media cetak yang aktif pada awal abad ke-20.⁸ *Sinar Djawa*, yang diterbitkan dalam bahasa Melayu, kerap memuat berita-berita lokal dan permasalahan sosial yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Sementara itu, *Semarangsche Handelsblad*, yang diterbitkan dalam bahasa Belanda, lebih banyak menyoroti aspek perdagangan dan kebijakan ekonomi kolonial.

Beberapa surat kabar penting yang terbit di Semarang sebelum kehadiran *Suara Merdeka* antara lain *Sinar Djawa*, *Semarangsche Handelsblad*, *Djawi Hisworo*, dan *Sinar Hindia*. *Sinar Djawa* merupakan surat kabar berbahasa Melayu yang ditujukan kepada pembaca dari kalangan bumiputra. Media ini banyak memuat berita-berita sosial, kritik terhadap kebijakan pemerintah kolonial, serta tulisan-tulisan yang menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan pergerakan. Sementara itu, *Semarangsche Handelsblad* adalah surat kabar berbahasa Belanda yang lebih menyoroti aspek perdagangan, perekonomian, dan kebijakan kolonial. Meskipun bersifat elitis dan terbatas pada kalangan Eropa, surat kabar ini mencerminkan dinamika ekonomi dan sosial di Semarang pada awal abad ke-20. Adapun *Djawi Hisworo* dan *Sinar Hindia*, meskipun tidak sepenuhnya berbasis di Semarang, memiliki distribusi dan pengaruh yang cukup signifikan di kota tersebut. Kedua surat kabar ini dikenal

⁷ Soeprapto, *Pers Indonesia dalam Pergolakan Politik dan Kekuasaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), hlm. 87.

⁸ Rudy Badil, *Sejarah Pers di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 142.

vokal dalam menyuarakan isu-isu kebangsaan dan ketidakadilan kolonial. *Sinar Hindia* bahkan menjadi cikal bakal dari media pergerakan berhaluan kiri seperti *Hindia Baru*. Seluruh media tersebut tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi ruang artikulasi kepentingan sosial masyarakat lokal. Mereka turut membuka jalan bagi tumbuhnya pemikiran kritis serta semangat perlawanan terhadap sistem kolonial yang menindas. Kehadiran surat kabar lokal ini memberikan fondasi bagi munculnya media pascakemerdekaan yang lebih mandiri dan berpihak kepada kepentingan nasional. Setelah Indonesia merdeka, *Suara Merdeka* hadir sebagai salah satu media cetak yang konsisten menyuarakan kepentingan masyarakat Jawa Tengah.⁹

Surat Kabar *Suara Merdeka* resmi berdiri dan terbit pertama kali pada 11 Februari 1950 di Semarang atas prakarsa H. Hetami. Pendirian surat kabar ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat Jawa Tengah terhadap media informasi yang mampu menyuarakan aspirasi rakyat setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia pada 1949.¹⁰ Pada awal penerbitannya tahun 1950, *Suara Merdeka* hanya terdiri atas empat halaman dengan sarana produksi yang sangat terbatas.

Periode 1950–1980 dapat dipahami sebagai fase perintisan (1950–1959), fase krisis dan adaptasi (1960–1966), serta fase konsolidasi dan penguatan regional (1967–1980). Fase-fase inilah yang menjadi dasar perkembangan *Suara Merdeka* pada dekade berikutnya.

Perkembangan tersebut tidak hanya dapat dipahami melalui aspek kelembagaan dan historis, tetapi juga melalui karakter konten artikel yang dimuat dalam surat kabar ini sebelum diberlakukannya kebijakan pengendalian pers secara ketat. Hal ini menjadi penting karena isi pemberitaan merupakan cerminan langsung dari relasi antara media, masyarakat, dan kekuasaan pada suatu periode tertentu.

⁹ Rudy Badil, *Sejarah Pers di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 124.

¹⁰ PT Suara Merdeka, *Dokumen Sejarah Perusahaan (BAB II)* (Semarang: PT Suara Merdeka, t.t.), hlm. 2.

Sebelum diberlakukannya kebijakan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) pada tahun 1984, konten artikel dalam *Suara Merdeka* menunjukkan karakter yang berada dalam fase transisi antara fungsi informatif pers dan pengaruh ideologi pembangunan Orde Baru. Pada periode akhir 1970-an hingga awal 1980-an, sistem pers Indonesia telah diarahkan untuk mendukung stabilitas nasional dan pembangunan, namun mekanisme kontrol terhadap media belum sepenuhnya dilembagakan secara administratif.¹¹

Kondisi tersebut menyebabkan isi pemberitaan masih memperlihatkan kombinasi antara penyampaian realitas sosial masyarakat dan kecenderungan mengikuti narasi pembangunan negara. *Suara Merdeka* sebagai surat kabar daerah dalam konteks lokal di Semarang memiliki kedekatan yang kuat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Hal ini tercermin dari banyaknya artikel yang memuat kondisi ekonomi rakyat secara langsung.

Berdasarkan arsip cetak *Suara Merdeka* periode 1980–1983, rubrik ekonomi dan daerah secara rutin menampilkan laporan mengenai harga kebutuhan pokok di pasar tradisional, khususnya Pasar Johar sebagai pusat perdagangan utama di Semarang. Artikel-artikel tersebut disajikan secara informatif dengan memuat data harga, lokasi, serta kondisi distribusi barang di lapangan, bahkan dalam beberapa kasus disertai kutipan dari pedagang dan pembeli.¹²

Salah satu contoh pemberitaan menunjukkan laporan mengenai kenaikan harga beras yang dikaitkan dengan faktor musim dan distribusi. Artikel tersebut tidak hanya menyajikan data, tetapi juga menggambarkan kondisi lapangan seperti antrean pembeli dan keluhan pedagang. Pola ini menunjukkan bahwa sebelum tahun 1984, *Suara Merdeka* masih menjalankan fungsi jurnalistik berbasis observasi langsung, bukan sekadar reproduksi informasi resmi pemerintah.¹³

Pemberitaan juga mencakup dinamika sosial masyarakat perkotaan. Arsip

¹¹ David T. Hill, *The Press in New Order Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 58.

¹² I. Imron, “Pembredelan Pers pada Masa Pemerintahan Orde Baru,” *Jurnal CANDI*, Vol. 13 No. 1 (2016), hlm. 149.

¹³ *Ibid.*, hlm. 154.

menunjukkan adanya laporan mengenai urbanisasi ke Semarang yang berdampak pada kepadatan permukiman dan munculnya kawasan kumuh. Artikel disusun secara deskriptif dengan menggambarkan kondisi lingkungan, jumlah penduduk, serta keterbatasan fasilitas umum seperti pendidikan dan transportasi. Wartawan mencantumkan wawancara dengan warga setempat dalam beberapa edisi yang menunjukkan adanya upaya menghadirkan suara masyarakat dalam pemberitaan.¹⁴

Pemberitaan *Suara Merdeka* secara konsisten menyoroti berbagai proyek pembangunan pemerintah daerah, seperti pembangunan jalan, terminal, dan fasilitas pendidikan. Artikel sebelum tahun 1984 masih menampilkan aspek deskriptif yang cukup rinci, termasuk proses pembangunan dan kondisi aktual di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa media berfungsi sebagai dokumentasi sosial, tidak semata-mata sebagai alat legitimasi kekuasaan.¹⁵

Konten politik yang dimuat cenderung bersifat formal dan seremonial. Pemberitaan mengenai kegiatan pejabat pemerintah, kunjungan dinas, serta pelaksanaan pemilihan umum mendominasi rubrik politik. Arsip *Suara Merdeka* pada awal 1980-an menunjukkan bahwa berita mengenai aktivitas Golongan Karya disajikan dalam bentuk laporan kegiatan tanpa analisis kritis.¹⁶

Struktur fisik surat kabar juga memperlihatkan karakter pemberitaan pada masa tersebut. Tata letak halaman menampilkan pembagian rubrik yang jelas seperti berita utama, daerah, ekonomi, dan sosial. Artikel ditulis dalam kolom panjang dengan gaya bahasa informatif, serta dalam beberapa edisi disertai foto hitam-putih yang mendokumentasikan peristiwa sosial maupun pembangunan.¹⁷

Berdasarkan berbagai bukti tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebelum penerapan SIUPP tahun 1984, konten artikel *Suara Merdeka* masih

¹⁴ Yulianus Indrajaya, *Pers Lokal dan Perubahan Sosial* (Semarang: Undip Press, 2010), hlm. 73.

¹⁵ Rudy Badil, *Sejarah Pers di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 142.

¹⁶ Dahlan R. Romli, *Pers dalam Politik Orde Baru* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 41.

¹⁷ S. Saptohadi, "Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum* (2011), hlm. 4.

memperlihatkan keragaman tema dan fungsi jurnalistik yang relatif seimbang. Media tidak sepenuhnya menjadi alat propaganda negara, tetapi tetap menjalankan fungsi informatif dan sosial bagi masyarakat. Kontrol terhadap pers pada masa ini lebih bersifat ideologis dan kultural, bukan administratif.¹⁸

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebelum tahun 1984, konten artikel *Suara Merdeka* masih memperlihatkan keseimbangan antara fungsi informatif dan pengaruh ideologi pembangunan negara. Media belum sepenuhnya berada dalam kontrol administratif yang ketat, sehingga masih memiliki ruang terbatas untuk merepresentasikan realitas sosial masyarakat.

Memasuki periode berikutnya, *Suara Merdeka* terus berkembang sebagai salah satu media massa penting di Jawa Tengah yang mampu bertahan dalam berbagai situasi politik, termasuk pada masa-masa genting antara tahun 1984 hingga 1998.¹⁹ Sebagai media cetak daerah, *Suara Merdeka* bukan hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai saksi sejarah dan aktor dalam dinamika sosial-politik bangsa.

Pers memiliki peran krusial dalam sistem demokrasi maupun dalam pemerintahan otoriter. Ia menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat serta alat pembentuk opini publik. Di Indonesia, media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, melainkan juga sarana kontrol sosial. Akan tetapi, fungsi ini kerap terhambat oleh tekanan politik dan regulasi negara. Burhan Bungin dalam bukunya *Sosiologi Komunikasi* menegaskan bahwa media adalah instrumen dominan dalam membentuk persepsi kolektif masyarakat.²⁰ Oleh karena itu, penting untuk menelusuri bagaimana media bekerja dalam konteks sejarah tertentu, khususnya ketika terjadi tekanan rezim terhadap kebebasan informasi.

¹⁸ David T. Hill, *The Press in New Order Indonesia: Control and Accommodation* (Jakarta: Equinox Publishing, 1994), hlm. 63.

¹⁹ Yulianus Indrajaya, *Pers Lokal dan Perubahan Sosial* (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2010), hlm. 67.

²⁰ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 37.

Koran *Suara Merdeka* merupakan salah satu media cetak yang lahir di Semarang dan memainkan peranan penting di Jawa Tengah. Kebijakan pemerintah melalui Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan praktik swasensor membuat media massa harus berhati-hati dalam memuat pemberitaan.²¹ Meski demikian, *Suara Merdeka* tetap beroperasi dan berperan sebagai salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat Jawa Tengah. Soeprapto dalam *Pers Indonesia dalam Lintasan Sejarah* menjelaskan bahwa media lokal seperti *Suara Merdeka* mencerminkan kehidupan sosial masyarakat daerah secara lebih utuh, karena kedekatannya dengan realitas lokal dan keterlibatannya dalam dinamika sosial politik regional.²² Oleh karena itu, kajian terhadap konten artikelnya dapat mengungkap bagaimana *Suara Merdeka* beradaptasi dengan sistem kontrol media sekaligus merepresentasikan pandangan masyarakat Semarang terhadap isu-isu politik, ekonomi, dan sosial pada masa Orde Baru hingga menjelang Reformasi.

Praktik swasensor menjadi hal umum yang dilakukan oleh redaksi demi menghindari pencabutan izin. David T. Hill dalam *The Press in New Order Indonesia* menyebutkan bahwa media Indonesia pada masa itu lebih berfungsi sebagai penyambung lidah pemerintah daripada alat kritik.²³ Ini berdampak langsung pada isi artikel yang cenderung mengikuti narasi resmi. Koran *Suara Merdeka* sebagai media daerah pun tidak luput dari kondisi ini, namun ia tetap beroperasi dan menjadi sumber utama informasi warga Semarang dan sekitarnya.

Konten artikel selama periode tersebut banyak memuat tema seputar pembangunan, stabilitas, dan nasionalisme. Isu-isu yang sensitif seperti kritik terhadap pemerintah atau militer sangat jarang dimuat secara terbuka. Struktur pemberitaan pun lebih bersifat informatif daripada investigatif. Hal ini

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.

²² Soeprapto, *Pers Indonesia dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Intermasa, 1995), hlm. 87.

²³ David T. Hill, *The Press in New Order Indonesia: Control and Accommodation* (Jakarta: Equinox Publishing, 1994), hlm. 65.

mencerminkan atmosfer politik yang represif dan tidak memberi ruang pada kebebasan berekspresi. Stanley J. Baran dalam *Introduction to Mass Communication* menjelaskan bahwa dalam rezim otoriter, media dikontrol untuk memperkuat stabilitas negara dan meminimalkan konflik sosial.²⁴ Tidak heran jika berita yang ditampilkan sangat selektif dan berhati-hati. Pemberitaan yang muncul lebih bertujuan menjaga citra negara daripada mengungkap realitas.

Koran *Suara Merdeka* tetap eksis dan berkembang dalam situasi penuh keterbatasan tersebut. Ia mampu menyesuaikan diri dengan narasi besar pembangunan nasional yang dicanangkan pemerintah. Media ini mengangkat isu-isu lokal dengan bingkai yang selaras dengan arah kebijakan pusat. Atmakusumah Astraatmadja dalam *Pers Indonesia Baru* menekankan bahwa media lokal sering kali lebih lentur dalam menyampaikan informasi karena dekat dengan komunitasnya.²⁵ Media ini masih memiliki peluang untuk menyisipkan pesan sosial yang relevan meskipun ruang geraknya terbatas. Kedekatan geografis dan sosiologis membuat media lokal lebih dipercaya masyarakatnya. Oleh karena itu, konten artikel *Suara Merdeka* bisa menjadi sumber untuk memahami persepsi publik pada masa itu.

Analisis isi artikel menjadi metode yang tepat untuk memahami kecenderungan redaksional koran tersebut. Analisis ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi tema dominan, sudut pandang penulis, serta cara penyampaian informasi. Menurut Denis McQuail dalam *Mass Communication Theory*, studi isi media dapat mengungkap orientasi ideologis suatu media.²⁶ Kajian ini juga membantu menilai peran media dalam konstruksi sosial masyarakat. Penggunaan kata-kata, judul berita, dan pemilihan narasumber dapat digunakan untuk mengidentifikasi agenda media dalam menyampaikan suatu isu. Hasil identifikasi

²⁴ Stanley J. Baran, *Pengantar Komunikasi Massa: Melek Media dan Budaya*, Edisi keenam (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 94.

²⁵ Atmakusumah Astraatmadja, *Pers Indonesia Baru: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab* (Jakarta: Dewan Pers, 2002), hlm. 58.

²⁶ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa McQuail*, Edisi keenam (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 89.

tersebut penting untuk mengetahui apakah media bersifat netral, berpihak, atau sekadar memperkuat narasi negara. *Suara Merdeka* menjadi objek kajian yang layak diteliti secara akademik.

Media massa berfungsi bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai alat pembentuk opini publik yang diarahkan untuk memperkuat citra positif pemerintah. Kebijakan informasi yang dikendalikan pusat menjadikan pemberitaan media lebih bersifat satu arah, di mana ruang bagi kritik sosial dan wacana alternatif sangat terbatas.²⁷ Namun demikian, di tengah keterbatasan tersebut, media seperti *Suara Merdeka* tetap berperan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kebijakan negara, terutama melalui penonjolan tema-tema pembangunan, stabilitas politik, dan semangat nasionalisme.

Menjelang berakhirnya masa kekuasaan Orde Baru, dinamika dalam dunia pers mulai menunjukkan perubahan. Media perlahan mengalami pergeseran fungsi dari sekadar corong pemerintah menuju lembaga yang mulai menampilkan variasi pandangan dan suara masyarakat. Pergeseran ini tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan situasi politik nasional, tetapi juga oleh meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya kebebasan informasi. Periode ini menandai peralihan dari fase kontrol ketat menuju munculnya ruang kebebasan pers yang lebih terbuka pada masa reformasi.

Keunggulan media cetak seperti *Suara Merdeka* adalah dokumentasi beritanya yang dapat diarsipkan dan diteliti kembali. Hal ini memungkinkan para peneliti menelusuri perubahan isi media dari waktu ke waktu. Krippendorff dalam *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology* menegaskan bahwa analisis isi media cetak merupakan metode ilmiah untuk menyelidiki makna komunikasi.²⁸ Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti memahami pengaruh perubahan politik terhadap isi berita. Ini juga menunjukkan bagaimana media menyesuaikan strategi komunikasinya terhadap kondisi eksternal. Kajian ini dapat

²⁷ Nasution, Kacung Marijan. *Sejarah Indonesia Modern* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006), hlm. 187.

²⁸ Klaus Krippendorff, *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi*, Edisi kedua (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 53.

dilakukan secara sistematis melalui pengumpulan dan kategorisasi artikel berdasarkan tema. *Suara Merdeka* menyimpan jejak narasi sejarah yang layak dikaji secara metodologis.

Studi terhadap media lokal memberikan perspektif yang berbeda dibandingkan media nasional. Media lokal cenderung lebih dekat dengan pembacanya dan memiliki konteks lokal yang khas. Effendy dalam *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi* menyebutkan bahwa media lokal mampu membentuk kesadaran kolektif komunitasnya sendiri.²⁹ Oleh karena itu, konten artikel *Suara Merdeka* tidak hanya mencerminkan kebijakan nasional, tetapi juga realitas sosial masyarakat Jawa Tengah. Kajian ini dapat mengungkap bagaimana narasi nasional diterjemahkan dalam konteks lokal. Hal ini menjadi penting dalam memahami distribusi wacana kekuasaan dan resistensi dalam skala mikro. Konten lokal menyimpan muatan budaya dan nilai sosial masyarakatnya.

Penelitian terhadap konten artikel koran *Suara Merdeka* tidak hanya berkontribusi pada bidang sejarah pers, tetapi juga pada studi komunikasi dan kebudayaan. Melalui kajian ini, dapat diketahui bagaimana media bertahan dalam tekanan kekuasaan dan bagaimana ia membentuk ulang identitas kolektif masyarakat. Budianta dalam *Wacana dan Media* menyatakan bahwa media tidak sekadar menyampaikan informasi, melainkan turut menciptakan makna sosial yang mempengaruhi cara pandang masyarakat.³⁰ *Suara Merdeka* menjadi representasi dari pergulatan lokal terhadap arus informasi nasional. Kajian kontennya mampu menjelaskan pola-pola komunikasi yang terbentuk selama tiga dekade tersebut. Penting untuk menempatkan media ini dalam kerangka analisis yang komprehensif dan historis. Dengan demikian, pemahaman terhadap sejarah media Indonesia akan semakin kaya dan mendalam.

Alasan Peneliti memilih judul “*Konten Artikel dalam Surat Kabar Suara Merdeka di Semarang Tahun 1984–1998*” memiliki urgensi yang signifikan

²⁹ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 99.

³⁰ Melani Budianta, *Wacana dan Media: Kritik Budaya dalam Praktik* (Jakarta: Jalasutra, 2002), hlm. 77.

dalam konteks kajian sejarah media dan komunikasi massa Indonesia. Secara historis, periode 1984–1998 merupakan masa penting yang menandai akhir pemerintahan Orde Baru hingga menjelang Reformasi, di mana kebebasan pers dibatasi secara ketat melalui kebijakan *Surat Izin Usaha Penerbitan Pers* (SIUPP) dan praktik swasensor. *Suara Merdeka* sebagai media lokal tetap bertahan dan berperan penting sebagai penghubung informasi antara pemerintah dan masyarakat di tengah situasi tersebut. Kajian terhadap konten artikelnya menjadi penting karena dapat memperlihatkan bagaimana media lokal menjalankan fungsi informatif dan edukatif di tengah situasi politik yang terkendali, sekaligus menampilkan bentuk adaptasi dan negosiasi terhadap kekuasaan negara.

Urgensi penelitian ini juga terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan historiografi pers Indonesia. Selama ini, sebagian besar penelitian sejarah pers berfokus pada media nasional seperti *Kompas*, *Tempo*, atau *Sinar Harapan*, sementara kajian terhadap media lokal masih jarang dilakukan secara mendalam. Media lokal memiliki kedekatan emosional, geografis, dan kultural dengan masyarakatnya sehingga lebih representatif dalam merekam dinamika sosial daerah. *Suara Merdeka* bukan hanya sebagai sumber informasi lokal, tetapi juga sebagai cermin dari transformasi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat Jawa Tengah selama tiga dekade terakhir Orde Baru.

Secara akademis, penelitian ini memiliki urgensi untuk memperluas cakupan studi sejarah dengan memadukan pendekatan sejarah sosial dan analisis komunikasi massa. Kajian ini mengisi kekosongan dalam literatur ilmiah dengan menghadirkan perspektif daerah terhadap dinamika pers nasional, serta menunjukkan bahwa media lokal turut memainkan peran strategis dalam membentuk opini publik dan kesadaran sosial. Penelitian ini juga penting secara metodologis karena mengaplikasikan metode analisis isi dengan prinsip heuristik dan kritik sumber sebagaimana diatur dalam pedoman penelitian sejarah, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Penelitian ini juga berkaitan dengan nilai pelestarian sumber sejarah. Arsip surat kabar seperti *Suara Merdeka* merupakan dokumen sosial yang memuat catatan peristiwa dan pandangan publik pada zamannya. Melalui penelitian ini,

arsip tersebut tidak hanya dikaji sebagai bahan dokumentasi, tetapi juga diinterpretasikan sebagai teks historis yang mengandung ideologi, wacana, dan konstruksi makna. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu sejarah, tetapi juga membantu memperkuat kesadaran historis masyarakat terhadap peran media dalam perjalanan demokrasi Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada upayanya untuk menghadirkan pemahaman baru mengenai posisi media lokal dalam sejarah politik dan sosial bangsa. Kajian terhadap *Suara Merdeka* tidak hanya merekam dinamika komunikasi masa lalu, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana media dapat berperan sebagai instrumen perubahan sosial yang tetap eksis di tengah tekanan kekuasaan.

1.2 Rumusan Masalah

Penulisan sejarah yang baik harus didasarkan pada pemaparan runtutan peristiwa yang mendahului pokok kajian. Hal ini penting untuk membangun pemahaman yang utuh dan kontekstual terhadap suatu peristiwa sejarah. Oleh karena itu, kajian terhadap latar peristiwa yang relevan perlu dilakukan guna memperkuat analisis terhadap isu utama yang diangkat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang akan menjadi fokus pembahasan dalam makalah ini yaitu:

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya konten artikel pada surat kabar *Suara Merdeka* tahun 1984-1998?
2. Bagaimana eksistensi konten artikel pada surat kabar *Suara Merdeka* tahun 1984-1998?
3. Apa dampak konten artikel surat kabar *Suara Merdeka* terhadap kondisi ekonomi, sosial budaya, dan politik pembangunan masyarakat di Semarang?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

1. Mendeskripsikan latar belakang munculnya konten artikel dalam surat kabar *Suara Merdeka* tahun 1984–1998

2. Menganalisis bentuk dan keberlangsungan konten artikel *Suara Merdeka* sebagai media lokal di Jawa Tengah terutama masalah politik, ekonomi dan pendidikan
3. Menjelaskan dampak konten artikel dalam *Suara Merdeka* terhadap Masyarakat

1.3.2 Manfaat

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian sejarah media dan komunikasi massa di Indonesia, khususnya mengenai bagaimana media lokal berperan dalam merepresentasikan narasi ekonomi, politik, dan pendidikan di bawah tekanan rezim otoriter. Penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai fungsi media dalam struktur kekuasaan dan pembentukan opini publik melalui kajian historis dan ideologis terhadap konten artikel, serta dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam bidang sejarah sosial, komunikasi, dan budaya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh akademisi, peneliti, serta mahasiswa sebagai bahan referensi dalam kajian media dan sejarah lokal. Penelitian ini juga memberikan pemahaman yang berguna bagi jurnalis dan pengelola media tentang pentingnya peran media lokal sebagai jembatan komunikasi antara negara dan masyarakat. Selain itu, bagi masyarakat umum, penelitian ini dapat membantu membangun kesadaran historis tentang bagaimana media pernah berfungsi dalam menyampaikan wacana pembangunan, mengarahkan opini, sekaligus merefleksikan suara kolektif dalam batas- batas sistem yang represif.

1.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini secara khusus difokuskan pada kajian terhadap konten artikel yang ditulis oleh redaktur dan wartawan internal surat kabar *Suara Merdeka* di Semarang. Pemilihan fokus pada tulisan redaksional ini didasarkan atas

pertimbangan metodologis bahwa karya jurnalistik hasil produksi internal redaksi merupakan cerminan langsung dari sikap, kebijakan, dan ideologi media terhadap peristiwa sosial yang terjadi. Selain itu, arsip artikel yang berasal dari redaksi lebih mudah diakses melalui koleksi perpustakaan daerah, dokumentasi media cetak, maupun sumber digital yang memuat terbitan *Suara Merdeka* dari masa Orde Baru hingga menjelang Reformasi. Kondisi tersebut menjadikan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat keaslian, keberlanjutan, dan nilai historis yang lebih terjamin.

Lingkup temporal penelitian ini ditetapkan pada tahun 1984–1998. Tahun 1984 dipilih sebagai titik awal karena pada periode tersebut pemerintah Orde Baru menerapkan pengetatan regulasi melalui kebijakan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang memperkuat kontrol negara terhadap aktivitas pers nasional. Kebijakan ini berdampak langsung pada pola pemberitaan berbagai media, termasuk *Suara Merdeka*, yang harus menyesuaikan diri dengan batasan politik informasi yang berlaku. Sementara itu, tahun 1998 menjadi batas akhir karena menandai runtuhnya rezim Orde Baru dan awal terbukanya kembali kebebasan pers pada masa Reformasi.³¹ Rentang waktu 1984–1998 dipilih karena memungkinkan pengamatan terhadap perubahan sosial, politik, dan dinamika kekuasaan yang tercermin dalam konten artikel *Suara Merdeka*. Pembahasan juga mencakup bagaimana redaktur menempatkan dirinya dalam posisi antara kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dan tanggung jawab sosial kepada pembaca lokal. Dengan membatasi ruang lingkup pada karya redaksional, penelitian ini dapat menggali aspek ideologis, profesional, dan sosial yang membentuk karakter pemberitaan *Suara Merdeka* sebagai media daerah.

Lingkup spasial penelitian ini berfokus pada wilayah Semarang karena kota ini merupakan pusat aktivitas penerbitan *Suara Merdeka* sekaligus ruang sosial tempat media tersebut berkembang. Semarang memiliki dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks sehingga menjadikannya konteks yang relevan untuk

³¹ Atmakusumah Astraatmadja, *Media Massa dan Kekuasaan* (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 77.

menganalisis peran serta isi pemberitaan media lokal. Selain itu, karakter *Suara Merdeka* sebagai surat kabar daerah yang menjangkau pembaca di Semarang dan wilayah sekitarnya semakin menegaskan pentingnya kota Semarang sebagai lingkup spasial.³² Lingkup spasial tersebut membantu menjelaskan bagaimana kondisi lokal Semarang memengaruhi pembentukan tema berita serta bagaimana media ini merepresentasikan persoalan masyarakat sepanjang periode 1984–1998. Melalui pendekatan analisis isi (*content analysis*) dengan perspektif historis, penelitian ini tidak hanya akan menelusuri teks secara deskriptif, tetapi juga mencoba memahami makna sosial dan politik yang tersirat di balik penyajian informasi. Fokus pada redaksi internal juga sejalan dengan prinsip *objektivitas sumber* sebagaimana dianjurkan dalam pedoman penelitian sejarah, yakni penggunaan sumber primer yang dapat diverifikasi, sistematis, dan memiliki nilai representatif terhadap konteks zamannya.

Dengan demikian, pembatasan lingkup kajian ini bertujuan agar penelitian lebih terarah dan mendalam dalam menggambarkan peran *Suara Merdeka* sebagai salah satu media lokal penting di Indonesia. Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana redaksi media lokal tidak sekadar menjadi penyampai berita, tetapi juga agen komunikasi dan aktor sejarah yang turut membentuk kesadaran publik di tengah tekanan rezim politik yang otoriter.

Penelitian ini termasuk ke dalam lingkup kajian sejarah pers, yakni cabang dari disiplin sejarah sosial yang menelaah perkembangan media massa sebagai bagian dari dinamika sosial dan politik masyarakat. Kajian sejarah pers tidak semata-mata menyoroti kronologi pertumbuhan media, melainkan juga menelaah fungsi, peran, dan posisi media dalam sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya pada suatu periode tertentu. Melalui kajian ini, media massa dipahami sebagai agen sejarah yang turut berperan dalam membentuk realitas sosial serta memengaruhi proses perubahan masyarakat. Pers bukan hanya alat penyampai informasi, tetapi juga sarana pembentukan opini publik dan penyebaran ideologi. Sebagaimana

³² Slamet Rahardjo, *Sejarah Kota Semarang* (Semarang: Dinas Pariwisata Kota Semarang, 2009), hlm. 112.

dinyatakan oleh Taufik Abdullah, sejarah pers memiliki hubungan erat dengan perubahan sosial karena media berfungsi sebagai medium interaksi antara masyarakat dan kekuasaan.³³ Dengan demikian, penelitian terhadap media massa dapat memberikan gambaran mengenai kondisi sosial, politik, dan kultural suatu masa secara lebih komprehensif.

Secara lebih spesifik, penelitian ini menempatkan surat kabar *Suara Merdeka* sebagai objek kajian dalam kerangka sejarah pers Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru, dengan fokus temporal antara tahun 1984 hingga 1998. Periode tersebut merupakan masa diberlakukannya kebijakan pengawasan yang ketat terhadap media massa melalui Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) yang diterbitkan oleh Departemen Penerangan, serta munculnya praktik swasensor di lingkungan redaksi. Kebijakan tersebut menjadikan media berfungsi sebagai instrumen politik yang diarahkan untuk mendukung stabilitas nasional dan pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Namun demikian, sebagai media daerah, *Suara Merdeka* tetap berupaya menjalankan fungsi sosialnya sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dan masyarakat Jawa Tengah. Pendekatan sejarah pers dalam penelitian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana media lokal beradaptasi terhadap tekanan politik dan ideologis, sekaligus mempertahankan peran informatif, edukatif, dan sosialnya di tengah keterbatasan kebebasan pers. Melalui analisis terhadap konten artikelnya, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan hubungan antara kekuasaan negara dan dinamika sosial masyarakat daerah dalam konteks kehidupan pers Indonesia menjelang berakhirnya masa Orde Baru.³⁴

³³ Taufik Abdullah, *Pers dan Perubahan Sosial di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 12.

³⁴ Dahlan R. Romli, *Pers dalam Politik Orde Baru: Kontrol dan Pembredelan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 45.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka adalah peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait dengan materi penelitian. Bahan-bahan pustaka yang dapat ditinjau dapat berupa buku teks, hasil penelitian, maupun artikel ilmiah. Tinjauan pustaka berisi uraian pokok dari pustaka yang ditinjau atau diulas, dan penjelasan mengenai perbedaan antara karya yang ditinjau dengan penelitian yang dilakukan.¹

Irvan Hidayat dalam skripsinya yang berjudul “Konten Artikel-Artikel dalam Koran Sinar Djawa dan Sinar Hindia Tahun 1917–1918”², membahas konten-konten artikel yang terdapat dalam surat kabar *Sinar Djawa* dan *Sinar Hindia* yang diterbitkan oleh Sarekat Islam Semarang. Skripsi ini mengkaji berbagai tema artikel seperti pendidikan, politik, dan ekonomi yang dimuat dalam surat kabar tersebut. Irvan menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci untuk menganalisis bagaimana surat kabar ini menjadi media kontra-hegemoni terhadap pemerintah kolonial Belanda dan kapitalis asing.

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus waktu dan sumber primer. Irvan meneliti periode 1917–1918, sementara penelitian

¹ Sunarlan, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2018), hlm. 43.

² Irvan Hidayat, “Konten Artikel-Artikel dalam Koran Sinar Djawa dan Sinar Hindia Tahun 1917–1918,” *Skripsi* pada Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

penulis berfokus pada rentang tahun 1984–1998. Selain itu, penelitian ini menggunakan konten artikel dalam surat kabar *Suara Merdeka* sebagai sumber utama dan menganalisis isu-isu pendidikan, politik, dan ekonomi melalui pendekatan struktural fungsional. Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan melihat bagaimana surat kabar lokal di era Orde Baru dan Reformasi berkontribusi dalam membentuk opini publik terkait isu-isu krusial di masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Alyana Ulfa Rahmawati berjudul “Kartun Politik dalam Surat Kabar Bataviaasch Nieuwsblad Tahun 1932–1942”³ mengkaji fenomena kemunculan kartun politik sebagai sarana kritik sosial pada masa Hindia Belanda. Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Untuk menganalisis data, digunakan pendekatan komunikasi politik Gabriel A. Almond dan teori semiologi Roland Barthes. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kartun politik menjadi salah satu bentuk perlawanan intelektual terhadap kebijakan pemerintah kolonial, krisis ekonomi, perjuangan nasionalisme, dan peristiwa politik internasional pada periode 1932–1942.

Penelitian ini mengkaji konten artikel dalam surat kabar *Suara Merdeka* tahun 1984–1998 dengan fokus pada isu-isu politik, ekonomi, dan pendidikan selama masa Orde Baru hingga Reformasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada periode kajian yang lebih panjang dan fokus pada analisis isi teks artikel, bukan ilustrasi visual. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang peran media lokal dalam membentuk opini publik di tengah situasi politik yang represif, sekaligus memperkaya kajian historiografi pers Indonesia pada periode pasca-kolonial.

Penelitian lain dilakukan oleh Wildan Novanda Suhri Setiani berjudul “Iklan Kecantikan dalam Surat Kabar Soerabaijasch Handelsblad Tahun 1930–

³ Alyana Ulfa Rahmawati, “Kartun Politik dalam Surat Kabar *Bataviaasch Nieuwsblad* Tahun 1932–1942” *Skripsi* pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember, 2024.

1942”.⁴ Penelitian ini mengkaji peran iklan kecantikan terhadap perubahan gaya hidup masyarakat kolonial. Menggunakan metode sejarah dan teori pemasaran dari Philip Kotler, penelitian ini menemukan bahwa iklan kecantikan berperan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap citra kecantikan serta memengaruhi pola konsumsi masyarakat kelas menengah Eropa dan Indo pada masa itu.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Wildan terletak pada fokus kajian yang tidak membahas iklan, melainkan konten artikel berita dan opini dalam surat kabar *Suara Merdeka*. Selain itu, penelitian ini mencakup rentang waktu yang lebih panjang serta konteks sosial-politik yang berbeda, yaitu masa Orde Baru (1984–1998), sehingga menghasilkan perspektif baru tentang dinamika pers lokal di era tersebut.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Azkiyatul Lutfiyah berjudul “Peran Koran *Suara Merdeka* Terhadap Gerakan Mahasiswa di Semarang Tahun 1998”.⁵ Penelitian ini mengkaji hubungan antara media massa dan gerakan mahasiswa menjelang runtuhnya Orde Baru. Menggunakan metode sejarah dan sumber-sumber primer berupa arsip koran dan wawancara, penelitian ini menyimpulkan bahwa *Suara Merdeka* menjadi salah satu media yang memuat berita-berita kritis terhadap pemerintah, sehingga turut membangkitkan kesadaran politik mahasiswa dan masyarakat.

Berbeda dengan penelitian Azkiyatul yang berfokus pada peran media dalam peristiwa gerakan mahasiswa di tahun 1998, penelitian ini mengkaji konten artikel *Suara Merdeka* dalam rentang waktu yang lebih panjang, dari 1984 hingga 1998. Dengan demikian, penelitian ini dapat memotret dinamika pemberitaan tidak hanya pada masa krisis 1998, tetapi juga pada periode sebelumnya, sehingga

⁴ Wildan Novanda Suhri Setiani, “Iklan Kecantikan dalam Surat Kabar *Soerabaijasch Handelsblad* Tahun 1930–1942” *Skripsi* pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember, 2025.

⁵ Azkiyatul Lutfiyah, “Peran Koran *Suara Merdeka* terhadap Gerakan Mahasiswa di Semarang Tahun 1998” *Skripsi* pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2020.

menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif tentang posisi *Suara Merdeka* dalam membentuk opini publik di Jawa Tengah.

Taufik Abdullah dalam bukunya *Pers dan Perubahan Sosial di Indonesia*⁶ menjelaskan bahwa pers merupakan salah satu faktor penting dalam dinamika sosial dan politik Indonesia. Ia menyoroti bagaimana media berperan sebagai agen perubahan sosial yang membentuk opini publik serta menjadi jembatan antara negara dan masyarakat. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa setiap fase sejarah Indonesia memperlihatkan transformasi fungsi pers, mulai dari alat perjuangan pada masa kolonial, alat mobilisasi massa pada masa revolusi, hingga alat legitimasi kekuasaan pada masa Orde Baru. Abdullah menguraikan bahwa kontrol pemerintah terhadap pers melalui regulasi dan sensor tidak sepenuhnya menghapus peran sosial media, karena jurnalis masih berusaha menyalurkan kritik secara simbolik. Karya ini relevan dengan penelitian penulis karena memberikan kerangka teoretis mengenai hubungan pers dan kekuasaan yang dapat dijadikan pijakan dalam menelaah situasi media pada masa Orde Baru, khususnya dalam konteks media daerah seperti *Suara Merdeka* yang hidup di bawah tekanan rezim.

Berbeda dengan pendekatan makro yang dilakukan oleh Abdullah, penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui fokus yang lebih spesifik pada analisis konten artikel surat kabar *Suara Merdeka* di Semarang tahun 1984–1998. Penelitian ini tidak hanya menyoroti posisi media terhadap negara, tetapi juga menganalisis bagaimana *Suara Merdeka* sebagai media lokal membingkai isu-isu politik, ekonomi, dan pendidikan secara hati-hati untuk mempertahankan eksistensinya di tengah sistem politik yang represif. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pandangan Abdullah dengan menempatkan media lokal sebagai agen komunikasi yang aktif, bukan hanya sebagai objek kontrol negara, serta menunjukkan bagaimana fungsi sosial pers tetap hidup di tengah keterbatasan politik dan ideologis.

⁶ Taufik Abdullah, *Pers dan Perubahan Sosial di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1985).

Soeprapto dalam *Pers Indonesia dalam Lintasan Sejarah*⁷ menelusuri perjalanan pers Indonesia dari masa kolonial hingga masa Orde Baru. Ia menjelaskan bahwa media massa merupakan saksi sekaligus pelaku sejarah, karena keberadaannya selalu mengikuti arah perubahan politik dan sosial bangsa. Menurut Soeprapto, pers daerah memiliki peran yang tak kalah penting dibandingkan pers nasional karena mampu merefleksikan aspirasi masyarakat di luar pusat kekuasaan. Ia menyoroti bahwa dalam sistem politik yang represif, media lokal sering kali harus beradaptasi dengan kebijakan pemerintah agar tetap bertahan, namun tetap berusaha menyampaikan suara publik melalui cara-cara halus dan diplomatis. Pemikiran Soeprapto ini relevan dengan penelitian penulis, karena memberikan landasan historis mengenai peran media daerah dalam konteks politik nasional, khususnya bagaimana media seperti *Suara Merdeka* beroperasi dalam situasi sosial-politik Jawa Tengah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan empiris terhadap konten artikel *Suara Merdeka* selama kurun waktu 1984–1998 untuk melihat bagaimana media lokal tersebut menegosiasikan wacana nasional dalam ruang redaksionalnya. Jika Soeprapto menyoroti sejarah pers secara umum, maka penelitian ini menampilkan perspektif mikro yang memperlihatkan bagaimana *Suara Merdeka* menjadi representasi dari pergulatan antara ideologi negara dan aspirasi masyarakat lokal. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya pemahaman tentang bagaimana media daerah berperan dalam membangun kesadaran sosial dan politik di tengah tekanan rezim Orde Baru, khususnya pada masa ketika kontrol media semakin menguat menjelang akhir pemerintahan Soeharto.

Dahlan R. Romli dalam bukunya *Pers dalam Politik Orde Baru: Kontrol dan Pembredelan*⁸ membahas secara rinci sistem pengawasan media oleh pemerintah melalui kebijakan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers). Romli

⁷ Soeprapto, *Pers Indonesia dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Intermasa, 1995).

⁸ Dahlan R. Romli, *Pers dalam Politik Orde Baru: Kontrol dan Pembredelan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

menjelaskan bahwa kebijakan ini menjadi alat utama pemerintah untuk mengontrol isi media dan membatasi kebebasan pers. Ia menyoroti praktik swasensor yang dilakukan oleh redaksi sebagai strategi bertahan hidup agar tidak terkena pembredelan. Selain itu, Romli juga menggambarkan berbagai kasus pembredelan media nasional seperti *Tempo* dan *Detik* yang menunjukkan bahwa kebebasan pers pada masa Orde Baru bersifat semu. Karya Romli relevan bagi penelitian ini karena memberikan gambaran tentang situasi umum dunia pers di bawah tekanan politik yang ketat, di mana media harus menyeimbangkan antara idealisme jurnalistik dan kepentingan penguasa.

Penelitian ini memperluas pembahasan Romli dengan menempatkan fokus pada media lokal *Suara Merdeka* yang beroperasi di Semarang selama 1984–1998, masa di mana sistem kontrol terhadap media masih kuat namun mulai menunjukkan gejala kelonggaran menjelang Reformasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis bagaimana *Suara Merdeka* menampilkan konten artikel yang bersifat informatif, edukatif, namun tetap mematuhi garis kebijakan pemerintah. Melalui pendekatan analisis isi kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa media daerah mampu menciptakan bentuk komunikasi yang “aman” namun tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga berperan sebagai jembatan antara kekuasaan dan publik lokal di penghujung era Orde Baru.

Rudy Badil dalam bukunya *Sejarah Pers di Indonesia*⁹ memberikan gambaran kronologis tentang perkembangan dunia pers sejak masa kolonial hingga reformasi. Ia menegaskan bahwa sejarah pers Indonesia tidak pernah lepas dari intervensi kekuasaan, tetapi tetap menjadi bagian penting dari proses pembentukan kesadaran nasional. Badil menyoroti bagaimana media pada masa Orde Baru diarahkan untuk mendukung kebijakan pembangunan dan stabilitas politik yang dijalankan pemerintah. Media massa pada masa tersebut lebih berfungsi sebagai corong negara daripada forum publik. Meskipun demikian, ia juga mengakui adanya peran media daerah yang tetap mempertahankan fungsi informatif dan sosialnya bagi masyarakat setempat. Pandangan ini sejalan dengan

⁹ Rudy Badil, *Sejarah Pers di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2008).

fokus penelitian penulis yang mengkaji media daerah sebagai aktor sosial dalam dinamika lokal.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan terhadap analisis isi media lokal *Suara Merdeka* sebagai cermin kondisi sosial dan politik Jawa Tengah selama 1984–1998. Jika Badil menyoroti sejarah pers dari perspektif nasional, maka penelitian ini memberikan sudut pandang mikro dengan menelusuri bagaimana media lokal menyesuaikan diri terhadap tekanan politik nasional sambil mempertahankan relevansinya bagi masyarakat daerah. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya historiografi pers Indonesia dengan menghadirkan studi lokal yang menunjukkan interaksi antara media, masyarakat, dan kekuasaan menjelang masa transisi Reformasi.

Atmakusumah Astraatmadja dalam *Pers Indonesia Baru: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab*¹⁰ menjelaskan transisi besar dunia pers Indonesia setelah jatuhnya Orde Baru pada 1998. Ia menyoroti perubahan fundamental dalam hubungan antara negara, media, dan masyarakat, di mana kebebasan pers mulai dijamin, namun diiringi tantangan etika dan profesionalisme. Astraatmadja menekankan bahwa media pasca-reformasi tidak hanya dituntut untuk bebas, tetapi juga bertanggung jawab dalam menjalankan fungsi sosialnya. Pandangan ini relevan dengan penelitian penulis karena menggambarkan fase lanjutan dari sejarah media yang menjadi latar belakang berakhirnya masa kajian penelitian ini, yakni tahun 1998.

Kebaruan penelitian ini justru terletak pada penelaahan masa sebelum Reformasi, yaitu periode 1984–1998 ketika kebebasan pers masih dibatasi dan media lokal seperti *Suara Merdeka* beroperasi di bawah sistem kontrol negara. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi historis dengan menunjukkan bagaimana proses menuju kebebasan pers telah dimulai dari upaya bertahan dan beradaptasi media lokal selama Orde Baru. *Suara Merdeka* menjadi contoh bagaimana media daerah menavigasi batas antara kepatuhan dan kritik

¹⁰ Atmakusumah Astraatmadja, *Pers Indonesia Baru: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab* (Jakarta: Dewan Pers, 2002).

secara halus, sebelum akhirnya memasuki era kebebasan yang digambarkan oleh Astraatmadja.

Yulianus Indrajaya dalam kaaryanya yang berjudul *Pers Lokal dan Perubahan Sosial*¹¹ menjelaskan bahwa media daerah memainkan peran penting dalam pembentukan kesadaran sosial masyarakat lokal. Ia menekankan bahwa pers lokal memiliki kedekatan emosional dan kultural dengan komunitasnya sehingga mampu menjadi sarana komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan warga. Selain berfungsi sebagai penyalur informasi, media lokal juga berperan dalam membentuk identitas sosial dan kultural daerah. Indrajaya juga menyoroti bagaimana media lokal menghadapi tantangan dalam menjaga independensi di tengah tekanan politik lokal dan keterbatasan ekonomi. Pemikiran ini memiliki relevansi kuat dengan penelitian penulis karena sama-sama melihat media lokal sebagai aktor penting dalam dinamika sosial.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penelaahan historis terhadap media lokal di masa politik represif, khususnya *Suara Merdeka* pada periode 1984–1998. Berbeda dari studi Indrajaya yang lebih menyoroti fungsi sosial media dalam era modern, penelitian ini menunjukkan bagaimana media lokal di masa Orde Baru menjadi sarana diplomasi wacana antara negara dan masyarakat. Dengan menelusuri konten artikelnya, penelitian ini memperlihatkan bahwa *Suara Merdeka* bukan sekadar penyampai informasi, melainkan juga agen sosial yang berperan dalam menjaga komunikasi antara kekuasaan dan rakyat di tingkat daerah menjelang transisi Reformasi.

¹¹ Yulianus Indrajaya, *Pers Lokal dan Perubahan Sosial* (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2010).

BAB 3

PENDEKATAN DAN KERANGKA TEORETIS, METODE PENELITIAN DAN SISTEMATIKA PENULISAN

3.1 Pendekatan dan Kerangka Teoretis

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan ilmu politik untuk memahami bagaimana media massa tidak hanya berfungsi sebagai saluran informasi, tetapi juga sebagai instrumen yang terlibat dalam dinamika kekuasaan. Pendekatan ini menempatkan media sebagai entitas yang berada dalam struktur dan praktik politik, di mana produksi dan distribusi informasi tidak lepas dari relasi kuasa, ideologi, serta kebijakan negara.

Menurut McNair, media adalah bagian integral dari sistem politik karena ia berperan dalam membentuk opini publik, memengaruhi perilaku politik, dan bahkan dapat dijadikan alat legitimasi oleh penguasa.¹ Oleh karena itu, pendekatan ilmu politik menjadi relevan dalam menelaah hubungan antara media dan negara, terutama dalam konteks Indonesia era Orde Baru.

Berikut ini adalah beberapa prinsip utama yang digunakan dalam pendekatan ilmu politik terhadap media:

Media berfungsi sebagai alat kekuasaan. Dalam konteks politik, media

¹Brian McNair, *Pengantar Komunikasi Politik*, Edisi kelima (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 5.

dapat digunakan untuk membentuk kesadaran publik dan mengarahkan opini masyarakat sesuai dengan kepentingan pihak yang berkuasa. Negara sering kali menggunakan media untuk membingkai realitas politik yang menguntungkan status quo. Hal ini sejalan dengan pandangan Gramsci tentang *hegemonic apparatus*, yaitu lembaga-lembaga dalam masyarakat (termasuk media) yang digunakan oleh negara untuk mempertahankan hegemoni ideologis tanpa kekerasan langsung.² Media dalam sistem otoriter cenderung berada dalam posisi subordinat terhadap negara. Di era Orde Baru, penerapan kebijakan SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) menjadi mekanisme kontrol yang efektif untuk menekan media. Seperti diungkapkan oleh Romli, SIUPP merupakan alat sensor politik yang membatasi kebebasan pers secara sistematis.³ Kontrol ideologis merupakan media dalam pendekatan ilmu politik dipahami juga sebagai medium reproduksi ideologi negara. Seperti dikemukakan oleh Herman dan Chomsky dalam teori *propaganda model*, media arus utama kerap menjadi bagian dari sistem hegemonik yang menyebarkan nilai-nilai dominan dalam kemasan yang tampak netral. Artinya, bahasa yang digunakan media sering kali menjadi kendaraan kekuasaan dalam membingkai makna dan kebenaran.⁴

Kerangka ini menempatkan kajian terhadap konten yang dimuat dalam *Suara Merdeka* sebagai hal penting untuk melihat apakah pemberitaannya menunjukkan keberpihakan tertentu atau justru merefleksikan ideologi penguasa yang direproduksi melalui narasi, diksi, dan struktur berita. Analisis semacam ini akan memperlihatkan bahwa media tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor ideologis yang turut membentuk tatanan politik nasional yang dominan..⁵

² Antonio Gramsci, *Catatan dari Penjara*, terj. Quintin Hoare dan Geoffrey Nowell Smith (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 12.

³ Dahlan R. Romli, *Pers dalam Politik Orde Baru: Kontrol dan Pembredelan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 85.

⁴ Edward S. Herman dan Noam Chomsky, *Menciptakan Persetujuan: Ekonomi Politik Media Massa* (Jakarta: Marjin Kiri, 2016), hlm. 85.

⁵ *Ibid.*, hlm. 91.

Penelitian ini menggunakan teori komunikasi massa yang dikemukakan oleh Denis McQuail sebagai landasan teoretis utama. McQuail merupakan salah satu tokoh sentral dalam kajian komunikasi massa yang memberikan kontribusi besar terhadap pemahaman mengenai fungsi, peran, dan pengaruh media massa dalam kehidupan sosial dan politik. Teori McQuail memandang media sebagai institusi sosial yang memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi, mengarahkan opini publik, serta mereproduksi nilai dan ideologi yang berkembang dalam masyarakat. Melalui teori ini, media tidak hanya dipahami sebagai saluran penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor sosial yang berperan dalam proses pembentukan kesadaran kolektif dan tatanan sosial-politik.⁶

Lebih lanjut, McQuail mengembangkan tiga pendekatan penting yang relevan dalam penelitian ini, yaitu teori normatif, teori efek media, dan teori ketergantungan media. Teori normatif menekankan bahwa media massa tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai, norma, dan ideologi masyarakat tempat media tersebut beroperasi. Media memiliki tanggung jawab sosial untuk menyediakan informasi yang benar, relevan, dan bermanfaat bagi publik. Model pers yang dominan di Indonesia pada masa Orde Baru adalah model otoritarian, yaitu media dikendalikan oleh negara untuk menjaga stabilitas politik dan legitimasi kekuasaan.⁷

Sementara itu, Teori Efek Media berfokus pada pengaruh media terhadap khalayak, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun konatif. Salah satu konsep utama dari teori ini adalah *agenda-setting*, yaitu kemampuan media menentukan isu-isu yang dianggap penting oleh publik. Peran media dalam membentuk konstruksi realitas sosial terlihat melalui proses pemilihan dan penyajian informasi. Teori efek media digunakan dalam penelitian ini untuk menelaah sejauh mana *Suara Merdeka* berperan dalam membentuk persepsi publik terhadap

⁶ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa McQuail*, Edisi keenam (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 43.

⁷ *Ibid.*, hlm. 168.

isu-isu sosial dan politik tertentu.⁸

Oleh karena itu, media tidak sekadar menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk persepsi publik terhadap fakta tersebut. Analisis terhadap *Suara Merdeka* dalam penelitian ini diarahkan untuk mengetahui apakah media ini turut menjalankan fungsi *agenda-setting* yang netral atau justru dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu.

Selanjutnya, Teori Ketergantungan media menjelaskan hubungan timbal balik antara kebutuhan informasi masyarakat dengan kemampuan media dalam menyediakan akses terhadap realitas sosial. Menurut Denis McQuail, tingkat ketergantungan masyarakat terhadap media akan meningkat seiring dengan kompleksitas sistem sosial, perkembangan teknologi komunikasi, serta keterbatasan sumber informasi alternatif. Situasi tersebut menjadikan media sebagai sumber utama dalam membentuk pemahaman publik terhadap peristiwa sosial, politik, dan ekonomi. Ketika akses terhadap informasi dikendalikan secara terpusat, media memiliki potensi besar untuk memengaruhi cara masyarakat menafsirkan realitas sosial.⁹

3.2 Metode Penelitian

Skripsi ini merupakan hasil dari riset sejarah. Sesuai dengan sifat subjeknya, tulisan ini dikerjakan dengan penerapan metode sejarah. Metode sejarah merupakan proses pengujian dan analisis kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau. Metode ini meliputi empat tahapan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi.

Pertama, heuristik adalah proses atau pengumpulan data untuk mencari dokumen dan mengumpulkan data yang berkaitan langsung dengan peristiwa. Langkah ini dilakukan setelah tema tulisan ditetapkan. Sumber yang dikumpulkan meliputi sumber sekunder, sumber sekunder adalah kesaksian dari siapapun yang

⁸ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa McQuail*, Edisi keenam (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 156.

⁹ *Ibid.*, hlm. 84.

bukan merupakan saksi langsung ketika suatu peristiwa terjadi. Sumber sekunder yang digunakan berupa buku, artikel, dan laporan-laporan hasil dari penelitian.

Tahap kedua, kritik sumber yaitu dilakukan dengan meneliti atau membandingkan sumber dokumen dan lisan. Kritik ini dibagi menjadi dua yaitu kritik intern dan ekstern. Kritik intern adalah kritik yang dilakukan dalam sumber sehingga didapatkan data yang benar-benar dapat dipercaya (otentik). Kritik ekstern adalah kritik dari luar sumber untuk membuktikan data yang terkandung dalam sumber¹⁰

Tahap ketiga adalah interpretasi, yang sering disebut analisis sejarah. Tahap ini bertujuan untuk mencari keterkaitan antara fakta-fakta yang telah diperoleh. Penelitian ini berupaya memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu peristiwa. Rekonstruksi peristiwa sejarah harus menghasilkan sejarah yang benar atau mendekati kebenaran. Untuk itu penulis mengkomparasikan berbagai literatur buku dan artikel- artikel yang mempunyai pembahasan yang sama.

Tahap keempat adalah penulisan atau historiografi, merupakan sejarah yang dilakukan. Penulisan sejarah dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai proses dari awal sampai akhir. Alur pemaparan data dalam penulisan sejarah harus diurutkan sesuai dengan kronologi terjadinya. Satu lagi yang perlu diperhatikan dalam penulisan sejarah adalah mengenai model penulisan. Pada tahap historiografi penulis berusaha menarasikan data yang dapat sesuai dengan kaidah penulisan. Pada tahap ini dapat menuangkan tulisan Konten Artikel dalam Koran *Suara Merdeka* di Semarang Tahun 1984-1998.

3.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sebuah rancangan dalam bagian skripsi secara garis besar. Sistematika menjelaskan rangkaian kerangka penulisan yang logis serta sistematis oleh penulis mengenai judul skripsi. Adapun yang dituangkan

¹⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018), hlm. 220.

dalam sistematika penulisan adalah urutan serta rangkaian bab-bab dan subbab-subbab dalam skripsi.¹¹

Bab 1 Pendahuluan adalah bab yang berisi mengurai permasalahan sesuai dengan judul yang diangkat “Konten Artikel dalam Surat Kabar *Suara Merdeka* di Semarang Tahun 1984–1998” menjadi beberapa bab dan subbab. Adapun bab atau subbab yang diurai pada bab pendahuluan yakni, latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab 2 berisi tentang tinjauan pustaka. Pada bab ini berisi mengenai membahas penelitian-penelitian sebelumnya yang masih relevan dengan pembahasan yang diangkat oleh penulis.

Bab 3 berisi tentang pendekatan dan kerangka teoretis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab 4 berisi tentang pembahasan. Pada bab 4 inilah hasil Skripsi dijabarkan secara runtut dan lebih rinci sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan Skripsi. Adapun beberapa subbab yang akan ditulis sebagai berikut: 4.1 Latar belakang munculnya konten artikel dalam surat kabar *suara merdeka*, 4.2 Konten artikel dalam surat kabar *suara merdeka*, 4.3 Dampak konten artikel terhadap kondisi sosial budaya, ekonomi, dan politik pembangunan di Semarang.

Bab 5 adalah kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah. Selain itu, peneliti juga emncantumkan daftar spustaka, lampiran. Daftar pustaka digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat kredibilitas sedangkan lampiran digunakan sebagai pendukung guna memperkuat hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

¹¹ Sunarlan, *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember* (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2018), hlm. 43.

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Latar Belakang Munculnya Konten Artikel dalam Surat Kabar *Suara Merdeka*

Munculnya konten artikel dalam surat kabar *Suara Merdeka* tidak dapat dilepaskan dari kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Semarang pada masa Orde Baru hingga menjelang Reformasi tahun 1998. *Suara Merdeka* salah satu surat kabar lokal terbesar di Jawa Tengah, *Suara Merdeka* memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat sehingga berbagai dinamika yang terjadi di Semarang banyak tercermin dalam isi pemberitaannya. Artikel-artikel yang dimuat tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga menjadi representasi kondisi sosial masyarakat pada masa tersebut.

Pada periode 1984–1998, Semarang mengalami perkembangan dalam bidang pembangunan kota, ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat. Kondisi tersebut memunculkan berbagai persoalan yang kemudian menjadi perhatian media massa. Selain itu, situasi politik Orde Baru yang menerapkan kontrol terhadap pers turut memengaruhi pola pemberitaan media, termasuk *Suara Merdeka*, yang diarahkan untuk mendukung stabilitas nasional dan pembangunan.

Meskipun berada dalam sistem pers yang diawasi pemerintah, *Suara Merdeka* tetap berupaya menjalankan fungsinya sebagai media informasi masyarakat lokal melalui pemberitaan mengenai persoalan ekonomi, sosial budaya, dan pembangunan kota. Oleh karena itu, untuk memahami latar belakang

munculnya konten artikel dalam surat kabar *Suara Merdeka*, perlu dikaji kondisi politik di Semarang dan kaitannya dengan pers, kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat, serta keberadaan *Suara Merdeka* sebagai media lokal di Kota Semarang.

4.1.1 Kondisi Politik di Semarang dan Kaitannya dengan Pers

Kondisi politik Semarang pada periode 1984–1998 merupakan bagian dari dinamika politik nasional yang berkembang pada masa Orde Baru. Kedudukan Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah menjadikan kota ini sebagai pusat administrasi pemerintahan daerah sekaligus wilayah yang penting dalam pelaksanaan berbagai kebijakan politik pemerintah pusat. Kehadiran institusi pemerintahan provinsi, kantor-kantor birokrasi, serta berbagai lembaga militer menyebabkan kehidupan politik di Semarang berlangsung dalam kerangka stabilitas yang menjadi orientasi utama pemerintahan Orde Baru. Situasi tersebut turut memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk aktivitas pers yang berkembang di kota ini.¹

Pemerintah Orde Baru menempatkan pers sebagai salah satu instrumen yang mendukung pembangunan nasional. Pandangan tersebut tercermin dalam berbagai regulasi yang mengatur kehidupan pers, terutama setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01/Per/Menpen/1984 mengenai Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada Departemen Penerangan untuk mengawasi sekaligus menentukan keberlangsungan operasional perusahaan pers melalui mekanisme perizinan. Keberadaan SIUPP membuat setiap media massa harus mempertimbangkan dampak politik dari setiap informasi yang dipublikasikan karena pencabutan izin dapat mengakibatkan berhentinya aktivitas penerbitan secara keseluruhan.²

¹ David T. Hill, *The Press in New Order Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 44

² Peraturan Menteri Penerangan Republik Indonesia Nomor 01/Per/Menpen/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP), Pasal 2–4

Pola pengawasan semacam itu tidak hanya berlangsung di tingkat pusat, tetapi juga diterapkan hingga tingkat daerah. Aktivitas pers di Semarang berada dalam pengawasan berbagai institusi negara yang memiliki kepentingan terhadap stabilitas politik dan keamanan wilayah. Kondisi tersebut membentuk lingkungan kerja jurnalistik yang menuntut kehati-hatian dalam proses peliputan maupun penyusunan berita. Redaksi media massa umumnya mengembangkan mekanisme swasensor untuk menghindari kemungkinan terjadinya konflik dengan pemerintah. Praktik tersebut menjadi salah satu ciri utama kehidupan pers Indonesia pada masa Orde Baru.³

Posisi *Suara Merdeka* dalam situasi politik tersebut memiliki karakter yang cukup unik. Sejak berdiri pada tanggal 11 Februari 1950, *Suara Merdeka* berkembang sebagai surat kabar yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat Jawa Tengah. Kehadiran surat kabar ini melanjutkan tradisi pers yang telah berkembang di Semarang sejak masa kolonial melalui berbagai media seperti *Sinar Djawa*, *Djawi Hisworo*, dan *Semarangsche Handelsblad*. Tradisi jurnalistik tersebut memberikan fondasi yang kuat bagi perkembangan *Suara Merdeka* sebagai media yang memiliki kedekatan dengan persoalan masyarakat daerah.⁴

Kedekatan dengan masyarakat Jawa Tengah menjadi salah satu faktor yang menentukan arah pemberitaan *Suara Merdeka*. Jaringan distribusi yang menjangkau hampir seluruh kabupaten dan kota di Jawa Tengah memungkinkan surat kabar ini memperoleh posisi yang kuat sebagai sumber informasi utama masyarakat daerah. Jaringan wartawan dan koresponden yang tersebar di berbagai wilayah juga memungkinkan redaksi memperoleh informasi yang lebih dekat dengan realitas sosial masyarakat dibandingkan media nasional yang berpusat di Jakarta. Keunggulan tersebut menjadikan *Suara Merdeka* tidak hanya berfungsi

³ David T. Hill, *The Press in New Order Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 61

⁴ Kurniawan Junaedhie, *Ensiklopedi Pers Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 311–313.

sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai ruang artikulasi berbagai persoalan yang berkembang di tingkat lokal.⁵

Kondisi politik Orde Baru secara langsung memengaruhi strategi redaksional yang diterapkan oleh *Suara Merdeka*. Upaya mempertahankan keberlangsungan penerbitan membuat redaksi harus menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah tanpa kehilangan kedekatannya dengan pembaca. Strategi tersebut tampak melalui kecenderungan pemberitaan yang lebih banyak menyoroti isu pembangunan daerah, kegiatan ekonomi masyarakat, pendidikan, pelayanan publik, kebudayaan lokal, dan berbagai persoalan sosial yang berkembang di Jawa Tengah. Pilihan tema semacam itu memungkinkan *Suara Merdeka* tetap menjalankan fungsi informatifnya sekaligus menghindari konfrontasi langsung dengan pemerintah.⁶

Karakter pemberitaan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara pers dan kekuasaan tidak selalu berlangsung dalam bentuk pertentangan terbuka. Redaksi *Suara Merdeka* cenderung melakukan negosiasi terhadap berbagai batasan politik yang berlaku pada masa itu. Berbagai isu yang dianggap sensitif secara politik umumnya disampaikan dalam bentuk pemberitaan yang lebih deskriptif dan berhati-hati. Sebaliknya, isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan daerah memperoleh ruang yang lebih besar karena dianggap sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang dikampanyekan pemerintah. Situasi tersebut menjelaskan mengapa artikel-artikel mengenai pembangunan infrastruktur, transportasi, pendidikan, harga kebutuhan pokok, serta kehidupan sosial masyarakat mendominasi halaman-halaman *Suara Merdeka* selama periode penelitian.⁷

Perkembangan *Suara Merdeka* sebagai surat kabar dengan oplah terbesar di Jawa Tengah semakin memperkuat pengaruhnya dalam pembentukan opini

⁵ Kurniawan Junaedhie, *Ensiklopedi Pers Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 313.

⁶ *Ibid.*, hlm. 311

⁷ David T. Hill, *The Press in New Order Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 74.

publik daerah. Informasi yang dimuat dalam surat kabar ini tidak hanya dikonsumsi oleh masyarakat umum, tetapi juga menjadi rujukan bagi kalangan birokrasi, akademisi, pelaku ekonomi, dan berbagai kelompok sosial lainnya. Pengaruh yang luas tersebut membuat setiap kebijakan redaksional memiliki dampak yang signifikan terhadap cara masyarakat memahami berbagai persoalan yang terjadi di sekitarnya. Kedudukan tersebut sekaligus menempatkan *Suara Merdeka* pada posisi yang harus mampu menjaga keseimbangan antara tuntutan pasar pembaca dan tekanan politik yang berasal dari negara.⁸

Pergeseran situasi politik nasional menjelang berakhirnya Orde Baru turut memengaruhi arah pemberitaan *Suara Merdeka*. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 menyebabkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi semakin menonjol dalam kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut mendorong munculnya pemberitaan yang lebih intens mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok, kesulitan ekonomi masyarakat, persoalan ketenagakerjaan, dan berbagai dampak sosial lainnya. Intensitas pemberitaan mengenai isu-isu tersebut menunjukkan bahwa perubahan kondisi politik dan ekonomi nasional memiliki pengaruh langsung terhadap karakter konten artikel yang diterbitkan oleh *Suara Merdeka*.⁹

Hubungan antara kondisi politik Semarang dan kemunculan konten artikel dalam *Suara Merdeka* terlihat melalui kecenderungan tema-tema yang mendominasi pemberitaan sepanjang tahun 1984–1998. Pengawasan politik yang ketat mendorong redaksi untuk menghindari kritik politik secara langsung, sedangkan kedekatan dengan masyarakat daerah mendorong surat kabar ini untuk lebih banyak mengangkat persoalan ekonomi, sosial budaya, dan pembangunan. Interaksi kedua faktor tersebut membentuk karakter khas pemberitaan *Suara Merdeka* yang berbeda dari media nasional. Isi artikel yang muncul selama periode penelitian pada akhirnya tidak hanya mencerminkan kondisi masyarakat Jawa

⁸ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 90

⁹ Richard Robison dan Vedi R. Hadiz, *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets* (London: Routledge, 2004), hlm. 52.

Tengah, tetapi juga memperlihatkan bagaimana sebuah media daerah beradaptasi dengan struktur politik Orde Baru tanpa kehilangan fungsi utamanya sebagai penyampai informasi kepada masyarakat.¹⁰

4.1.2 Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya di Semarang

Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya Semarang pada periode 1984–1998 menjadi faktor penting yang memengaruhi arah pemberitaan *Suara Merdeka*. Kedudukan Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah sekaligus pusat perdagangan, jasa, pendidikan, dan pemerintahan menyebabkan berbagai perubahan sosial yang terjadi di kota ini memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat. Perubahan tersebut kemudian menjadi sumber utama berbagai informasi yang diolah dan dipublikasikan oleh *Suara Merdeka* dalam bentuk artikel ekonomi, sosial budaya, maupun pembangunan daerah.¹¹

Perkembangan ekonomi Semarang selama dekade 1980-an ditandai oleh pertumbuhan sektor perdagangan dan industri yang cukup pesat. Aktivitas ekonomi yang terpusat di kawasan pelabuhan, pasar tradisional, pusat perdagangan, dan kawasan industri menjadikan kota ini sebagai salah satu pusat ekonomi utama di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mendorong munculnya berbagai persoalan yang berkaitan dengan harga kebutuhan pokok, distribusi barang, aktivitas pasar, dan kondisi ekonomi masyarakat. Persoalan-persoalan tersebut memiliki nilai berita yang tinggi karena berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Keadaan inilah yang menjelaskan mengapa artikel mengenai harga kebutuhan pokok, aktivitas perdagangan, dan kondisi pasar menjadi salah satu tema yang cukup dominan dalam pemberitaan *Suara Merdeka* selama periode penelitian.¹²

¹⁰ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa McQuail*, Edisi Keenam (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 126.

¹¹ M. Daldjoeni, *Geografi Kota dan Desa* (Bandung: Alumni, 1997), hlm. 142.

¹² Kwartanada Dwi Nugroho, “Perkembangan Ekonomi Kota Semarang pada Masa Orde Baru,” *Paramita: Historical Studies Journal*, Vol. 21, No. 2, 2011, hlm. 176–181.

Dinamika ekonomi masyarakat semakin terlihat ketika Indonesia memasuki masa krisis ekonomi pada tahun 1997–1998. Kenaikan harga kebutuhan pokok, menurunnya daya beli masyarakat, dan ketidakstabilan kondisi pasar menjadi persoalan yang banyak dirasakan oleh masyarakat Semarang. Situasi tersebut memperoleh perhatian yang cukup besar dari *Suara Merdeka* karena dampaknya dirasakan secara langsung oleh pembaca. Artikel-artikel yang membahas kenaikan harga beras, minyak goreng, gula, dan berbagai kebutuhan pokok lainnya menunjukkan bahwa surat kabar ini berupaya menghadirkan informasi yang dekat dengan pengalaman masyarakat sehari-hari.¹³

Perubahan sosial yang terjadi di Semarang juga memengaruhi karakter pemberitaan *Suara Merdeka*. Pertumbuhan jumlah penduduk akibat urbanisasi menyebabkan munculnya berbagai persoalan perkotaan seperti kebutuhan pendidikan, pelayanan publik, transportasi, dan penyediaan fasilitas umum. Berbagai persoalan tersebut tidak hanya menjadi perhatian pemerintah daerah, tetapi juga menjadi bagian dari kebutuhan informasi masyarakat. Kondisi ini mendorong *Suara Merdeka* untuk memberikan ruang yang cukup besar bagi pemberitaan mengenai pembangunan fasilitas publik, pelayanan pendidikan, dan berbagai program pemerintah daerah yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Bidang pendidikan menjadi salah satu isu sosial yang memperoleh perhatian dalam pemberitaan *Suara Merdeka*. Pelaksanaan program Wajib Belajar Sembilan Tahun pada dekade 1990-an merupakan salah satu kebijakan yang banyak diberitakan karena berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat. Berbagai kendala pelaksanaan pendidikan, termasuk persoalan sosial yang memengaruhi keberlangsungan sekolah anak-anak di daerah, menjadi tema yang muncul dalam sejumlah artikel. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *Suara Merdeka* tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai media yang

¹³ Mubyarto, *Reformasi Sistem Ekonomi: Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Kerakyatan* (Yogyakarta: Aditya Media, 1998), hlm. 34–37.

¹⁴ Kunto Wijoyo, “Urbanisasi dan Perubahan Sosial di Kota-Kota Jawa,” *Humaniora*, Vol. 12, No. 1, 2000, hlm. 55–61.

menghubungkan kebijakan pemerintah dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat.¹⁵

Keberagaman budaya masyarakat Semarang turut membentuk karakter pemberitaan surat kabar ini. Posisi Semarang sebagai kota pelabuhan menyebabkan terjadinya pertemuan berbagai kelompok etnis dan budaya yang menghasilkan kehidupan sosial yang relatif beragam. Kehidupan budaya masyarakat Jawa, tradisi masyarakat Tionghoa, serta berbagai bentuk kesenian lokal menjadi bagian dari identitas sosial kota yang terus berkembang selama periode penelitian. Keadaan tersebut mendorong *Suara Merdeka* untuk memberikan perhatian terhadap berbagai kegiatan kebudayaan yang dianggap memiliki nilai penting bagi masyarakat Jawa Tengah.¹⁶

Artikel mengenai Gambang Semarang, Kelenteng Sam Poo Kong, serta berbagai bentuk kesenian dan tradisi lokal menunjukkan adanya upaya redaksi untuk menghadirkan informasi yang berkaitan dengan identitas budaya masyarakat Semarang. Pemberitaan semacam ini tidak hanya berfungsi sebagai informasi, tetapi juga menjadi sarana pelestarian budaya lokal di tengah perubahan sosial yang berlangsung cukup cepat pada masa Orde Baru. Kehadiran artikel-artikel budaya tersebut memperlihatkan bahwa *Suara Merdeka* berupaya mempertahankan kedekatannya dengan masyarakat melalui pengangkatan tema-tema yang memiliki relevansi langsung dengan kehidupan sosial dan budaya pembacanya.¹⁷

Posisi *Suara Merdeka* sebagai surat kabar dengan jangkauan distribusi terbesar di Jawa Tengah turut memengaruhi pemilihan tema pemberitaan. Jaringan wartawan dan koresponden yang tersebar di berbagai daerah memungkinkan redaksi memperoleh informasi mengenai berbagai persoalan yang berkembang di tingkat lokal. Keunggulan tersebut membuat *Suara Merdeka* lebih banyak mengangkat isu-isu yang dekat dengan kehidupan masyarakat dibandingkan media

¹⁵ Suyata, "Implementasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Indonesia," *Jurnal Kependidikan*, Vol. 30, No. 1, 2000, hlm. 15–23.

¹⁶ Wasino, "Multikulturalisme dan Identitas Kota Semarang," *Paramita: Historical Studies Journal*, Vol. 20, No. 1, 2010, hlm. 46–53.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 52–53.

nasional yang cenderung berorientasi pada isu politik tingkat pusat. Pilihan redaksional tersebut menjadi salah satu faktor yang menjelaskan dominasi artikel ekonomi, sosial budaya, dan pembangunan daerah dalam halaman-halaman *Suara Merdeka* selama periode 1984–1998.¹⁸

Hubungan antara kondisi sosial ekonomi masyarakat Semarang dan konten artikel *Suara Merdeka* menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara realitas sosial dengan produksi pemberitaan. Perubahan ekonomi mendorong munculnya artikel mengenai harga kebutuhan pokok dan aktivitas perdagangan. Perkembangan sosial menghasilkan pemberitaan mengenai pendidikan dan pelayanan publik. Kehidupan budaya masyarakat melahirkan berbagai artikel yang berkaitan dengan identitas lokal dan pelestarian tradisi. Karakter konten artikel yang muncul dalam *Suara Merdeka* pada akhirnya merefleksikan berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat Semarang dan Jawa Tengah selama periode penelitian.¹⁹

4.1.3 Kondisi Konten Artikel dan Proses Penerbitan Surat Kabar *Suara Merdeka* Sebelum Pemberlakuan SIUPP

Kondisi konten artikel dalam surat kabar *Suara Merdeka* sebelum diberlakukannya Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan periode setelah kebijakan tersebut diterapkan secara ketat pada masa Orde Baru. Sebelum SIUPP menjadi instrumen utama pengawasan pers, media massa daerah masih memiliki ruang yang relatif lebih luas untuk mengangkat berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Dalam konteks Jawa Tengah, *Suara Merdeka* berkembang sebagai salah satu surat kabar yang berusaha menghadirkan informasi mengenai kehidupan sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan politik yang dekat dengan realitas masyarakat daerah. Keberadaan surat kabar ini tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran informasi, tetapi

¹⁸ Muhammadun, “Fase Konvergensi di *Suara Merdeka*,” Skripsi, Universitas Diponegoro, 2019, hlm. 37–40.

¹⁹ Kurniawan Junaedhie, *Ensiklopedi Pers Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 311–313.

juga menjadi sarana pembentukan opini publik dan ruang komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah.²⁰

Sejak didirikan pada tanggal 11 Februari 1950 oleh H. Hetami bersama sejumlah tokoh pers dan pejuang kemerdekaan di Semarang, *Suara Merdeka* membawa semangat nasionalisme yang kuat. Nama “Suara Merdeka” dipilih sebagai simbol kemerdekaan bangsa Indonesia sekaligus harapan agar pers dapat menjadi sarana penyampaian aspirasi rakyat secara bebas dan bertanggung jawab. Dalam perkembangannya, surat kabar ini menempatkan dirinya sebagai media yang dekat dengan masyarakat Jawa Tengah. Berbagai artikel yang diterbitkan tidak hanya membahas perkembangan politik nasional, tetapi juga memuat persoalan kehidupan sehari-hari masyarakat seperti kondisi pasar, harga kebutuhan pokok, perkembangan pendidikan, aktivitas kebudayaan, pembangunan daerah, serta dinamika sosial yang terjadi di berbagai wilayah Jawa Tengah.²¹

Keberagaman tema yang dimuat menunjukkan bahwa orientasi pemberitaan *Suara Merdeka* tidak semata-mata berpusat pada isu politik, melainkan juga memberikan perhatian yang besar terhadap persoalan sosial kemasyarakatan. Karakteristik tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan surat kabar ini memperoleh tempat yang kuat di tengah masyarakat Jawa Tengah. Melalui artikel-artikel yang dipublikasikan, *Suara Merdeka* berupaya menghadirkan informasi yang relevan dengan kebutuhan pembacanya sekaligus menjadi sarana dokumentasi berbagai perubahan sosial yang terjadi di daerah. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, dan kontrol sosial telah dijalankan oleh *Suara Merdeka* sejak masa awal perkembangannya.²²

²⁰ David T. Hill, *The Press in New Order Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 45.

²¹ Kurniawan Junaedhie, *Ensiklopedi Pers Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm. 311.

²² Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa McQuail*, Edisi Keenam (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 126.

Proses lahirnya sebuah artikel dalam *Suara Merdeka* pada periode sebelum pemberlakuan SIUPP melibatkan serangkaian tahapan redaksional yang cukup panjang. Tahapan pertama dimulai dari kegiatan peliputan yang dilakukan oleh wartawan di lapangan. Wartawan bertugas mencari dan mengumpulkan informasi melalui observasi langsung, wawancara dengan narasumber, maupun penelusuran dokumen yang relevan. Informasi yang diperoleh kemudian diolah menjadi naskah berita atau artikel dan diserahkan kepada redaktur yang bertanggung jawab terhadap rubrik tertentu. Tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap akurasi fakta, penggunaan bahasa, kelengkapan informasi, dan kesesuaian tema dengan kebijakan redaksi.²³

Naskah yang telah melalui proses penyuntingan kemudian dibahas dalam rapat redaksi untuk menentukan kelayakan publikasi. Forum tersebut menjadi ruang bagi para redaktur untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas naskah sekaligus menentukan prioritas berita yang akan dimuat. Artikel yang dianggap memiliki nilai berita tinggi biasanya ditempatkan pada halaman depan, sedangkan artikel yang berkaitan dengan ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan, maupun pembangunan daerah ditempatkan pada rubrik-rubrik khusus sesuai dengan kategorinya. Setelah memperoleh persetujuan redaksi, naskah memasuki tahap penyusunan tata letak halaman (layouting) sebelum akhirnya dikirim ke bagian percetakan untuk diproduksi dan didistribusikan kepada pembaca melalui jaringan agen surat kabar yang tersebar di berbagai daerah Jawa Tengah.²⁴

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa setiap artikel yang diterbitkan oleh *Suara Merdeka* merupakan hasil kerja kolektif berbagai unsur redaksi. Wartawan lapangan, redaktur, editor, fotografer, bagian dokumentasi, hingga tenaga percetakan memiliki peran yang saling berkaitan dalam menghasilkan sebuah produk jurnalistik. Keterlibatan banyak pihak dalam proses penerbitan menunjukkan bahwa kualitas informasi yang diterima masyarakat sangat

²³ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik: Teori dan Praktik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 120–123.

²⁴ Ashadi Siregar, *Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 56.

dipengaruhi oleh profesionalisme seluruh unsur yang berada dalam organisasi pers tersebut.²⁵

Berdasarkan keterangan yang diperoleh melalui komunikasi dengan Setiawan Hendra Kelana selaku Pemimpin Redaksi *Suara Merdeka*, struktur redaksi pada awal dekade 1980-an telah menunjukkan pembagian tugas yang cukup jelas dalam mendukung proses produksi berita. Pada sekitar tahun 1983, terdapat sejumlah tokoh redaksi yang memiliki peranan penting dalam menentukan arah pemberitaan surat kabar tersebut. Soewarno, S.H. dikenal sebagai editor sekaligus redaktur senior yang sangat diandalkan dalam penyuntingan artikel opini dan penyusunan kebijakan redaksi. Peran yang dijalankannya tidak hanya berkaitan dengan perbaikan naskah, tetapi juga menyangkut pengawasan terhadap konsistensi sikap editorial yang menjadi identitas *Suara Merdeka*. Keberadaan Soewarno menjadi penting karena pada masa tersebut media massa harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan informasi masyarakat dan berbagai dinamika politik yang berkembang pada tingkat nasional.²⁶

Selain Soewarno, terdapat pula Mochtar Hidayat yang dikenal sebagai wartawan senior dengan pengalaman jurnalistik yang luas. Dalam perkembangan *Suara Merdeka*, Mochtar Hidayat memiliki kontribusi besar dalam memperkuat jaringan peliputan serta meningkatkan kualitas pemberitaan daerah. Aktivitas jurnalistik yang dilakukannya membantu *Suara Merdeka* memperoleh berbagai informasi dari berbagai wilayah Jawa Tengah sehingga surat kabar tersebut mampu menghadirkan pemberitaan yang lebih beragam dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Kehadiran wartawan senior seperti Mochtar Hidayat menunjukkan bahwa kekuatan utama *Suara Merdeka* tidak hanya terletak pada kebijakan redaksinya, tetapi juga pada kemampuan para wartawannya dalam membangun jaringan informasi yang luas.²⁷

²⁵ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 90.

²⁶ Wawancara dengan Setiawan Hendra Kelana, Semarang, 13 Juni 2026.

²⁷ Wawancara dengan Setiawan Hendra Kelana, Semarang, 13 Juni 2026.

Dapur redaksi *Suara Merdeka* pada periode tersebut juga didukung oleh sejumlah jurnalis generasi awal yang telah terlibat sejak masa perkembangan awal perusahaan pers ini. Nama-nama seperti H.R. Wahjoedi, Soelaiman, dan Retno Koestiyah merupakan bagian dari kelompok penggerak awal yang berkontribusi dalam berbagai kegiatan jurnalistik dan operasional redaksi. Mereka terlibat dalam proses pengumpulan berita, penulisan naskah, penyuntingan materi pemberitaan, hingga kegiatan koordinasi redaksional yang mendukung kelancaran penerbitan surat kabar setiap hari. Kehadiran tokoh-tokoh tersebut menunjukkan bahwa perkembangan *Suara Merdeka* tidak hanya ditentukan oleh figur pemimpin perusahaan, tetapi juga oleh kerja kolektif para jurnalis yang secara konsisten menjaga keberlangsungan penerbitan media tersebut.²⁸

Peran para anggota redaksi tersebut semakin penting karena pada dekade 1980-an *Suara Merdeka* sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat sebagai surat kabar regional terbesar di Jawa Tengah. Peningkatan jumlah pembaca dan perluasan wilayah distribusi menuntut redaksi untuk menghasilkan pemberitaan yang lebih beragam dan berkualitas. Dalam situasi tersebut, editor, redaktur, dan wartawan tidak hanya berfungsi sebagai penyusun berita, tetapi juga sebagai penjaga kredibilitas media. Melalui proses seleksi dan penyuntingan yang ketat, mereka memastikan bahwa setiap artikel yang diterbitkan tetap sesuai dengan standar jurnalistik yang berlaku sekaligus mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.²⁹

Keberadaan struktur redaksi yang didukung oleh editor senior, wartawan berpengalaman, serta jurnalis generasi awal tersebut menjadi salah satu faktor yang menjelaskan kemampuan *Suara Merdeka* untuk bertahan dan berkembang di tengah perubahan politik nasional. Sebelum pemberlakuan SIUPP secara ketat, proses redaksional yang dijalankan memungkinkan surat kabar ini memberikan ruang yang

²⁸ Wawancara dengan Setiawan Hendra Kelana, Semarang, 13 Juni 2026.

²⁹ Alex Sobur, *Etika Pers: Profesionalisme dengan Nurani* (Bandung: Humaniora, 2001), hlm. 8.

cukup luas bagi pemberitaan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan daerah. Kondisi tersebut turut membentuk karakter *Suara Merdeka* sebagai media yang dekat dengan masyarakat Jawa Tengah dan menjadi salah satu sumber informasi utama bagi publik pada masa Orde Baru.³⁰

Memasuki pertengahan dekade 1980-an, ketika pemerintah mulai memperkuat sistem pengawasan terhadap pers melalui mekanisme perizinan dan pengendalian media, struktur redaksi *Suara Merdeka* berperan penting dalam melakukan penyesuaian terhadap kebijakan negara tanpa kehilangan identitasnya sebagai surat kabar daerah. Para editor dan redaktur berupaya menjaga agar pemberitaan tetap informatif dan relevan bagi masyarakat, meskipun harus mempertimbangkan batasan-batasan yang ditetapkan pemerintah. Oleh karena itu, keberadaan tokoh-tokoh redaksi seperti Soewarno, Mochtar Hidayat, H.R. Wahjoedi, Soelaiman, dan Retno Koestiyah tidak hanya penting dalam aspek teknis penerbitan, tetapi juga dalam menjaga kesinambungan visi jurnalistik *Suara Merdeka* sebagai media yang berakar pada kebutuhan informasi masyarakat Jawa Tengah.³¹

Analisis terhadap artikel-artikel yang dimuat dalam *Suara Merdeka* menunjukkan bahwa orientasi pemberitaan surat kabar ini sangat dipengaruhi oleh kebutuhan informasi masyarakat Jawa Tengah. Tema ekonomi menjadi salah satu isu yang cukup dominan dalam berbagai edisi surat kabar. Artikel berjudul “IGGI Setuju Sediakan 2,1 Milyar Dollar Lagi Untuk Bantu Indonesia” yang dimuat pada 9 April 1977 memperlihatkan bagaimana pembangunan ekonomi nasional menjadi perhatian penting media pada masa tersebut. Isi artikel menekankan persetujuan kelompok negara donor yang tergabung dalam Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) untuk memberikan bantuan pinjaman guna mendukung program pembangunan pemerintah Indonesia. Pemberitaan semacam ini menunjukkan bahwa *Suara Merdeka* tidak hanya menyampaikan informasi ekonomi semata,

³⁰ David T. Hill, *The Press in New Order Indonesia*, hlm. 62

³¹ Kacung Marijan, *Sejarah Pers Indonesia: Perspektif Politik dan Jurnalistik* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 214–218.

melainkan juga membangun optimisme publik terhadap keberhasilan program pembangunan yang sedang dijalankan pemerintah Orde Baru.³²



Gambar 4.1 “IGGI Setuju Sediakan 2,1 Milyar Dollar Lagi Untuk Bantu Indonesia” Tahun 1977

Sumber: Surat Kabar *Suara Merdeka*, No. 09, 09 April 1977.

Penekanan terhadap isu pembangunan ekonomi dalam artikel tersebut menunjukkan adanya kecenderungan media untuk merepresentasikan pembangunan sebagai kebutuhan nasional yang harus didukung seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan ekonomi ditempatkan sebagai instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pola pemberitaan semacam ini sejalan dengan karakter pers pembangunan yang berkembang pada masa Orde Baru, yaitu

³² *Suara Merdeka*, “IGGI Setuju Sediakan 2,1 Milyar Dollar Lagi Untuk Bantu Indonesia,” No. 4, 9 April 1977.

menjadikan media sebagai sarana penyebaran informasi mengenai program-program pemerintah dan hasil-hasil pembangunan.³³

Tema sosial budaya juga memperoleh perhatian dalam pemberitaan *Suara Merdeka*. Artikel berjudul “Hari Kemenangan Buruh” yang dimuat pada 4 Mei 1965 memperlihatkan bagaimana surat kabar ini memberikan ruang bagi isu-isu sosial yang berkaitan dengan kehidupan kelompok pekerja. Isi artikel menggambarkan peringatan Hari Buruh sebagai momentum penting bagi kaum pekerja untuk memperjuangkan kesejahteraan dan hak-hak sosial mereka. Muatan artikel tersebut menunjukkan bahwa sebelum penerapan pengawasan pers yang semakin ketat pada era Orde Baru, *Suara Merdeka* masih memberikan ruang yang relatif luas terhadap isu-isu kemasyarakatan yang berkembang di tingkat akar rumam

³³ David T. Hill, *The Press in New Order Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 62–66.

Hari Kemenangan Buruh

— Asal mula Hari Kemenangan Buruh yang kita rajakan sekarang ini ialah, bahwa dengan perjuangannya yang gigih dan solid, derites yang kokoh kuat kaum Buruh dikala itu sudah berhasil menurunkan jumlah jam kerja. Penurunan jumlah yang sebenarnya tidak seberapa, tetapi yang bagi perjuangan Buruh melambangkan kemenangan yang gilang gemilang. Dengan kemenangan itu kaum Buruh sadar akan kekuatan, massa aksi yang terorganisir. Kaum Buruh sadar akan pentingnya kedudukan mereka dalam proses produksi. Kaum Buruh sadar akan kemampuannya untuk berjuang melawan penghisapan. Karena itu, dengan permulaan kemenangan yang nampak ketijl itu kaum Buruh sebagai kaum yang semula terhina dan tertindas kemudian bangkit, berusaha mematahkan rantai penghisapan, menghimpun solidaritas nasional dan internasional.

— Dan sedjarah perjuangannya bangsa2 tertindas kemudian menunjukkan, kalau kaum Buruh selalu menjadi pelopor dari perjuangan kemerdekaan demikian. Revolusi sosialis Soviet Uni dipelopori oleh kaum Buruh yang pandai menjiwai sekutu, yaitu dalam diri kaum tani dan tentera. Dalam revolusi di RRT juga kaum Buruh memegang peranan yang penting. Dan demikian juga di banyak sekali negara, kalau ada gerakan2 serta aksi2 revolusioner untuk menghancurkan system penindasan, selalu-lah kaum Buruh yang telah terorganisir baik, berdiri paling depan.

— Demikian pula kaum Buruh Indonesia. Tradisi revolusionernya sudah dimulai ketika zaman penjajahan sudah tjoba2 mengadakan aksi pemogokan. Sekarang ini kaum Buruh Indonesia sudah diakui kedudukannya sebagai alat revolusi dan sokoguru masyarakat yang kita tjitajkan. Pengakuan demikian ini hakikatnya merupakan pemikiran yang konsepsional yang memberikan kedudukan sosial, ekonomis dan politik yang tinggi didalam masyarakat kita sekarang maupun yang akan datang. Dan ini memang sudah selajaknya sekali, mengingat kedudukan kaum buruh yang sangat vital dalam proses produksi. Tanpa mereka produksi matjet dan ini berarti juga matjetnya revolusi dan matjetnya roda masyarakat.

— Hanya saja, kedudukan yang demikian vital ini, bukan hanya memberi hak saja, tetapi juga memberi tanggung jawab yang tidak ringan. Revolusi memang boleh dikata hanya mengenal pembagian tugas, belum pembagian redjeki. Revolusi lebih banyak meminta pengorbanan dari pada memberi keuntungan. Sebab revolusi seperti hendak mengadakan kita semua melompat, meninggalkan pertumbuhan yang konvensional, meninggalkan tahap2 perkembangan yang wajar. Seperti dikatakan oleh Pemimpin Besar Revolusi kita, adalah „mendjebol dan membangun, mendjebol dan membangun“. Djadi terang, kaum Buruh sebagai faktor penting dalam produksi, maka tugas mendjebol dan membangun itu ada pada pundak kaum Buruh.

— Kita sekarang ini merayakan Hari Kemenangan Buruh dalam suasana solidaritas AA dan Berdikari. Tentulah kalau sedikitnya dua hal ini akan mempengaruhi tema dari peringatan 1 Mei kali ini. Mengenai solidaritas AA dikalangan Buruh, kita sebenarnya telah merintis jalan kearah penyelenggaraan konperensi Buruh AA. Tetapi, keadaan memang dikala itu belum matang untuk merealisasi usaha besar itu. Kini keadaan sudah berubah yang menguntungkan. Karena itu kiranya usaha ini perlu mendapat penerongan sekali lagi untuk dapat diudjutkan, demi penggalangan solidaritas AA yang lebih kokoh lagi. Kalau sembojan "Buruh seluruh dunia, bersatulah" sekarang ini belum dapat diudjutkan, maka sedikitnya sekarang ini kita harus dapat memelopori terudjudnya „Persatuan Buruh seluruh AA“, malah konkretisasinya kiranya akan lebih dekat kalau sembojan itu kita jadikan saja "Buruh seluruh Nefos, bersatulah". Berdiri diatas kaki sendiri sebagai sembojan ekonomi meminta juga kepada kaum Buruh sebagai "la classe productif" untuk memberikan sumbangan tenaga dan pikiran sebanyak-banyaknya. Memang berat nian beban tanggungan dari "sokoguru" ini.

— Hari Kemenangan Buruh sekarang ini kita rajakan, untuk mendorong kita semua menjapai kemenangan2 lebih lanjut. Sebab, perjuangan belum selesai. Selama didunia masih ada penghisapan manusia atas manusia, perjuangan Buruh tidak boleh kendor. Buruh melawan segala matjam penghisapan, yang asing maupun yang bukan asing. Dan perjuangan ini pasti menang.

Gambar 4.2 "Hari Kemenangan Buruh" Tahun 1965

Sumber: Surat Kabar *Suara Merdeka*, No. 02, 04 Mei 1965.

Representasi kehidupan sosial masyarakat dalam artikel tersebut memperlihatkan bahwa *Suara Merdeka* tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi politik dan pemerintahan, tetapi juga sebagai media yang merekam dinamika sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kehadiran artikel-artikel yang mengangkat persoalan buruh, pendidikan, kebudayaan, serta aktivitas organisasi sosial menunjukkan adanya kedekatan antara kebijakan redaksional dengan kebutuhan informasi pembaca di daerah.³⁴

Subtema politik pembangunan tercermin dalam artikel “Terjadi 172 Kasus Pelanggaran Pemilu di Jateng dan DIY” yang dimuat pada 21 April 1977. Artikel tersebut membahas pelaksanaan Pemilihan Umum serta berbagai pelanggaran yang ditemukan selama proses penyelenggaraannya. Muatan berita menunjukkan bahwa *Suara Merdeka* tetap menjalankan fungsi informatif dengan melaporkan berbagai dinamika politik yang terjadi di masyarakat. Pemberitaan tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana media berusaha menempatkan dirinya sebagai penyedia informasi politik bagi masyarakat tanpa secara langsung menempatkan diri sebagai oposisi terhadap pemerintah.³⁵

Terjadi 172 Kasus Pelanggaran Pemilu Di Jateng/DIY

Diselesaikan Secara Musyawarah & Sebagian Ke Pengadilan — Keterangan Ka Penerangan Laksusda Jateng/DIY Letkol. Drs. M. Rukwan Rifai

KEPALA PENERANGAN Laksusda Jateng/DIY Letkol Drs M Rukwan Rifai, atas pertanyaan “Antara” hari Rabu kemarin di ruang kerjanya menyatakan, sampai tanggal 18 April yl, telah terjadi 172 kasus pelanggaran Pemilu yang diselesaikan secara musyawarah dan sebagian ke pengadilan. Ia tidak bersedia menyebutkan secara terperinci jumlah pelanggaran yang dilakukan masing2 kontestan dan hanya menyatakan “sesuai dengan pernyataan bersama antara tiga kontestan dan Muspida Jateng 16 April lalu, maka masing2 akan tidak menoleh kebelakang tetapi mengarahkan pandangan kedepan secara bersama2 dan sepakat tidak mengulangi kesalahan2 yang telah lampau” kata Letkol Drs M Rukwan Rifai.

³⁴ Alex Sobur, *Etika Pers: Profesionalisme dengan Nurani* (Bandung: Humaniora, 2001), hlm. 89–91.

³⁵ *Suara Merdeka*, “Terjadi 172 Kasus Pelanggaran Pemilu di Jateng dan DIY,” No. 1, 21 April 1977.

Menangani bentuk2 pelanggaran tsb sebagian besar mengenai perlakuan terhadap tanda gambar kontestan lain yang kurang wajar.

Ditanya selanjutnya dikatakan, di beberapa daerah Jawa Tengah terdapat penonjolan2 kasus pelanggaran itu antara lain di Surakarta, Yogyakarta, Salatiga dan sekitarnya, Magelang, Semarang dan Jepara.

Diharapkan dengan adanya pernyataan bersama ketiga kontestan dan Muspida Jateng itu, dapat pula membawa suasana yang jernih sampai kebawah dan membuat semua pihak yang berada di bawah menjadi optimistis bahwa Pemilu akan dapat berlangsung sebaik yang kita harapkan bersama.

Mengakhiri keterangannya, atas pertanyaan "Antara" Letkol. M. Rukwan Rifai mengharapkan kepada masing2 kontestan, agar suasana kampanye yang sudah membaik ini dipertahankan hingga selesainya masa kampanye.

Diharapkan pula agar dalam minggu tenang, semua pihak bisa menempatkan diri sesuai dengan iklim keterangan itu. "Demikian antara lain keterangan Penerangan Laksusda Jateng Letkol Drs M. Rukwan Rifai kepada "Antara". (Antara)

Gambar 4.3 "Terjadi 172 Kasus Pelanggaran Pemilu di Jateng dan DIY"

Tahun 1977

Sumber: Surat Kabar *Suara Merdeka*, No. 01, 21 April 1977.

Pola pemberitaan mengenai pemilu menunjukkan bahwa isu politik yang dimuat dalam *Suara Merdeka* cenderung diarahkan pada aspek pelaksanaan pembangunan politik dan stabilitas nasional. Fokus pemberitaan lebih banyak menyoroti proses, partisipasi masyarakat, dan keberlangsungan agenda kenegaraan dibandingkan kritik terhadap sistem politik yang sedang berjalan. Karakteristik tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan redaksional untuk menyesuaikan diri dengan iklim politik yang berkembang pada masa itu sekaligus mempertahankan fungsi informatif surat kabar sebagai media publik.³⁶

³⁶ David T. Hill, *The Press in New Order Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 74

4.2 Konten Artikel dalam Surat Kabar *Suara Merdeka*

Konten artikel dalam surat kabar *Suara Merdeka* pada tahun 1984–1998 mencerminkan berbagai dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan Politik pembangunan yang terjadi di Kota Semarang pada masa Orde Baru. Sebagai media lokal, *Suara Merdeka* tidak hanya menyampaikan informasi kepada masyarakat, tetapi juga merepresentasikan kondisi kehidupan masyarakat melalui berbagai pemberitaan yang dimuat dalam rubrik ekonomi, sosial budaya, dan Politik pembangunan. Isi artikel yang dimuat menunjukkan adanya hubungan antara media massa, masyarakat, dan kebijakan pemerintah pada masa tersebut.

Periode ini, pemberitaan dalam *Suara Merdeka* banyak dipengaruhi oleh situasi politik Orde Baru yang menempatkan pers sebagai pendukung pembangunan nasional dan stabilitas negara. Meskipun demikian, surat kabar ini tetap memberikan ruang bagi berbagai persoalan lokal masyarakat Semarang, seperti kondisi ekonomi masyarakat, pendidikan, budaya daerah, dan pembangunan infrastruktur kota. Oleh karena itu, konten artikel dalam *Suara Merdeka* tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga menjadi dokumentasi sosial mengenai perkembangan masyarakat Semarang pada masa Orde Baru.

4.2.1 Konten Artikel Ekonomi

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pers Indonesia berada dalam posisi yang cukup kompleks. Di satu sisi, pers diharapkan menjadi media penyampai informasi kepada masyarakat dan mendukung pembangunan nasional. Namun di sisi lain, pemerintah juga menempatkan pers sebagai institusi yang harus dikontrol agar tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan negara. Pemerintah Orde Baru memandang stabilitas nasional sebagai syarat utama pembangunan sehingga segala bentuk kritik terhadap pemerintah berpotensi dianggap sebagai ancaman terhadap

negara. Situasi tersebut membatasi kebebasan media massa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.³⁷

Salah satu bentuk kontrol pemerintah terhadap pers dilakukan melalui kebijakan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). SIUPP menjadi instrumen penting pemerintah dalam mengawasi aktivitas media massa karena izin penerbitan dapat dicabut sewaktu-waktu apabila isi pemberitaan dianggap bertentangan dengan kepentingan negara. Kebijakan tersebut menyebabkan banyak surat kabar menerapkan praktik swasensor sebagai upaya menjaga keberlangsungan penerbitan mereka.³⁸ Swasensor dilakukan dengan cara membatasi sendiri isi pemberitaan, terutama yang berkaitan dengan kritik terhadap pemerintah, militer, maupun kebijakan politik nasional. Akibatnya, banyak media memilih menggunakan bahasa yang lebih halus dan hati-hati dalam menyampaikan persoalan sosial masyarakat.

Kondisi tersebut menjadikan isu ekonomi masyarakat sebagai salah satu ruang yang relatif aman untuk dimuat dalam surat kabar. Berita mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok, kondisi pasar tradisional, distribusi pangan, serta kesulitan ekonomi masyarakat masih dapat diterbitkan selama tidak secara langsung menyalahkan pemerintah pusat. Akan tetapi, di balik pemberitaan ekonomi tersebut sebenarnya terdapat kritik sosial yang disampaikan secara tersirat melalui kondisi kehidupan masyarakat sehari-hari.³⁹ Pers daerah seperti *Suara Merdeka* memanfaatkan ruang aman tersebut untuk tetap menjalankan fungsi sosial pers tanpa harus berhadapan langsung dengan kontrol negara.

Sebagai surat kabar regional yang terbit di Semarang, *Suara Merdeka* memiliki kedekatan yang kuat dengan masyarakat Jawa Tengah. Kedekatan tersebut terlihat dari fokus pemberitaannya yang banyak mengangkat persoalan kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti aktivitas pasar tradisional, distribusi

³⁷ David T. Hill, *Pers di Masa Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), hlm. 155.

³⁸ Ashadi Siregar, *Pers dan Pemerintahan Orde Baru* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 45.

³⁹ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 67.

kebutuhan pokok, kehidupan pedagang kecil, dan kondisi ekonomi masyarakat perkotaan. Berbeda dengan surat kabar nasional yang lebih banyak membahas isu politik tingkat pusat, *Suara Merdeka* lebih sering menampilkan persoalan sosial ekonomi masyarakat lokal.⁴⁰ Dengan demikian, surat kabar ini tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga menjadi representasi kehidupan masyarakat daerah pada masa Orde Baru.

Pemberitaan mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok dalam *Suara Merdeka* menunjukkan bahwa media lokal tetap berusaha menyampaikan realitas sosial masyarakat meskipun berada di bawah sistem kontrol negara. Melalui pemberitaan ekonomi, *Suara Merdeka* secara tidak langsung memperlihatkan kondisi ekonomi masyarakat yang mulai mengalami tekanan akibat ketidakstabilan harga barang dan distribusi pangan. Akan tetapi, kritik terhadap kondisi tersebut tidak disampaikan secara frontal, melainkan melalui narasi mengenai kehidupan masyarakat pasar dan keresahan ekonomi rakyat kecil. Strategi seperti ini memperlihatkan bagaimana pers daerah pada masa Orde Baru berusaha mempertahankan keseimbangan antara fungsi pers sebagai penyampai informasi masyarakat dan kepentingan menjaga keberlangsungan SIUPP.⁴¹

⁴⁰ Bambang Purwanto, *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 233.

⁴¹ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Bentang, 1997), hlm. 105



Gambar 4.4 “Harga Kebutuhan Pokok Melonjak” Tahun 1997

Sumber: Surat Kabar *Suara Merdeka* No.14, 07 Oktober 1997.

Artikel berjudul “Harga Kebutuhan Pokok Melonjak” memperlihatkan bagaimana *Suara Merdeka* memberitakan kondisi ekonomi masyarakat Semarang yang sedang mengalami tekanan akibat meningkatnya harga berbagai kebutuhan pokok. Artikel tersebut menjelaskan bahwa harga minyak goreng, beras, gula, telur, dan beberapa kebutuhan rumah tangga lainnya mengalami kenaikan akibat melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.⁴² Akan tetapi, meskipun berita tersebut berkaitan dengan persoalan ekonomi nasional yang cukup serius, wartawan tidak secara langsung menyalahkan pemerintah ataupun kebijakan ekonomi negara. Berita lebih diarahkan pada kondisi pasar dan dampak kenaikan harga terhadap masyarakat sehari-hari.

Cara penyampaian berita seperti ini menunjukkan adanya praktik swasensor dalam sistem pers Orde Baru. *Suara Merdeka* tetap menyampaikan

⁴² *Suara Merdeka*, “Harga Kebutuhan Pokok Melonjak”, No.14, 07 Oktober 1997.

realitas sosial mengenai kesulitan ekonomi masyarakat, tetapi menggunakan bahasa yang lebih aman agar tidak dianggap melakukan kritik politik terhadap pemerintah. Wartawan lebih memilih menggunakan istilah seperti “melemahnya nilai rupiah”, “kenaikan harga pasar”, dan “berkurangnya daya beli masyarakat” dibandingkan menggunakan kalimat yang secara langsung menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengelola ekonomi nasional. Strategi tersebut memperlihatkan bagaimana media massa pada masa Orde Baru harus berhati-hati dalam memilih diksi dan arah pemberitaan agar tidak terkena teguran ataupun pencabutan SIUPP⁴³.

Kritik sosial dalam artikel tersebut disampaikan secara tersirat melalui narasi mengenai keresahan masyarakat pasar. Wartawan menghadirkan suara pedagang dan pembeli sebagai sumber utama berita sehingga persoalan ekonomi tampak sebagai realitas sosial masyarakat sehari-hari, bukan sebagai sikap politik redaksi surat kabar. Pedagang mengeluhkan jumlah pembeli yang mulai menurun akibat harga barang yang semakin mahal, sedangkan pembeli merasa kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga karena pendapatan mereka tidak meningkat sebanding dengan kenaikan harga barang.⁴⁴ Dengan menghadirkan suara masyarakat kecil, *Suara Merdeka* secara tidak langsung memperlihatkan adanya tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat bawah.

Strategi menghadirkan pengalaman masyarakat sehari-hari menjadi salah satu cara media massa untuk tetap menjalankan fungsi sosialnya di tengah kontrol negara terhadap pers. Sistem pers Orde Baru membatasi media untuk menyampaikan kritik secara terbuka terhadap pemerintah pusat. Oleh karena itu, kritik lebih sering disampaikan melalui laporan mengenai kondisi sosial masyarakat. Dengan memberitakan kesulitan ekonomi rakyat kecil, surat kabar sebenarnya sedang memperlihatkan adanya persoalan dalam kehidupan masyarakat tanpa harus menggunakan bahasa politik yang konfrontatif.⁴⁵

⁴³ David T. Hill, *Pers di Masa Orde Baru*, hlm. 162.

⁴⁴ *Suara Merdeka*, “Harga Kebutuhan Pokok Melonjak”, No.14, 07 Oktober 1997.

⁴⁵ Ashadi Siregar, *Pers dan Pemerintahan Orde Baru*, hlm. 52.

Selain itu, artikel tersebut memperlihatkan bahwa isu ekonomi menjadi ruang yang relatif aman bagi media untuk membicarakan persoalan masyarakat. Berbeda dengan isu politik yang sangat sensitif, pemberitaan mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok lebih mudah diterima pemerintah karena dianggap berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Akan tetapi, di balik pemberitaan ekonomi tersebut sebenarnya terdapat pesan mengenai kondisi ekonomi nasional yang mulai tidak stabil menjelang akhir masa Orde Baru. Kenaikan harga kebutuhan pokok menunjukkan adanya tekanan ekonomi yang berdampak langsung terhadap masyarakat bawah.⁴⁶

Pemberitaan tersebut juga memperlihatkan bagaimana *Suara Merdeka* berusaha mempertahankan kedekatannya dengan masyarakat lokal. Surat kabar tidak hanya memuat informasi resmi pemerintah, tetapi juga menghadirkan kondisi nyata masyarakat pasar tradisional di Semarang. Fokus terhadap kehidupan pedagang dan pembeli memperlihatkan bahwa *Suara Merdeka* berusaha menjadi media yang merepresentasikan suara masyarakat daerah di tengah dominasi narasi pembangunan pemerintah Orde Baru.⁴⁷

Selain menjadi media informasi, artikel tersebut juga memiliki nilai historis sebagai sumber sejarah sosial ekonomi masyarakat perkotaan pada masa Orde Baru. Berita mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok dapat digunakan untuk melihat kondisi kehidupan masyarakat sehari-hari, terutama mengenai menurunnya daya beli dan meningkatnya keresahan ekonomi masyarakat kecil. Kajian sejarah sosial menempatkan surat kabar seperti *Suara Merdeka* sebagai sumber penting karena mampu merekam pengalaman masyarakat secara langsung dan sezaman.⁴⁸

⁴⁶ Hal Hill, *The Indonesian Economy Since 1966* (Cambridge: Cambridge University Press, 1996), hlm. 281.

⁴⁷ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa*, hlm. 70.

⁴⁸ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, hlm. 110.



Gambar 4.5 “Harga Kebutuhan Pokok Mulai Naik” Tahun 1997

Sumber: Surat Kabar *Suara Merdeka* No.13, 16 Agustus 1997.

Artikel “*Harga Kebutuhan Pokok Mulai Naik*” menunjukkan bagaimana *Suara Merdeka* menggunakan isu ekonomi masyarakat sebagai bentuk pemberitaan yang relatif aman dari pengawasan politik pemerintah. Artikel tersebut menjelaskan bahwa harga minyak goreng, telur, gula, cabai, dan beberapa jenis sayuran mengalami kenaikan akibat berkurangnya pasokan barang di pasar serta meningkatnya permintaan masyarakat menjelang musim tertentu.⁴⁹ Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa wartawan lebih memusatkan perhatian pada persoalan distribusi pasar dibandingkan mengaitkannya secara langsung dengan kebijakan ekonomi pemerintah pusat.

Pola pemberitaan seperti ini memperlihatkan adanya praktik swasensor dalam media massa pada masa Orde Baru. *Suara Merdeka* tidak secara terbuka menyatakan bahwa pemerintah gagal menjaga stabilitas ekonomi, tetapi memilih menggunakan narasi yang lebih aman melalui pembahasan kondisi pasar dan distribusi barang. Sistem pers Orde Baru menempatkan kritik terbuka terhadap pemerintah sebagai tindakan yang berpotensi menimbulkan teguran hingga pencabutan SIUPP sehingga media harus berhati-hati dalam menentukan isi pemberitaan.⁵⁰ Oleh karena itu, berita mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok

⁴⁹ *Suara Merdeka*, “Harga Kebutuhan Pokok Melonjak”, No.13, 16 Agustus 1997.

⁵⁰ David T. Hill, *Pers di Masa Orde Baru*, hlm. 170.

disampaikan dengan gaya bahasa yang informatif dan deskriptif tanpa menggunakan diksi yang bersifat provokatif.

Berbeda dengan artikel sebelumnya, berita ini dilengkapi dengan dokumentasi visual berupa aktivitas perdagangan beras di Pasar Johar Semarang. Kehadiran gambar dalam artikel menjadi bagian penting dalam membangun narasi mengenai kondisi ekonomi masyarakat. Foto tersebut memperlihatkan aktivitas para pedagang yang sedang memindahkan dan menjual beras menggunakan karung-karung besar di pasar tradisional. Gambar tersebut menunjukkan bahwa pasar tradisional masih menjadi pusat utama distribusi kebutuhan pokok masyarakat Semarang pada masa Orde Baru.⁵¹

Penggunaan foto dalam pemberitaan juga memperlihatkan strategi media dalam menghadirkan kritik sosial secara lebih halus. *Suara Merdeka* tidak secara langsung menuliskan bahwa pemerintah gagal menjaga kondisi ekonomi, tetapi memperlihatkan realitas sosial masyarakat melalui visualisasi aktivitas pasar dan kehidupan rakyat kecil. Dengan demikian, pembaca dapat memahami adanya persoalan ekonomi masyarakat tanpa harus membaca kritik politik yang eksplisit dalam teks berita⁵².

Selain memperlihatkan aktivitas perdagangan, gambar tersebut juga menunjukkan kondisi sosial masyarakat perkotaan pada masa Orde Baru. Interaksi antara pedagang dan pembeli memperlihatkan bahwa pasar tradisional bukan hanya tempat transaksi ekonomi, tetapi juga ruang sosial tempat berlangsungnya kehidupan masyarakat sehari-hari. Aktivitas tawar-menawar dan distribusi barang menunjukkan bahwa masyarakat perkotaan masih sangat bergantung pada sistem perdagangan tradisional untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka.⁵³

Pemberitaan mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok juga memperlihatkan adanya keresahan sosial akibat kondisi ekonomi yang mulai tidak

⁵¹ *Suara Merdeka*, “Harga Kebutuhan Pokok Melonjak”, No.13, 16 Agustus 1997.

⁵² Ashadi Siregar, *Pers dan Pemerintahan Orde Baru*, hlm. 61.

⁵³ Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomihardjo, *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif* (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 97.

stabil. Ketika harga bahan pangan meningkat, masyarakat kecil menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Akan tetapi, keresahan tersebut tidak disampaikan dalam bentuk kritik politik yang keras, melainkan melalui narasi mengenai kehidupan pasar dan kondisi ekonomi masyarakat sehari-hari.⁵⁴

Selain itu, artikel tersebut menunjukkan bagaimana *Suara Merdeka* menjalankan fungsi sosial pers di tengah keterbatasan kebebasan pers pada masa Orde Baru. Surat kabar tidak hanya menyampaikan informasi mengenai kenaikan harga barang, tetapi juga memperlihatkan dampak sosial yang dirasakan masyarakat akibat perubahan kondisi ekonomi. Dengan memberitakan kondisi pasar tradisional secara rutin, *Suara Merdeka* berusaha menjadi media yang dekat dengan kehidupan masyarakat lokal sekaligus tetap menjaga keberlangsungan penerbitannya di bawah sistem SIUPP.⁵⁵

Pola pemberitaan seperti ini menunjukkan bahwa pers daerah pada masa Orde Baru berada pada posisi yang tidak sepenuhnya bebas, tetapi juga tidak sepenuhnya diam. Media masih memiliki ruang terbatas untuk menyampaikan kritik sosial melalui isu ekonomi dan kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, artikel mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok dapat dipahami sebagai bentuk strategi media lokal dalam menghadapi kontrol negara terhadap pers.⁵⁶

⁵⁴ Hal Hill, *The Indonesian Economy Since 1966*, hlm. 287.

⁵⁵ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa*, hlm. 72.

⁵⁶ Bambang Purwanto, *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*, hlm. 240.



Gambar 4.6 “Harga Bahan Pokok Merambat Naik” Tahun 1997

Sumber: Surat kabar *Suara Merdeka* No.14, 14 Januari 1997

Artikel “*Harga Bahan Pokok Merambat Naik*” memperlihatkan bagaimana *Suara Merdeka* tetap berusaha menyampaikan persoalan ekonomi masyarakat di tengah sistem pers yang dikontrol pemerintah. Artikel tersebut menjelaskan bahwa harga telur, gula pasir, minyak goreng, cabai, dan beberapa kebutuhan rumah tangga lainnya mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idulfitri.⁵⁷ Kenaikan harga tersebut menimbulkan keresahan masyarakat karena kebutuhan konsumsi rumah tangga meningkat menjelang hari raya.

Berita tersebut juga memuat tanggapan DPRD Jawa Tengah yang meminta pemerintah melakukan operasi pasar guna menstabilkan harga kebutuhan pokok. Kehadiran tanggapan pemerintah daerah dalam artikel menunjukkan strategi media untuk menjaga keseimbangan pemberitaan. *Suara Merdeka* tidak hanya menampilkan keluhan masyarakat, tetapi juga menghadirkan respons pemerintah sehingga berita tetap terlihat mendukung stabilitas sosial. Strategi seperti ini penting dalam sistem pers Orde Baru karena media yang terlalu banyak memuat

⁵⁷ *Suara Merdeka*, “Harga Kebutuhan Pokok Melonjak”, No.14, 14 Januari 1997.

kritik tanpa memberikan ruang kepada pemerintah dapat dianggap mengganggu stabilitas nasional.⁵⁸

Pemberitaan tersebut memperlihatkan bagaimana media lokal menggunakan isu ekonomi sebagai sarana untuk menyampaikan kondisi sosial masyarakat. Kenaikan harga menjelang hari raya memiliki dampak besar terhadap masyarakat kecil karena sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi keluarga. Dengan memberitakan kondisi tersebut, *Suara Merdeka* sebenarnya sedang memperlihatkan adanya tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat bawah. Akan tetapi, kritik tersebut tetap disampaikan melalui bahasa yang hati-hati dan tidak menyerang pemerintah secara langsung.

Selain itu, artikel tersebut menunjukkan bahwa media lokal masih berusaha menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah meskipun berada di bawah sistem pers yang dikontrol negara. Melalui pemberitaan mengenai kenaikan harga kebutuhan pokok, *Suara Merdeka* secara tidak langsung memperlihatkan bahwa stabilitas ekonomi yang selalu dikampanyekan pemerintah Orde Baru tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat bawah. Akan tetapi, kritik tersebut dibungkus dalam bentuk pemberitaan ekonomi sehari-hari sehingga tetap terlihat aman di mata pemerintah.⁵⁹

Pola pemberitaan seperti ini memperlihatkan bahwa pers daerah pada masa Orde Baru memiliki strategi tersendiri dalam menghadapi kontrol negara. Media tidak dapat sepenuhnya bebas dalam menyampaikan kritik politik, tetapi masih dapat menghadirkan realitas sosial masyarakat melalui isu ekonomi rakyat. Oleh karena itu, pemberitaan mengenai harga kebutuhan pokok dalam *Suara Merdeka* dapat dipahami sebagai bentuk strategi pers lokal untuk tetap menjalankan fungsi sosialnya sekaligus mempertahankan keberlangsungan SIUPP di tengah sistem kontrol negara terhadap media massa.⁶⁰

⁵⁸ David T. Hill, *Pers di Masa Orde Baru*, hlm. 175.

⁵⁹ Ashadi Siregar, *Pers dan Pemerintahan Orde Baru*, hlm. 66.

⁶⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, hlm. 115.

4.2.2 Konten Artikel Sosial Budaya

Suara Merdeka pada masa Orde Baru juga banyak memberitakan persoalan sosial budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Pemberitaan sosial budaya menjadi salah satu bentuk konten yang cukup dominan dalam surat kabar karena dianggap lebih aman dibandingkan pemberitaan politik yang bersifat kritis terhadap pemerintah. Sistem pers Orde Baru yang dikontrol melalui kebijakan SIUPP mengharuskan media massa berhati-hati dalam menentukan isi pemberitaan agar tidak dianggap mengganggu stabilitas nasional. Oleh karena itu, berbagai isu sosial budaya sering digunakan sebagai ruang aman untuk menyampaikan realitas sosial masyarakat secara tidak langsung.⁶¹

Pemberitaan sosial budaya dalam *Suara Merdeka* umumnya berkaitan dengan pendidikan, kehidupan keluarga, perubahan perilaku masyarakat, serta persoalan sosial yang muncul di tengah proses pembangunan nasional. Pemerintah Orde Baru sering menggunakan konsep pembangunan nasional sebagai bagian dari ideologi negara. Melalui pembangunan, pemerintah berusaha membentuk masyarakat yang dianggap modern, tertib, dan mendukung stabilitas nasional. Akan tetapi, dalam praktiknya berbagai persoalan sosial tetap muncul di masyarakat, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, dan tradisi sosial yang dianggap menghambat program pemerintah.⁶²

Sebagai surat kabar daerah, *Suara Merdeka* memiliki kedekatan yang cukup kuat dengan kehidupan masyarakat Jawa Tengah sehingga pemberitaannya banyak menampilkan kondisi sosial masyarakat secara langsung. Melalui pemberitaan sosial budaya, *Suara Merdeka* tidak hanya menjalankan fungsi informasi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana media lokal berusaha menyesuaikan diri dengan sistem kontrol pers Orde Baru. Kritik terhadap persoalan

⁶¹ David T. Hill, *Pers di Masa Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2011), hlm. 180.

⁶² Ariel Heryanto, *State Terrorism and Political Identity in Indonesia* (London: Routledge, 2006), hlm. 94.

sosial tidak disampaikan secara frontal kepada pemerintah, melainkan dibungkus dalam bentuk pemberitaan mengenai kehidupan masyarakat sehari-hari.⁶³



**Gambar 4.7 “Wajib Belajar 9 Tahun, Berhadapan dengan Kawin Muda”
Tahun 1992**

Sumber: Surat kabar *Suara Merdeka* No 3, 4 Mei 1992.

Artikel berjudul “*Wajib Belajar 9 Tahun, Berhadapan dengan Kawin Muda*” memperlihatkan bagaimana *Suara Merdeka* memberitakan persoalan sosial budaya masyarakat dalam konteks program pembangunan pendidikan pada masa Orde Baru. Penjelasan dalam artikel tersebut menunjukkan bahwa program wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan pemerintah menghadapi berbagai hambatan sosial di masyarakat, salah satunya praktik kawin muda yang masih banyak terjadi di daerah pedesaan.⁶⁴

Pemberitaan tersebut menunjukkan bahwa *Suara Merdeka* berusaha menghadirkan realitas sosial masyarakat tanpa secara langsung menyalahkan pemerintah. Wartawan tidak menempatkan kegagalan pendidikan sebagai akibat dari kelemahan kebijakan negara, tetapi lebih diarahkan pada persoalan budaya dan kondisi sosial masyarakat. Strategi seperti ini memperlihatkan adanya praktik swasensor dalam pemberitaan media massa pada masa Orde Baru. Pers tetap dapat

⁶³ Ashadi Siregar, *Pers dan Pemerintahan Orde Baru* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 74.

⁶⁴ *Suara Merdeka*, “Wajib Belajar 9 Tahun, Berhadapan dengan Kawin Muda”, No 3, 4 Mei 1992.

membahas persoalan sosial yang cukup sensitif, tetapi harus menggunakan narasi yang aman dan tidak konfrontatif terhadap pemerintah pusat.⁶⁵

Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa banyak anak di daerah pedesaan tidak melanjutkan pendidikan karena menikah di usia muda. Tradisi kawin muda dipandang sebagai salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun. Akan tetapi, wartawan tidak menjadikan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab secara langsung atas kondisi tersebut. Fokus pemberitaan lebih diarahkan pada kebiasaan sosial masyarakat dan rendahnya kesadaran pendidikan di pedesaan.⁶⁶ Dengan demikian, kritik terhadap persoalan pendidikan disampaikan secara tidak langsung melalui narasi mengenai kondisi masyarakat.

Strategi pemberitaan seperti ini menunjukkan bagaimana media massa pada masa Orde Baru berusaha menyesuaikan diri dengan sistem kontrol negara. Dalam sistem pers yang diawasi pemerintah, kritik langsung terhadap program pembangunan nasional dapat dianggap sebagai bentuk perlawanan terhadap negara. Oleh karena itu, media lebih sering menggunakan pendekatan sosial budaya dalam menjelaskan persoalan pembangunan. Dengan menyoroti praktik kawin muda sebagai hambatan pendidikan, *Suara Merdeka* dapat membahas persoalan kegagalan pemerataan pendidikan tanpa harus mengkritik pemerintah secara terbuka.⁶⁷

Selain itu, artikel tersebut juga memperlihatkan bagaimana pemerintah Orde Baru berusaha membentuk masyarakat modern melalui program pendidikan nasional. Program wajib belajar sembilan tahun merupakan bagian dari agenda pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya program tersebut

⁶⁵ David T. Hill, *Pers di Masa Orde Baru*, hlm. 184.

⁶⁶ *Suara Merdeka*, “Wajib Belajar 9 Tahun, Berhadapan dengan Kawin Muda”, No 3, 4 Mei 1992

⁶⁷ Ashadi Siregar, *Pers dan Pemerintahan Orde Baru*, hlm. 81.

menghadapi berbagai kendala sosial budaya di masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang masih mempertahankan tradisi kawin muda.⁶⁸

Melalui pemberitaan tersebut, *Suara Merdeka* secara tidak langsung memperlihatkan adanya benturan antara program modernisasi negara dengan budaya masyarakat lokal. Pemerintah menginginkan masyarakat yang lebih terdidik dan produktif melalui pendidikan formal, sedangkan sebagian masyarakat masih mempertahankan pola kehidupan tradisional yang mengutamakan pernikahan di usia muda. Konflik seperti ini menjadi bagian penting dalam dinamika sosial masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru.⁶⁹

Selain membahas persoalan pendidikan, artikel tersebut juga menunjukkan bagaimana media lokal menjalankan fungsi edukasi sosial kepada masyarakat. Dengan memberitakan dampak kawin muda terhadap pendidikan anak, *Suara Merdeka* tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga berusaha membangun kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan formal. Fungsi edukasi seperti ini menjadi salah satu peran penting pers pada masa Orde Baru, terutama dalam mendukung program pembangunan pemerintah.⁷⁰

Akan tetapi, dukungan media terhadap program pembangunan pemerintah tidak berarti pers sepenuhnya bebas. Konteks SIUPP, media tetap harus berhati-hati dalam menentukan sudut pandang pemberitaan. Oleh karena itu, kritik terhadap persoalan sosial disampaikan melalui pendekatan budaya masyarakat, bukan melalui kritik langsung terhadap kebijakan negara. Strategi seperti ini memperlihatkan bagaimana pers daerah tetap berusaha menjalankan fungsi sosialnya tanpa melanggar batas-batas kontrol negara terhadap media massa.⁷¹

⁶⁸ M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008* (Jakarta: Serambi, 2008), hlm. 598.

⁶⁹ Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomihardjo, *Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif* (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 121.

⁷⁰ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 82.

⁷¹ Bambang Purwanto, *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 252.

Mendikbud Fuad Hassan:

Para Guru Diminta Siapkan Diri untuk Laksanakan Wajib Belajar

JAKARTA — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof Dr Fuad Hassan mengingatkan, wajib belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, merupakan tantangan berat penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Untuk itu, Menteri berharap agar para guru mempersiapkan diri untuk melaksanakan wajib belajar sembilan tahun.

Fuad Hassan mengatakan hal itu, dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) di Depdikbud Jakarta, Sabtu kemarin.

Ditegaskan, pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun merupakan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia untuk pembangunan. Karena itu, Fuad menilai wajib belajar sembilan tahun sebaiknya tidak ditunda-tunda, namun dilaksanakan sedini mungkin, yakni awal Pelita VI

agar angka partisipasi maksimal dapat dicapai pada akhir periode tersebut.

Diakui, angka partisipasi SLTP yang dicapai saat ini belum memuaskan, bahkan di beberapa wilayah atau provinsi angka tersebut masih rendah dan banyak kekurangan yang perlu dibenahi.

Pada bagian lain, Fuad mengemukakan, wajib belajar sembilan tahun memerlukan dana cukup besar. Beban tersebut, menurutnya akan terasa ringan bila dilaksanakan dengan penuh kesadaran sebagai pelaksanaan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUPN) No 2/1989, bahwa pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat dan atau keluarga peserta didik.

Kurikulum

Pada kesempatan itu, Fuad menegaskan, Departemennya saat ini sedang melakukan pemusatan pembenahan penyelenggaraan berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Pembenahan tersebut pada umumnya merupakan penyesuaian dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku, terutama sejak diberlakukannya UU No 2/1989.

Ditegaskan, upaya itu terutama penyesuaian kurikulum pendidikan dasar dan menengah yang telah dilaksanakan beberapa tahun terakhir ini.

Pada peringatan Hardiknas tahun ini, Mendikbud atas nama Presiden memberikan penghargaan Satya Lencana Kelas I, Kelas II dan Kelas III kepada 22 pejabat di lingkungan Depdikbud. Diantaranya, Prof Dr Hasan Walinono (Dirjen Dikdasmen), Drs GBPH Poegoer (Dirjen Kebudayaan), Ir Sambas Wirakusumah MSc (Ketua Kopertis Wilayah III) dan Prof Dr HB Maeflangka (Guru Besar pada Kopertis Wilayah III).

Di Semarang

Sementara pada peringatan Hardiknas tingkat Jateng yang dipusatkan di Lapangan Pancasila Semarang, Gubernur Ismail atas nama Presiden menyerahkan

kan sekaligus menyematkan tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada sejumlah pegawai di lingkungan Depdikbud, yang telah mengabdikan selama lebih dari 25 tahun.

Mereka yang menerima penghargaan itu masing-masing: Guru Besar Fakultas Teknik Undip Prof Ir Sidharta (Satya Lencana Karya Satya Kelas I), Pengawas SMTA Kanwil Depdikbud Jateng Drs Berry dan Lektor Kepala Madya FPBS IKIP Semarang, Drs Humar Sahman (Satya Lencana Karya Satya Kelas II), Kepala SMA

7 R Soegiono Notowidjono dan Kasubbag Kepegawaian Dinas Dikbud Jateng masing-masing (Satya Lencana Karya Satya Kelas III).

Selain kelima orang tersebut, juga diserahkan anugerah serupa kepada 75 orang, yang telah mengabdikan diri di unit kerja Kanwil Depdikbud dan Kandepdikbud se-Jateng. Peringatan Hardiknas tahun ini juga dimeoriakan dengan peragaan Senam Jantung Sehat dan Senam Kesehatan Jasmani yang diiringi gending Jawa, diperagakan oleh 4.000 murid SD se-Kodja Semarang.

Upacara dihadiri Kakanwil Depdikbud Jateng Suwardi, Kapolda Mayjen Pol Drs Aji Komaruddin, Kasdam VI Dip Brigjen TNI M Mairuf, Kajati R Djoko Moeljo SH.

Di Daerah

Sementara Gubernur DIY, Paku Alam VIII, selaku inspektur upacara Hardiknas menyerahkan Satya Lencana Karya Satya Kelas I kepada enam orang pegawai di jajaran Depdikbud DIY. Pada upacara yang dipusatkan di Lapangan Kridosono tersebut juga diserahkan penghargaan kepada 81 orang lainnya.

Peringatan serupa di Purworejo juga ditandai dengan penyerahan piagam penghargaan oleh Bupati Purworejo, Drs H Goernito kepada 54 guru yang bertugas di daerah terpencil. Ke-54 guru tersebut berasal dari tiga kecamatan, yaitu Pituruh, Bagehen dan Kemiri. Upacara peringatan Hardiknas ini juga diselenggarakan di seluruh Kota Madya dan Kabupaten di Jateng. (B12-A9-sgt-ma-43)

Gambar 4.8 “Para Guru Diminta Siapkan Diri untuk Laksanakan Wajib Belajar”

Sumber: Surat kabar *Suara Merdeka* No 11, 3 Mei 1992.

Artikel berjudul “*Para Guru Diminta Siapkan Diri untuk Laksanakan Wajib Belajar*” memperlihatkan bagaimana *Suara Merdeka* memberitakan program pendidikan pemerintah dalam kerangka pembangunan nasional Orde Baru. Artikel tersebut dijelaskan bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Fuad Hassan, meminta para guru untuk mempersiapkan diri dalam pelaksanaan program

wajib belajar sembilan tahun⁷². Program tersebut dipandang sebagai bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan mendukung agenda pembangunan nasional pemerintah Orde Baru.

Apabila dikaitkan dengan artikel sebelumnya mengenai praktik kawin muda, pemberitaan ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara persoalan pendidikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Pada artikel “*Wajib Belajar 9 Tahun, Berhadapan dengan Kawin Muda*”, dijelaskan bahwa tradisi menikah di usia muda menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan program wajib belajar sembilan tahun, terutama di daerah pedesaan.⁷³ Banyak anak yang seharusnya melanjutkan pendidikan justru berhenti sekolah karena menikah pada usia muda atau didorong oleh kondisi ekonomi keluarga. Konteks tersebut, artikel mengenai kesiapan guru ini dapat dipahami sebagai bentuk lanjutan dari upaya pemerintah untuk mengatasi hambatan-hambatan sosial yang mengganggu pelaksanaan program pendidikan nasional.

Kedua artikel tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pendidikan pada masa Orde Baru tidak hanya berkaitan dengan penyediaan sekolah dan tenaga pengajar, tetapi juga berkaitan erat dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Pemerintah berusaha meningkatkan angka partisipasi pendidikan melalui program wajib belajar sembilan tahun, tetapi di lapangan program tersebut menghadapi berbagai hambatan seperti kemiskinan, rendahnya kesadaran pendidikan, dan tradisi kawin muda yang masih kuat di beberapa daerah. Dengan demikian, pemberitaan mengenai kesiapan guru dalam melaksanakan wajib belajar tidak dapat dipisahkan dari persoalan sosial yang sebelumnya telah diberitakan oleh *Suara Merdeka*.

Pola pemberitaan seperti ini menunjukkan bagaimana *Suara Merdeka* membangun narasi sosial secara berkelanjutan. Artikel mengenai kawin muda

⁷² *Suara Merdeka*, “Para Guru Diminta Siapkan Diri untuk Laksanakan Wajib Belajar,” No 11, 3 Mei 1992.

⁷³ *Suara Merdeka*, “Wajib Belajar 9 Tahun, Berhadapan dengan Kawin Muda”, No 3, 4 Mei 1992

memperlihatkan hambatan sosial budaya dalam dunia pendidikan, sedangkan artikel mengenai kesiapan guru memperlihatkan respons pemerintah terhadap persoalan tersebut melalui penguatan sistem pendidikan nasional. Dengan cara seperti ini, *Suara Merdeka* tidak hanya menyampaikan berita secara terpisah, tetapi juga membangun hubungan antarpemberitaan sehingga pembaca dapat memahami persoalan sosial secara lebih luas dan menyeluruh.

Selain itu, artikel tersebut memperlihatkan bagaimana media massa pada masa Orde Baru berfungsi sebagai alat penyebaran program pembangunan pemerintah. Artikel dijelaskan bahwa para guru diminta mempersiapkan diri agar pelaksanaan wajib belajar dapat berjalan maksimal.⁷⁴ Pemberitaan seperti ini menunjukkan bahwa media memiliki peran penting dalam menyosialisasikan kebijakan negara kepada masyarakat. Pers tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membantu membentuk opini masyarakat agar mendukung program pembangunan nasional yang dijalankan pemerintah.

Akan tetapi, meskipun artikel tersebut tampak mendukung kebijakan pemerintah, *Suara Merdeka* tetap memperlihatkan adanya persoalan sosial yang menghambat pelaksanaan program pendidikan. Artikel ini menjelaskan bahwa pelaksanaan wajib belajar memerlukan kesiapan tenaga pengajar, fasilitas pendidikan, dan partisipasi masyarakat yang cukup besar. Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan pada masa Orde Baru belum sepenuhnya merata dan masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.⁷⁵ Akan tetapi, persoalan tersebut disampaikan secara hati-hati tanpa memberikan kritik terbuka terhadap pemerintah pusat.

Cara penyampaian berita seperti ini memperlihatkan adanya praktik swasensor dalam media massa pada masa Orde Baru. *Suara Merdeka* tetap dapat menyampaikan realitas sosial mengenai berbagai hambatan pendidikan, tetapi menggunakan bahasa yang aman dan tidak konfrontatif terhadap pemerintah. Kritik

⁷⁴ *Suara Merdeka*, "Para Guru Diminta Siapkan Diri untuk Laksanakan Wajib Belajar," No 11, 3 Mei 1992.

⁷⁵ Ashadi Siregar, *Pers dan Pemerintahan Orde Baru*, hlm. 88.

terhadap dunia pendidikan tidak diarahkan secara langsung kepada negara, melainkan dibungkus melalui pembahasan mengenai kesiapan guru, fasilitas pendidikan, dan partisipasi masyarakat. Strategi seperti ini penting dilakukan media agar tetap dapat menjalankan fungsi sosial pers tanpa menghadapi risiko pencabutan SIUPP.⁷⁶

Jika dikaitkan dengan artikel mengenai kawin muda, kedua pemberitaan tersebut memperlihatkan adanya benturan antara program modernisasi negara dengan kondisi sosial budaya masyarakat lokal. Pemerintah Orde Baru berusaha membangun masyarakat modern melalui pendidikan formal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya program tersebut berhadapan dengan tradisi sosial masyarakat yang masih mempertahankan pola kehidupan tradisional, termasuk praktik menikah di usia muda. Konflik antara modernisasi negara dan budaya lokal inilah yang kemudian menjadi salah satu persoalan sosial penting dalam pelaksanaan program pendidikan nasional pada masa Orde Baru.

Melalui kedua artikel tersebut, *Suara Merdeka* secara tidak langsung memperlihatkan bahwa keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya masyarakat. Dengan menggunakan bahasa yang hati-hati dan tidak bersifat konfrontatif, *Suara Merdeka* tetap dapat menyampaikan persoalan sosial masyarakat sekaligus mempertahankan keberlangsungan penerbitannya di bawah sistem SIUPP pada masa Orde Baru.

⁷⁶ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa*, hlm. 85.



Gambar 4.9 “Gambang Semarang”

Sumber: Surat kabar *Suara Merdeka* No. 02, 11 September 1991

Artikel berjudul “*Gambang Semarang*” menunjukkan bahwa surat kabar *Suara Merdeka* tidak hanya memuat pemberitaan mengenai pembangunan dan kebijakan pemerintah, tetapi juga memberikan perhatian terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Semarang. Artikel tersebut memberitakan penyelenggaraan pertunjukan Gambang Semarang dalam kegiatan pelatihan dan pentas seni tradisional yang melibatkan pelaku seni daerah serta masyarakat setempat.⁷⁷ Kehadiran berita budaya seperti ini memperlihatkan bahwa media lokal masih memberikan ruang bagi pelestarian kesenian tradisional di tengah berkembangnya modernisasi kota pada masa Orde Baru. Situasi ketika media massa lebih banyak dipenuhi oleh narasi pembangunan nasional dan stabilitas negara, pemberitaan

⁷⁷ *Suara Merdeka*, “Gambang Semarang,” No. 02, 11 September 1991

mengenai budaya lokal menjadi bentuk representasi kehidupan masyarakat yang tetap dipertahankan oleh *Suara Merdeka* sebagai surat kabar daerah.

Gambang Semarang merupakan salah satu bentuk kesenian tradisional khas Kota Semarang yang berkembang melalui proses akulturasi budaya Jawa dan Tionghoa. Kesenian ini tumbuh dari karakter masyarakat pesisir Semarang yang sejak lama dikenal sebagai masyarakat multikultural akibat aktivitas perdagangan dan pelabuhan⁷⁸. Perkembangan Gambang di Semarang tidak hanya menjadi hiburan rakyat, tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat kota. Pertunjukan Gambang Semarang biasanya menampilkan perpaduan musik tradisional, nyanyian, tari, serta lawakan yang menggambarkan kehidupan masyarakat sehari-hari. Oleh karena itu, pemuatan artikel mengenai Gambang Semarang dalam *Suara Merdeka* memperlihatkan bahwa budaya lokal masih memiliki posisi penting dalam kehidupan masyarakat Semarang meskipun pembangunan fisik dan modernisasi kota terus berkembang pada dekade 1980–1990-an.

Foto yang dimuat dalam artikel memperlihatkan seorang penyanyi sedang tampil di atas panggung dengan diiringi kelompok musik tradisional dan disaksikan sejumlah penonton. Kehadiran dokumentasi visual dalam surat kabar memiliki makna penting karena mampu merekam kondisi sosial budaya masyarakat pada masa tertentu secara langsung.⁷⁹ Gambar tersebut menunjukkan bahwa pertunjukan seni tradisional masih menjadi bagian dari ruang sosial masyarakat Semarang. Selain itu, kesederhanaan panggung dan keterlibatan masyarakat memperlihatkan bahwa kesenian tradisional tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi sarana interaksi sosial masyarakat. Dengan demikian, foto dalam artikel tersebut dapat dipahami sebagai bukti historis mengenai keberlangsungan budaya lokal di tengah perubahan sosial masyarakat perkotaan.

⁷⁸ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 214.

⁷⁹ Aulia Rahman, “Fotografi sebagai Sumber dalam Penelitian Sejarah Sosial,” *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol. 14, No. 2, 2020, hlm. 118.

Pemuatan artikel budaya seperti Gambang Semarang juga memperlihatkan bagaimana media lokal berupaya menghadirkan pemberitaan yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Pada masa Orde Baru, media massa berada dalam pengawasan pemerintah melalui kebijakan pers dan praktik swasensor sehingga pemberitaan politik cenderung disampaikan secara hati-hati.⁸⁰ Berita mengenai kebudayaan daerah menjadi salah satu tema yang relatif aman untuk diterbitkan karena tidak secara langsung berkaitan dengan persoalan politik yang sensitif. Akan tetapi, di balik sifatnya yang tampak sederhana, pemberitaan budaya tetap memiliki fungsi sosial yang penting karena mampu menjaga identitas daerah sekaligus memperkuat kedekatan emosional antara media dan masyarakat pembacanya.

Keberadaan artikel ini juga memperlihatkan bahwa *Suara Merdeka* berfungsi sebagai sarana dokumentasi budaya masyarakat Semarang. Melalui pemberitaan mengenai kesenian tradisional, surat kabar tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga merekam aktivitas sosial masyarakat yang nantinya dapat digunakan sebagai sumber sejarah.⁸¹ Konteks masyarakat perkotaan yang terus mengalami modernisasi, dokumentasi mengenai budaya lokal menjadi penting karena menunjukkan bahwa tradisi masyarakat tetap bertahan di tengah perkembangan ekonomi dan pembangunan kota. Oleh sebab itu, artikel tentang Gambang Semarang tidak hanya memiliki nilai informatif, tetapi juga nilai historis sebagai bagian dari rekaman kehidupan budaya masyarakat Semarang pada masa Orde Baru.

Dengan demikian, artikel “*Gambang Semarang*” menunjukkan bahwa konten sosial budaya dalam *Suara Merdeka* memiliki fungsi yang lebih luas daripada sekadar berita hiburan. Pemberitaan tersebut memperlihatkan bahwa media lokal turut berperan dalam menjaga keberlangsungan identitas budaya masyarakat daerah di tengah dominasi narasi pembangunan nasional. Melalui

⁸⁰ Dahlan R. Romli, *Pers dalam Politik Orde Baru: Kontrol dan Pembredelan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 85.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 83.

artikel budaya seperti ini, *Suara Merdeka* mampu menghadirkan realitas sosial masyarakat Semarang secara lebih dekat dan humanis sehingga surat kabar tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga menjadi bagian dari ruang sosial dan budaya masyarakat Jawa Tengah.⁸²



Gambar 4.10 "Gambang Semarang' Layak Dijadikan Identitas Kota ATLAS"

Sumber: Surat kabar *Suara Merdeka* No. 02, 26 Juli 1994.

Artikel berjudul "*Gambang Semarang Layak Dijadikan Identitas Kota ATLAS*" menunjukkan bahwa kesenian Gambang Semarang tidak hanya dipandang

⁸² Yulianus Indrajaya, *Pers Lokal dan Perubahan Sosial* (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2010), hlm. 67.

sebagai hiburan tradisional masyarakat, tetapi juga mulai ditempatkan sebagai simbol identitas budaya Kota Semarang. Artikel tersebut menjelaskan bahwa Gambang Semarang dianggap layak menjadi bagian dari identitas kota karena mencerminkan karakter masyarakat Semarang yang dikenal melalui slogan ATLAS, yaitu Aman, Tertib, Lancar, Asri, dan Sehat.⁸³ Pemberitaan ini memperlihatkan adanya upaya untuk menghubungkan kesenian tradisional dengan citra kota modern yang sedang dibangun pada masa Orde Baru.

Isi artikel juga menunjukkan adanya perhatian dari kalangan akademisi dan seniman terhadap pelestarian Gambang Semarang. Pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa revitalisasi kesenian Gambang Semarang perlu dilakukan melalui pengembangan kualitas artistik, manajemen pertunjukan, dan pembinaan kelompok seni agar mampu bertahan di tengah perkembangan hiburan modern. Hal tersebut memperlihatkan bahwa kesenian tradisional mulai menghadapi tantangan akibat perubahan sosial masyarakat perkotaan. Modernisasi kota dan berkembangnya budaya populer menyebabkan kesenian tradisional harus menyesuaikan diri agar tetap diminati masyarakat. Oleh karena itu, upaya menjadikan Gambang Semarang sebagai identitas kota dapat dipahami sebagai bentuk pelestarian budaya lokal di tengah perubahan sosial yang berlangsung pada masa Orde Baru.

Foto dan isi berita tersebut memperlihatkan bahwa media lokal memiliki peran penting dalam membangun kesadaran budaya masyarakat daerah. Melalui pemberitaan mengenai Gambang Semarang, *Suara Merdeka* tidak hanya menyampaikan informasi mengenai kegiatan seni, tetapi juga ikut membentuk pandangan masyarakat bahwa budaya lokal merupakan bagian penting dari identitas kota.⁸⁴ Konteks masyarakat perkotaan yang terus berkembang, identitas budaya menjadi hal yang penting untuk dipertahankan agar masyarakat tidak kehilangan ciri khas daerahnya. Oleh sebab itu, pemberitaan budaya dalam surat

⁸³ *Suara Merdeka*, "Gambang Semarang Layak Dijadikan Identitas Kota ATLAS," No. 02, 26 Juli 1994.

⁸⁴ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa McQuail* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 93.

kabar daerah memiliki fungsi sosial yang cukup besar karena mampu memperkuat hubungan masyarakat dengan warisan budaya lokalnya.

Selain itu, artikel tersebut memperlihatkan bagaimana budaya lokal mulai diposisikan sebagai bagian dari citra pembangunan daerah. Pada masa Orde Baru, pemerintah daerah tidak hanya menonjolkan pembangunan fisik kota, tetapi juga mulai memperhatikan aspek budaya sebagai bagian dari identitas daerah.⁸⁵ Gambang Semarang dipandang mampu menjadi simbol budaya yang merepresentasikan karakter masyarakat Semarang. Dengan demikian, kesenian tradisional tidak hanya dipahami sebagai hiburan rakyat, tetapi juga sebagai aset budaya daerah yang memiliki nilai sosial dan simbolik bagi masyarakat kota.

Pemberitaan mengenai Gambang Semarang dalam *Suara Merdeka* juga menunjukkan bahwa media lokal berusaha menjaga kedekatan dengan kehidupan sosial masyarakat. Di tengah dominasi pemberitaan pembangunan dan stabilitas nasional pada masa Orde Baru, berita mengenai kesenian daerah menjadi ruang yang relatif aman bagi media untuk menghadirkan realitas sosial budaya masyarakat.⁸⁶ Melalui artikel seperti ini, *Suara Merdeka* memperlihatkan posisinya sebagai surat kabar daerah yang tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana dokumentasi budaya masyarakat Semarang.

Dengan demikian, artikel “*Gambang Semarang Layak Dijadikan Identitas Kota ATLAS*” menunjukkan bahwa konten sosial budaya dalam *Suara Merdeka* memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya lokal masyarakat Semarang. Pemberitaan tersebut memperlihatkan adanya upaya pelestarian budaya tradisional di tengah modernisasi perkotaan serta menunjukkan bagaimana media lokal turut berperan dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kebudayaan daerah sebagai bagian dari identitas kota.⁸⁷

⁸⁵ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 219.

⁸⁶ Dahlan R. Romli, *Pers dalam Politik Orde Baru: Kontrol dan Pembredelan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 85.

⁸⁷ Yulianus Indrajaya, *Pers Lokal dan Perubahan Sosial* (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2010), hlm. 71.



Gambar 4.11 "Klenteng Sam Po Kong Potensial Serap Wisatawan"

Sumber: Surat kabar *Suara Merdeka* No. 02, 6 Februari 1997.

Artikel berjudul "*Klenteng Sam Po Kong Potensial Serap Wisatawan*" menunjukkan bagaimana *Suara Merdeka* memberitakan kebudayaan lokal sebagai bagian dari potensi pariwisata dan identitas Kota Semarang. Artikel tersebut dijelaskan bahwa kawasan Klenteng Sam Po Kong dipandang memiliki nilai sejarah, budaya, dan arsitektur yang mampu menarik wisatawan.⁸⁸ Pemberitaan ini memperlihatkan bahwa situs budaya tidak hanya dipahami sebagai peninggalan sejarah semata, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan kota melalui sektor pariwisata. Dengan demikian, budaya lokal mulai ditempatkan sebagai aset ekonomi dan identitas daerah yang dapat mendukung perkembangan Kota Semarang.

Isi artikel juga menunjukkan adanya perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan kawasan Sam Po Kong sebagai kawasan wisata budaya. Pemberitaan tersebut dijelaskan bahwa pengembangan kawasan dilakukan dengan

⁸⁸ *Suara Merdeka*, "Klenteng Sam Po Kong Potensial Serap Wisatawan," No. 02, 6 Februari 1997.

tetap mempertahankan unsur budaya dan sejarah yang melekat pada bangunan klenteng. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pada masa Orde Baru mulai berkembang pandangan mengenai pentingnya pelestarian budaya lokal di tengah modernisasi perkotaan. Klenteng Sam Po Kong tidak hanya dipandang sebagai tempat ibadah masyarakat Tionghoa, tetapi juga sebagai bagian dari warisan budaya Kota Semarang yang memiliki nilai historis dan sosial bagi masyarakat luas.

Pemberitaan mengenai Sam Po Kong juga memperlihatkan karakter masyarakat Semarang yang multikultural. Secara historis, Semarang berkembang sebagai kota pelabuhan yang menjadi tempat pertemuan berbagai kelompok etnis, seperti Jawa, Tionghoa, Arab, dan Eropa.⁸⁹ Keberadaan Klenteng Sam Po Kong menjadi salah satu bukti akulturasi budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Semarang. Oleh sebab itu, artikel ini tidak hanya membahas persoalan wisata, tetapi juga memperlihatkan bagaimana budaya Tionghoa menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat kota pada masa tersebut.

Foto dan isi berita tersebut memperlihatkan bahwa media lokal memiliki peran penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian warisan budaya daerah. Melalui pemberitaan mengenai Sam Po Kong, *Suara Merdeka* tidak hanya menyampaikan informasi mengenai potensi wisata, tetapi juga memperkuat pandangan bahwa bangunan bersejarah dan tradisi budaya lokal perlu dipertahankan di tengah perkembangan pembangunan kota.⁹⁰ Konteks masyarakat perkotaan yang terus mengalami modernisasi, pelestarian situs budaya menjadi penting agar identitas sejarah dan budaya masyarakat tidak hilang akibat perubahan sosial dan pembangunan fisik kota.

Selain itu, artikel tersebut menunjukkan bahwa pemberitaan budaya menjadi salah satu ruang yang relatif aman bagi media pada masa Orde Baru. Di tengah pengawasan pemerintah terhadap media massa melalui kebijakan pers dan praktik swasensor, berita mengenai kebudayaan daerah dan pariwisata tidak

⁸⁹ Koentjaraningrat, *Kebudayaan Jawa* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 221.

⁹⁰ Taufik Abdullah, *Pers dan Perubahan Sosial di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 51.

dianggap sebagai ancaman politik sehingga lebih mudah diterbitkan.⁹¹ Akan tetapi, di balik itu semua, pemberitaan budaya tetap memiliki fungsi sosial yang penting karena mampu memperlihatkan realitas masyarakat lokal serta memperkuat hubungan emosional antara surat kabar dan pembacanya. Hal ini, *Suara Merdeka* memperlihatkan perannya sebagai media daerah yang dekat dengan kehidupan sosial budaya masyarakat Semarang.

Dengan demikian, artikel “*Klenteng Sam Po Kong Potensial Serap Wisatawan*” menunjukkan bahwa konten sosial budaya dalam *Suara Merdeka* tidak hanya berfungsi sebagai berita hiburan atau informasi wisata, tetapi juga menjadi sarana pelestarian identitas budaya masyarakat Semarang. Pemberitaan tersebut memperlihatkan bagaimana budaya lokal mulai diposisikan sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah sekaligus menunjukkan bahwa media lokal memiliki peran dalam menjaga memori sejarah dan keberagaman budaya masyarakat kota.⁹²

⁹¹ Dahlan R. Romli, *Pers dalam Politik Orde Baru: Kontrol dan Pembredelan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 85.

⁹² Yulianus Indrajaya, *Pers Lokal dan Perubahan Sosial* (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2010), hlm. 74.



Gambar 4.12 “Pengunjung Pawai Sam Poo Membeludak”

Sumber: Surat kabar *Suara Merdeka* No. 02, 11 Agustus 1998.

Artikel berjudul “*Pengunjung Pawai Sam Poo Membeludak*” menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat Semarang terhadap kegiatan budaya dan tradisi yang berlangsung di kawasan Klenteng Sam Po Kong. Artikel tersebut dijelaskan bahwa ribuan masyarakat memadati kawasan Simongan untuk menyaksikan arak-arakan dan pawai budaya yang berkaitan dengan tradisi Sam Poo Kong.⁹³ Pemberitaan ini memperlihatkan bahwa kegiatan budaya tidak hanya menjadi ritual keagamaan atau tradisi etnis tertentu, tetapi telah berkembang menjadi bagian dari ruang sosial masyarakat kota yang mampu menarik perhatian publik secara luas.

⁹³ *Suara Merdeka*, “Pengunjung Pawai Sam Poo Membeludak,” No. 02, 11 Agustus 1998.

Isi artikel juga memperlihatkan bahwa tradisi Sam Poo Kong memiliki daya tarik budaya yang kuat bagi masyarakat Semarang. Pawai budaya yang diselenggarakan di kawasan klenteng tidak hanya diikuti oleh masyarakat Tionghoa, tetapi juga disaksikan oleh masyarakat umum dari berbagai latar belakang sosial.⁹⁴ Hal tersebut menunjukkan bahwa budaya Tionghoa telah menjadi bagian dari kehidupan sosial masyarakat Semarang yang multikultural. Dalam konteks sejarah kota Semarang sebagai kota pelabuhan dan perdagangan, interaksi antar-etnis telah berlangsung sejak lama sehingga melahirkan proses akulturasi budaya dalam kehidupan masyarakat perkotaan. Oleh sebab itu, tradisi Sam Poo Kong dapat dipahami sebagai bagian dari identitas sosial budaya Kota Semarang.

Foto dan isi berita tersebut juga memperlihatkan bagaimana kegiatan budaya mampu menciptakan ruang interaksi sosial masyarakat. Keramaian pengunjung yang memadati jalur pawai menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ketertarikan yang besar terhadap kegiatan budaya lokal.⁹⁵ Selain menjadi hiburan masyarakat, kegiatan budaya seperti pawai Sam Poo Kong juga memperlihatkan adanya solidaritas sosial dan kebersamaan masyarakat kota dalam mengikuti tradisi daerah. Dengan demikian, budaya tidak hanya berfungsi sebagai warisan tradisional, tetapi juga menjadi media yang mempertemukan masyarakat dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Pemberitaan mengenai pawai Sam Poo Kong dalam *Suara Merdeka* juga menunjukkan bahwa media lokal memiliki perhatian terhadap keberagaman budaya masyarakat Semarang. Pada masa Orde Baru, isu mengenai budaya Tionghoa pernah mengalami pembatasan dalam ruang publik akibat kebijakan politik

⁹⁴ Retno Wulandari, "Akulturasi Budaya Tionghoa dan Jawa di Kota Semarang," *Jurnal Humanika*, Vol. 22, No. 1, 2015, hlm. 45.

⁹⁵ Aulia Rahman, "Fotografi sebagai Sumber dalam Penelitian Sejarah Sosial," *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol. 14, No. 2, 2020, hlm. 118.

pemerintah terhadap etnis Tionghoa.⁹⁶ Akan tetapi, menjelang akhir masa Orde Baru mulai muncul ruang yang lebih terbuka terhadap ekspresi budaya etnis di masyarakat. Konteks tersebut, pemberitaan mengenai pawai Sam Poo Kong memperlihatkan adanya perubahan sosial yang mulai memberikan ruang bagi budaya Tionghoa untuk tampil kembali di ruang publik Kota Semarang.

Selain itu, artikel tersebut memperlihatkan bahwa budaya lokal mulai diposisikan sebagai bagian dari daya tarik kota. Keramaian pengunjung dan besarnya perhatian masyarakat terhadap pawai budaya menunjukkan bahwa kegiatan tradisional memiliki potensi sosial dan budaya yang besar bagi perkembangan kota.⁹⁷ Melalui pemberitaan seperti ini, *Suara Merdeka* tidak hanya menyampaikan informasi mengenai kegiatan budaya, tetapi juga membangun pandangan masyarakat bahwa tradisi lokal merupakan bagian penting dari identitas dan kehidupan sosial Kota Semarang.

Dengan demikian, artikel “*Pengunjung Pawai Sam Poo Membeludak*” menunjukkan bahwa konten sosial budaya dalam *Suara Merdeka* berfungsi sebagai sarana dokumentasi kehidupan masyarakat Semarang yang multikultural. Pemberitaan tersebut memperlihatkan bagaimana budaya lokal dan tradisi masyarakat tetap bertahan di tengah perubahan sosial perkotaan serta menunjukkan bahwa media lokal memiliki peran penting dalam merekam dan memperkuat identitas budaya masyarakat daerah.⁹⁸

4.2.3 Konten Artikel Politik Pembangunan

Pembangunan pada masa orde baru menjadi salah satu tema utama yang terus ditampilkan dalam media massa, termasuk dalam surat kabar *Suara Merdeka*. Pemerintah Orde Baru menempatkan pembangunan sebagai bagian penting dari

⁹⁶ M. Syaifulloh, “Kebijakan Pemerintah Orde Baru terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia Tahun 1967–1998,” *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 97.

⁹⁷ Rina Febriani, “Pariwisata Budaya dan Identitas Kota dalam Perspektif Sejarah Sosial,” *Jurnal Patanjala*, Vol. 11, No. 3, 2019, hlm. 367

⁹⁸ Yulianus Indrajaya, “Pers Lokal dan Representasi Budaya Masyarakat Daerah,” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 8, No. 1, 2011, hlm. 74.

legitimasi kekuasaan negara sehingga berbagai proyek pembangunan sering dipublikasikan melalui media sebagai simbol keberhasilan pemerintah. Kondisi pers yang berada di bawah pengawasan melalui kebijakan SIUPP, pemberitaan mengenai pembangunan menjadi salah satu tema yang relatif aman karena sejalan dengan agenda pemerintah. Oleh karena itu, media massa lebih banyak menampilkan berita mengenai pembangunan infrastruktur, modernisasi kota, dan peningkatan fasilitas publik dibandingkan kritik politik yang bersifat terbuka terhadap negara.⁹⁹

Pemberitaan politik pembangunan dalam *Suara Merdeka* umumnya berkaitan dengan pembangunan jalan tol, jalan arteri, jalan lingkar, kawasan perkotaan, serta berbagai proyek infrastruktur yang berkembang di Kota Semarang dan Jawa Tengah. Pembangunan tersebut diposisikan sebagai bentuk kemajuan daerah sekaligus simbol modernisasi yang sedang dijalankan pemerintah Orde Baru. Pembangunan tidak hanya dipahami sebagai proses fisik semata, tetapi juga sebagai bagian dari pembentukan citra negara yang modern, tertib, dan maju.¹⁰⁰ Melalui proyek-proyek pembangunan, pemerintah berusaha menunjukkan keberhasilannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat stabilitas nasional.

Sebagai surat kabar daerah, *Suara Merdeka* memiliki kedekatan yang cukup kuat dengan dinamika pembangunan di wilayah Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang. Kedekatan tersebut terlihat dari banyaknya pemberitaan mengenai proyek pembangunan jalan, transportasi, dan tata kota yang secara langsung memengaruhi kehidupan masyarakat. Melalui pemberitaan pembangunan, *Suara Merdeka* tidak hanya menjalankan fungsi informasi, tetapi juga menjadi media yang mendokumentasikan perubahan sosial dan fisik kota pada masa Orde Baru.¹⁰¹ Akan

⁹⁹ R. Siti Zuhro, "Pers dan Negara pada Masa Orde Baru," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 5, No. 1, 2008, hlm. 24.

¹⁰⁰ Ahmad Nashih Luthfi, "Pembangunan dan Modernisasi pada Masa Orde Baru," *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 15.

¹⁰¹ Budi Setiyono, "Media Lokal dan Dinamika Pembangunan Daerah," *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol. 4, No. 2, 2011, hlm. 89.

tetapi, di balik pemberitaan yang tampak mendukung pembangunan tersebut, terdapat realitas sosial yang menunjukkan bagaimana pembangunan sering kali berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, seperti perubahan tata ruang kota, pembebasan lahan, hingga perubahan aktivitas sosial masyarakat perkotaan.

Sistem pers Orde Baru, media massa cenderung berhati-hati dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah sehingga persoalan pembangunan lebih sering diberitakan dari sisi keberhasilan dan kemajuan proyek. Kritik terhadap pembangunan tidak disampaikan secara langsung, melainkan muncul secara tersirat melalui pemberitaan mengenai keterlambatan proyek, persoalan pembebasan tanah, kemacetan, maupun keresahan masyarakat terhadap dampak pembangunan infrastruktur.¹⁰² Dengan demikian, pemberitaan pembangunan dalam *Suara Merdeka* tidak hanya memperlihatkan dukungan terhadap program pemerintah, tetapi juga menjadi gambaran mengenai perubahan sosial masyarakat perkotaan pada masa Orde Baru.

¹⁰² M. Nursam, "Kebijakan Pers pada Masa Orde Baru," *Jurnal Historia*, Vol. 6, No. 1, 2018, hlm. 57.



Gambar 4.13 “Penyediaan Jalan By Pass dan Tol Dirasakan Mendesak”

Sumber: Surat kabar *Suara Merdeka* No.06, 13 Februari 1984.

Artikel berjudul “*Penyediaan Jalan By Pass dan Tol Dirasakan Mendesak*” menunjukkan bagaimana *Suara Merdeka* memberitakan pembangunan infrastruktur jalan sebagai bagian dari upaya modernisasi Kota Semarang pada masa Orde Baru. Artikel tersebut menjelaskan bahwa pembangunan jalan *by pass* dan jalan tol dipandang penting untuk mengatasi kemacetan lalu lintas yang semakin meningkat akibat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Kota

Semarang.¹⁰³ Pemberitaan ini memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi mulai menjadi perhatian utama pemerintah daerah seiring berkembangnya aktivitas ekonomi dan urbanisasi perkotaan pada dekade 1980-an.

Isi artikel juga menunjukkan bahwa pembangunan jalan tidak hanya dipahami sebagai proyek fisik, tetapi juga sebagai solusi terhadap persoalan sosial dan ekonomi masyarakat kota. Kemacetan lalu lintas dipandang menghambat aktivitas masyarakat serta memengaruhi kelancaran distribusi barang dan mobilitas penduduk.¹⁰⁴ Oleh sebab itu, pembangunan jalan *by pass* dan jalan tol diposisikan sebagai simbol kemajuan kota yang diharapkan mampu menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib dan modern. Pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan jalan tol menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional yang digunakan pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan modernisasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemberitaan tersebut juga memperlihatkan bagaimana media lokal mendukung narasi pembangunan yang dibentuk pemerintah. Pada masa Orde Baru, media massa cenderung menampilkan pembangunan dari sisi manfaat dan keberhasilan proyek sehingga pemberitaan mengenai pembangunan jalan lebih banyak diarahkan pada pentingnya modernisasi transportasi kota.¹⁰⁵ Akan tetapi, di balik narasi pembangunan tersebut sebenarnya terdapat persoalan sosial yang muncul akibat pertumbuhan kota yang semakin pesat, seperti meningkatnya jumlah kendaraan, kepadatan lalu lintas, dan perubahan tata ruang perkotaan. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya memperlihatkan keberhasilan pembangunan, tetapi juga menggambarkan perubahan sosial masyarakat perkotaan Semarang pada masa itu.

¹⁰³ *Suara Merdeka*, “Penyediaan Jalan By Pass dan Tol Dirasakan Mendesak,” No.06, 13 Februari 1984.

¹⁰⁴ Ahmad Nashih Luthfi, “Pembangunan dan Modernisasi pada Masa Orde Baru,” *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 18.

¹⁰⁵ R. Siti Zuhro, “Pers dan Negara pada Masa Orde Baru,” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 5, No. 1, 2008, hlm. 27.

Selain itu, artikel tersebut menunjukkan bahwa pembangunan jalan mulai dipandang sebagai kebutuhan mendesak bagi masyarakat perkotaan. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan meningkatnya mobilitas masyarakat menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian terhadap infrastruktur kota.¹⁰⁶ Pembangunan jalan tol dan by pass menjadi simbol perubahan menuju kota modern yang lebih teratur dan efisien. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pembangunan Orde Baru yang menempatkan infrastruktur sebagai bagian penting dalam mendukung stabilitas ekonomi dan pertumbuhan daerah.

Pemberitaan mengenai pembangunan jalan dalam *Suara Merdeka* juga memperlihatkan bagaimana media lokal berfungsi sebagai sarana dokumentasi perubahan fisik kota. Melalui artikel seperti ini, surat kabar tidak hanya menyampaikan informasi mengenai proyek pemerintah, tetapi juga merekam perkembangan Kota Semarang yang terus mengalami modernisasi.¹⁰⁷ Dokumentasi mengenai pembangunan jalan menjadi penting karena menunjukkan perubahan wajah kota serta transformasi kehidupan masyarakat perkotaan akibat berkembangnya pembangunan infrastruktur pada masa Orde Baru.

Dengan demikian, artikel “*Penyediaan Jalan By Pass dan Tol Dirasakan Mendesak*” menunjukkan bahwa konten politik pembangunan dalam *Suara Merdeka* tidak hanya berisi informasi mengenai proyek infrastruktur, tetapi juga memperlihatkan bagaimana pembangunan digunakan sebagai simbol modernisasi kota dan kemajuan daerah. Pemberitaan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa media lokal memiliki peran penting dalam merekam perubahan sosial dan fisik masyarakat Semarang di tengah proses pembangunan yang berlangsung pada masa Orde Baru.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Bambang Triatmodjo, “Perkembangan Infrastruktur Transportasi dan Pertumbuhan Kota,” *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 10, No. 2, 2003, hlm. 95.

¹⁰⁷ Budi Setiyono, “Media Lokal dan Dinamika Pembangunan Daerah,” *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol. 4, No. 2, 2011, hlm. 91.

¹⁰⁸ M. Nursam, “Kebijakan Pers pada Masa Orde Baru,” *Jurnal Historia*, Vol. 6, No. 1, 2018, hlm. 60.



Gambar 4.14 “Jalan Tol Semarang–Bawen Bukan Prioritas untuk Segera Dibangun”

Sumber: Surat kabar *Suara Merdeka* No.01, 22 September 1990.

Artikel berjudul “*Jalan Tol Semarang–Bawen Bukan Prioritas untuk Segera Dibangun*” menunjukkan bagaimana pembangunan infrastruktur jalan menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan pada masa Orde Baru. Artikel tersebut Menjelaskan bahwa pembangunan jalan tol Semarang–Bawen belum dijadikan prioritas utama karena pemerintah masih mempertimbangkan kondisi lalu lintas dan kebutuhan transportasi di wilayah tersebut.¹⁰⁹ Pemberitaan ini

¹⁰⁹ *Suara Merdeka*, “Jalan Tol Semarang–Bawen Bukan Prioritas untuk Segera Dibangun”, No.01, 22 September 1990.

memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur pada masa Orde Baru dilakukan melalui proses perencanaan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, perkembangan kota, dan kebutuhan mobilitas masyarakat. Jalan tol dipandang sebagai bagian dari modernisasi transportasi yang diharapkan mampu mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan distribusi barang antardaerah.

Isi artikel juga memperlihatkan bahwa pembangunan jalan tol tidak hanya dipahami sebagai proyek fisik, tetapi juga sebagai simbol kemajuan daerah. Pada masa Orde Baru, pembangunan infrastruktur sering digunakan pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pembangunan nasional dan modernisasi kota.¹¹⁰ Jalan raya, jalan tol, dan fasilitas transportasi lainnya diposisikan sebagai bagian dari upaya menciptakan kota yang tertib, maju, dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemberitaan mengenai pembangunan jalan dalam *Suara Merdeka* lebih banyak menampilkan sisi perencanaan, kebutuhan pembangunan, dan harapan terhadap kemajuan daerah dibandingkan kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Pemberitaan tersebut juga menunjukkan bahwa Kota Semarang mengalami perkembangan mobilitas dan pertumbuhan wilayah yang cukup pesat pada dekade 1980–1990-an. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan meningkatnya aktivitas perdagangan menyebabkan kebutuhan terhadap infrastruktur jalan semakin besar.¹¹¹ Pembangunan jalan tol Semarang–Bawen dipandang sebagai bagian dari pengembangan kawasan transportasi yang dapat memperlancar hubungan antara Semarang dengan wilayah di sekitarnya. Akan tetapi, artikel ini memperlihatkan bahwa pemerintah tetap melakukan penyesuaian terhadap prioritas pembangunan berdasarkan kondisi ekonomi dan kebutuhan daerah sehingga tidak semua proyek dapat langsung direalisasikan.

Selain itu, artikel tersebut memperlihatkan bagaimana media lokal berfungsi sebagai sarana penyampaian kebijakan pembangunan kepada masyarakat. Pada masa Orde Baru, media massa cenderung menempatkan

¹¹⁰ R. Widodo Dwi Putro, “Ideologi Pembangunan Orde Baru dalam Perspektif Sejarah,” *Jurnal Agastya*, Vol. 8, No. 2, 2018, hlm. 134.

¹¹¹ Siti Mutmainah, “Perkembangan Infrastruktur Transportasi dan Perubahan Kota Semarang Tahun 1970–1990,” *Jurnal Paramita*, Vol. 24, No. 1, 2014, hlm. 92.

pembangunan sebagai sesuatu yang positif dan mendukung stabilitas nasional.¹¹² Situasi pers yang berada di bawah pengawasan pemerintah melalui kebijakan SIUPP, surat kabar lebih berhati-hati dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan negara. Oleh sebab itu, pemberitaan pembangunan dalam *Suara Merdeka* lebih banyak diarahkan pada penyampaian informasi mengenai rencana proyek, manfaat pembangunan, dan perkembangan kota dibandingkan kritik politik yang bersifat terbuka.

Pemberitaan mengenai jalan tol Semarang–Bawen juga memperlihatkan perubahan sosial masyarakat perkotaan akibat proses pembangunan infrastruktur. Berkembangnya transportasi jalan raya menyebabkan pola mobilitas masyarakat menjadi semakin tinggi dan mempercepat perubahan tata ruang kota.¹¹³ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan jalan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga memengaruhi kehidupan sosial masyarakat perkotaan. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menggambarkan kebijakan pembangunan pemerintah, tetapi juga memperlihatkan dinamika perubahan sosial Kota Semarang pada masa Orde Baru.

Dengan demikian, artikel “*Jalan Tol Semarang–Bawen Bukan Prioritas untuk Segera Dibangun*” menunjukkan bahwa konten politik pembangunan dalam *Suara Merdeka* memiliki fungsi sebagai media informasi sekaligus dokumentasi perkembangan pembangunan daerah. Pemberitaan tersebut memperlihatkan bagaimana pembangunan infrastruktur diposisikan sebagai simbol modernisasi kota serta menunjukkan peran media lokal dalam merekam perubahan sosial dan perkembangan fisik Kota Semarang pada masa Orde Baru.¹¹⁴

¹¹² Nurudin, “Pers dan Hegemoni Kekuasaan pada Masa Orde Baru,” *Jurnal Komunikasi*, Vol. 9, No. 1, 2015, hlm. 41.

¹¹³ M. Fakhri Hunaini, “Modernisasi Kota dan Mobilitas Sosial Masyarakat Perkotaan,” *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 11, No. 2, 2020, hlm. 118.

¹¹⁴ Dimas Prasetyo, “Media Lokal dalam Wacana Pembangunan Daerah,” *Jurnal Kajian Jurnalisme*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 67.



Gambar 4.15 “Jalan Lingkar Semarang Selesai”

Sumber: Surat kabar *Suara Merdeka* No.06, 23 Mei 1981.

Artikel berjudul “*Jalan Lingkar Semarang Selesai*” menunjukkan bagaimana pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu fokus utama pembangunan daerah pada masa Orde Baru. Artikel tersebut menjelaskan bahwa proyek pembangunan jalan lingkar di Semarang mengalami perkembangan yang cukup signifikan dan telah mencapai tahap penyelesaian fisik tertentu.¹¹⁵ Pemberitaan ini memperlihatkan bahwa pembangunan jalan diposisikan sebagai bagian penting dari upaya pemerintah dalam mendukung kelancaran transportasi dan perkembangan wilayah perkotaan. Jalan lingkar dipandang mampu mengurangi kepadatan lalu lintas di pusat kota sekaligus memperlancar hubungan antarwilayah di sekitar Semarang.

¹¹⁵ *Suara Merdeka*, “Jalan Lingkar Semarang Selesai”, No.06, 23 Mei 1981.

Isi artikel juga menunjukkan bahwa pembangunan jalan menjadi simbol kemajuan dan modernisasi kota pada masa Orde Baru. Pemerintah menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai bagian dari program pembangunan nasional yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan mobilitas masyarakat.¹¹⁶ Pembangunan jalan lingkar Semarang tidak hanya dipahami sebagai proyek teknis, tetapi juga sebagai representasi keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, pemberitaan mengenai proyek jalan lebih banyak diarahkan pada perkembangan pembangunan dan pencapaian target proyek dibandingkan pembahasan mengenai dampak sosial yang mungkin muncul di masyarakat.

Pemberitaan mengenai jalan lingkar Semarang juga memperlihatkan perubahan tata ruang kota akibat proses urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang berlangsung pada dekade 1980-an. Berkembangnya aktivitas perdagangan, industri, dan transportasi menyebabkan kebutuhan terhadap jalur distribusi dan mobilitas kendaraan semakin meningkat.¹¹⁷ Pembangunan jalan lingkar menjadi bagian dari penyesuaian kota terhadap pertumbuhan jumlah kendaraan dan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menggambarkan pembangunan fisik kota, tetapi juga menunjukkan perubahan sosial masyarakat perkotaan yang semakin bergantung pada perkembangan infrastruktur transportasi.

Selain itu, artikel tersebut memperlihatkan bagaimana media lokal berperan dalam mendukung narasi pembangunan pemerintah. Pada masa Orde Baru, media massa cenderung memosisikan pembangunan sebagai bentuk kemajuan nasional yang harus didukung masyarakat.¹¹⁸ Oleh karena itu,

¹¹⁶ Agus Salim, "Pembangunan Infrastruktur pada Masa Orde Baru dan Dampaknya terhadap Perkembangan Kota," *Jurnal Forum Ilmu Sosial*, Vol. 39, No. 2, 2012, hlm. 156.

¹¹⁷ Nurdien H. Kistanto, "Urbanisasi dan Perubahan Struktur Kota di Indonesia," *Jurnal Sabda*, Vol. 7, No. 1, 2012, hlm. 44.

¹¹⁸ Sumarno, "Pers dan Wacana Pembangunan pada Masa Orde Baru," *Jurnal ASPIKOM*, Vol. 1, No. 2, 2010, hlm. 129.

pemberitaan mengenai pembangunan jalan dalam *Suara Merdeka* lebih banyak menampilkan optimisme terhadap keberhasilan proyek pembangunan dan manfaatnya bagi masyarakat. Situasi pers yang berada di bawah pengawasan pemerintah, kritik terhadap pembangunan umumnya tidak disampaikan secara terbuka, melainkan muncul secara tersirat melalui pembahasan mengenai hambatan teknis atau keterlambatan proyek.

Pemberitaan tentang pembangunan jalan lingkar juga memperlihatkan bahwa *Suara Merdeka* berfungsi sebagai media dokumentasi perkembangan Kota Semarang pada masa Orde Baru. Melalui artikel seperti ini, surat kabar tidak hanya menyampaikan informasi mengenai proyek pembangunan, tetapi juga merekam perubahan fisik kota yang terus berkembang akibat modernisasi.¹¹⁹ Dokumentasi tersebut penting karena menunjukkan bagaimana pembangunan infrastruktur menjadi bagian dari transformasi Kota Semarang menuju kota yang lebih modern dan terhubung dengan wilayah sekitarnya.

Dengan demikian, artikel "*Jalan Lingkar Semarang Selesai*" menunjukkan bahwa konten politik pembangunan dalam *Suara Merdeka* memiliki fungsi sebagai sarana informasi sekaligus dokumentasi perkembangan kota pada masa Orde Baru. Pemberitaan tersebut memperlihatkan bagaimana pembangunan jalan diposisikan sebagai simbol modernisasi dan kemajuan daerah serta menunjukkan peran media lokal dalam merekam perubahan sosial dan fisik masyarakat Semarang di tengah agenda pembangunan nasional pemerintah.¹²⁰

¹¹⁹ Eko Handoyo, "Perkembangan Kota dan Infrastruktur Transportasi di Jawa Tengah," *Jurnal Integralistik*, Vol. 24, No. 1, 2013, hlm. 73.

¹²⁰ Fajar Junaedi, "Media Lokal dan Konstruksi Pembangunan Daerah," *Jurnal Komunikator*, Vol. 6, No. 1, 2014, hlm. 58.



Gambar 4.16 "Terminal Bis Terboyo Akhir Mei Dioperasikan"

Sumber: Surat kabar *Suara Merdeka* No. 06, 15 April 1985.

Artikel berjudul "*Terminal Bis Terboyo Akhir Mei Dioperasikan*" menunjukkan bagaimana pembangunan fasilitas transportasi menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan perkotaan pada masa Orde Baru. Artikel tersebut menjelaskan bahwa Terminal Bis Terboyo di Semarang direncanakan mulai dioperasikan setelah proses pelebaran jalan dan penyelesaian fasilitas

pendukung selesai dilakukan.¹²¹ Pemberitaan ini memperlihatkan bahwa pembangunan terminal tidak hanya dipahami sebagai penyediaan fasilitas transportasi umum, tetapi juga sebagai bagian dari modernisasi sistem transportasi kota yang berkembang pesat pada dekade 1980-an.

Isi artikel juga menunjukkan bahwa pembangunan terminal berkaitan erat dengan pertumbuhan mobilitas masyarakat dan meningkatnya aktivitas ekonomi perkotaan. Terminal Terboyo diposisikan sebagai pusat transportasi yang mampu mendukung kelancaran arus kendaraan dan distribusi penumpang di Kota Semarang.¹²² Pembangunan Orde Baru, pembangunan fasilitas transportasi seperti terminal, jalan raya, dan jalan tol menjadi bagian dari upaya pemerintah menciptakan kota yang tertib, modern, dan terintegrasi dengan wilayah sekitarnya. Oleh sebab itu, pembangunan infrastruktur transportasi sering dipublikasikan melalui media sebagai simbol kemajuan daerah dan keberhasilan pembangunan pemerintah.

Pemberitaan tersebut juga memperlihatkan bahwa pembangunan kota pada masa Orde Baru sering kali berkaitan dengan perubahan tata ruang dan penyesuaian terhadap perkembangan urbanisasi. Pelebaran jalan di sekitar Terminal Terboyo menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk menyesuaikan infrastruktur kota dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan aktivitas masyarakat.¹²³ Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan Kota Semarang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan fasilitas transportasi yang mendukung mobilitas masyarakat perkotaan. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menggambarkan pembangunan fisik kota, tetapi juga memperlihatkan perubahan sosial akibat berkembangnya aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk perkotaan.

¹²¹ *Suara Merdeka*, “Terminal Bis Terboyo Akhir Mei Dioperasikan”, No. 06, 15 April 1985.

¹²² Hendra Kurniawan, “Transportasi Perkotaan dan Modernisasi Kota pada Masa Orde Baru,” *Jurnal Candrasangkala*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 62.

¹²³ Arif Budi Santoso, “Urbanisasi dan Perubahan Tata Ruang Kota Semarang Tahun 1970–1990,” *Jurnal Paramita*, Vol. 20, No. 2, 2010, hlm. 145.

Selain itu, artikel tersebut memperlihatkan bagaimana media lokal berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat. Pada masa Orde Baru, media massa cenderung menampilkan pembangunan sebagai bentuk kemajuan nasional yang harus didukung bersama.¹²⁴ Oleh karena itu, pemberitaan mengenai pengoperasian Terminal Terboyo lebih banyak menekankan manfaat pembangunan bagi masyarakat dibandingkan persoalan yang mungkin muncul akibat proyek tersebut. Kondisi pers yang berada di bawah pengawasan pemerintah, media lokal seperti *Suara Merdeka* cenderung berhati-hati dalam menyampaikan kritik sehingga pemberitaan pembangunan lebih diarahkan pada optimisme terhadap kemajuan kota dan peningkatan fasilitas publik.

Pemberitaan mengenai Terminal Terboyo juga memperlihatkan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi menjadi bagian dari transformasi Kota Semarang menuju kota modern. Terminal tidak hanya berfungsi sebagai tempat keberangkatan dan kedatangan kendaraan umum, tetapi juga menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat.¹²⁵ Kehadiran terminal baru mampu memengaruhi perkembangan kawasan di sekitarnya, seperti munculnya aktivitas perdagangan, jasa transportasi, dan pertumbuhan wilayah perkotaan baru. Oleh sebab itu, pembangunan terminal pada masa Orde Baru memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat kota.

Dengan demikian, artikel "*Terminal Bis Terboyo Akhir Mei Dioperasikan*" menunjukkan bahwa konten politik pembangunan dalam *Suara Merdeka* tidak hanya memuat informasi mengenai proyek infrastruktur, tetapi juga memperlihatkan bagaimana pembangunan transportasi digunakan sebagai simbol modernisasi dan kemajuan daerah. Pemberitaan tersebut sekaligus menunjukkan

¹²⁴ M. Alfian, "Pers Indonesia pada Masa Orde Baru," *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No. 1, 2006, hlm. 37.

¹²⁵ Dian Pratiwi, "Peran Terminal dalam Perkembangan Sosial Ekonomi Wilayah Perkotaan," *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 119.

peran media lokal dalam merekam perubahan sosial dan perkembangan fisik Kota Semarang pada masa Orde Baru.¹²⁶



Gambar 4.17 “Hari Pertama di Terminal Terboyo: Semua Berjalan Tertib Meski Ada Kekurangan”

Sumber: Surat kabar *Suara Merdeka* No.06, 11 Juni 1985.

Artikel berjudul “*Hari Pertama di Terminal Terboyo: Semua Berjalan Tertib Meski Ada Kekurangan*” menunjukkan bagaimana *Suara Merdeka* memberitakan pengoperasian Terminal Terboyo sebagai bagian dari perkembangan infrastruktur transportasi Kota Semarang pada masa Orde Baru. Artikel tersebut

¹²⁶ Rizki Setiawan, “Media Lokal dan Wacana Pembangunan Kota,” *Jurnal Kajian Media*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 54.

menjelaskan bahwa pada hari pertama pengoperasian terminal, kondisi lalu lintas dan aktivitas transportasi berjalan cukup tertib meskipun masih terdapat beberapa kekurangan fasilitas dan kendala teknis di lapangan.¹²⁷ Pemberitaan ini memperlihatkan bahwa pembangunan fasilitas transportasi tidak hanya dipahami sebagai proyek fisik, tetapi juga sebagai simbol kemajuan dan modernisasi kota yang sedang berkembang pada dekade 1980-an.

Isi artikel juga menunjukkan bahwa pengoperasian Terminal Terboyo berkaitan erat dengan upaya pemerintah dalam menciptakan sistem transportasi kota yang lebih teratur dan efisien. Terminal diposisikan sebagai pusat mobilitas masyarakat yang mampu mengurangi kepadatan lalu lintas di pusat kota serta memperlancar aktivitas transportasi antarkota maupun dalam kota.¹²⁸ Pembangunan terminal dan sarana transportasi lainnya menjadi bagian dari agenda modernisasi perkotaan yang bertujuan mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Oleh karena itu, pemberitaan mengenai terminal lebih banyak diarahkan pada manfaat pembangunan bagi masyarakat serta keberhasilan pemerintah dalam menyediakan fasilitas publik.

Foto yang dimuat dalam artikel memperlihatkan kondisi Terminal Terboyo yang dipenuhi bus dan aktivitas masyarakat pada masa awal pengoperasian. Kehadiran dokumentasi visual tersebut memiliki makna penting karena mampu menunjukkan secara langsung perubahan fisik kota akibat pembangunan infrastruktur transportasi.¹²⁹ Selain itu, gambar denah terminal yang dimuat dalam surat kabar menunjukkan adanya upaya media untuk memberikan informasi secara detail kepada masyarakat mengenai tata letak dan sistem operasional terminal baru. Hal tersebut memperlihatkan bahwa media lokal tidak

¹²⁷ *Suara Merdeka*, “Hari Pertama di Terminal Terboyo: Semua Berjalan Tertib Meski Ada Kekurangan”, No.06, 11 Juni 1985.

¹²⁸ Agus Joko Purwanto, “Modernisasi Transportasi Perkotaan pada Masa Orde Baru,” *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol. 13, No. 1, 2019, hlm. 88.

¹²⁹ Dian Kusumaningrum, “Foto Jurnalistik sebagai Sumber Sejarah Sosial Perkotaan,” *Jurnal Historia Madania*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 132.

hanya menyampaikan berita, tetapi juga membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan fasilitas publik yang muncul akibat pembangunan kota.

Pemberitaan tersebut juga memperlihatkan bagaimana pembangunan infrastruktur perkotaan memengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Pengoperasian Terminal Terboyo menyebabkan perubahan pola mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi di kawasan sekitar terminal.¹³⁰ Kehadiran terminal baru biasanya diikuti dengan berkembangnya aktivitas perdagangan, jasa transportasi, dan munculnya kawasan ekonomi baru di sekitarnya. Dengan demikian, artikel ini tidak hanya menggambarkan pembangunan fasilitas transportasi, tetapi juga menunjukkan perubahan sosial masyarakat perkotaan akibat modernisasi kota pada masa Orde Baru.

Selain itu, artikel tersebut memperlihatkan bagaimana media lokal mendukung narasi pembangunan pemerintah. Pada masa Orde Baru, media massa cenderung menampilkan pembangunan sebagai bentuk kemajuan nasional yang harus didukung masyarakat.¹³¹ Oleh sebab itu, meskipun artikel menyebutkan masih adanya kekurangan fasilitas dan kendala teknis di Terminal Terboyo, pemberitaan tetap menonjolkan bahwa pengoperasian terminal berjalan tertib dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kondisi pers yang berada di bawah pengawasan pemerintah, media lebih berhati-hati dalam menyampaikan kritik sehingga persoalan pembangunan biasanya disampaikan secara tidak langsung dan tetap dibingkai dalam narasi optimisme pembangunan.

Dengan demikian, artikel *“Hari Pertama di Terminal Terboyo: Semua Berjalan Tertib Meski Ada Kekurangan”* menunjukkan bahwa konten politik pembangunan dalam *Suara Merdeka* tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi mengenai proyek pemerintah, tetapi juga menjadi dokumentasi perubahan sosial dan fisik Kota Semarang pada masa Orde Baru. Pemberitaan tersebut memperlihatkan bagaimana pembangunan transportasi diposisikan sebagai

¹³⁰ Ratna Widyaningsih, “Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pembangunan Infrastruktur Kota,” *Jurnal Sosieta*, Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 41.

¹³¹ Bambang Setiaji, “Media Massa dan Ideologi Pembangunan Orde Baru,” *Jurnal Komunikasi Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 77.

simbol modernisasi kota sekaligus menunjukkan peran media lokal dalam merekam perkembangan masyarakat perkotaan di tengah agenda pembangunan nasional pemerintah.¹³²

4.3 Dampak Konten Artikel Surat Kabar *Suara Merdeka* Terhadap Masyarakat di Semarang

4.3.1 Dampak Ekonomi Konten Artikel Surat Kabar *Suara Merdeka* Terhadap Masyarakat di Semarang

Konten artikel dalam Surat Kabar *Suara Merdeka* juga memberikan pengaruh ekonomi terhadap masyarakat Semarang selama periode 1984–1998. Pemberitaan mengenai kondisi pasar, harga kebutuhan pokok, pembangunan infrastruktur, perdagangan, dan aktivitas ekonomi masyarakat menjadikan surat kabar sebagai salah satu sumber utama informasi ekonomi masyarakat.¹³³ Informasi ekonomi yang dimuat secara rutin membantu masyarakat memahami kondisi ekonomi daerah serta perkembangan perdagangan di Semarang. Konteks tersebut, media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyampai berita, tetapi juga menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat perkotaan. Menurut McQuail, media massa memiliki fungsi ekonomi karena mampu memengaruhi pola konsumsi, distribusi informasi pasar, dan perilaku ekonomi masyarakat.¹³⁴

Salah satu dampak ekonomi yang paling terlihat adalah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok. Berbagai edisi, *Suara Merdeka* secara rutin memberitakan kondisi harga beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya di Pasar Johar maupun pasar tradisional lain di Semarang.¹³⁵ Artikel tersebut biasanya dilengkapi dengan laporan langsung dari lapangan serta wawancara dengan pedagang dan pembeli. Kehadiran berita

¹³² M. Iqbal Fadillah, “Pers Lokal dan Representasi Pembangunan Kota,” *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 54.

¹³³ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa McQuail*, Edisi keenam (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 110.

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 112.

¹³⁵ I. Imron, “Pembredelan Pers pada Masa Pemerintahan Orde Baru,” *Jurnal CANDI*, Vol. 13 No. 1 (2016), hlm. 149–154.

semacam ini membantu masyarakat mengetahui kondisi ekonomi yang sedang terjadi sehingga dapat melakukan penyesuaian terhadap pola pengeluaran rumah tangga mereka. Selain itu, pemberitaan tersebut juga menjadi sarana kontrol sosial terhadap distribusi bahan pokok di pasar tradisional. Dengan demikian, surat kabar memiliki peranan penting dalam penyebaran informasi ekonomi kepada masyarakat luas.

Pemberitaan mengenai kondisi pasar tradisional juga memberikan dampak terhadap aktivitas perdagangan masyarakat. *Suara Merdeka* sering memuat artikel mengenai distribusi barang, kondisi pedagang pasar, hingga persoalan kebersihan dan fasilitas pasar.¹³⁶ Pasar Johar sebagai pusat perdagangan utama di Semarang menjadi salah satu objek pemberitaan ekonomi yang cukup sering dimuat dalam surat kabar tersebut. Informasi mengenai kondisi pasar membantu masyarakat mengetahui perkembangan perdagangan dan ketersediaan barang kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pemberitaan mengenai aktivitas pasar juga memperlihatkan bahwa media lokal memiliki perhatian terhadap kehidupan ekonomi masyarakat kecil, khususnya pedagang tradisional. Pasar tradisional merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi masyarakat kota.¹³⁷

Dampak ekonomi lainnya terlihat dalam pemberitaan pembangunan infrastruktur daerah. Artikel mengenai pembangunan jalan raya, terminal, pelabuhan, pasar, dan fasilitas perdagangan banyak dimuat dalam *Suara Merdeka* selama periode 1980-an hingga 1990-an.¹³⁸ Pemberitaan tersebut menumbuhkan optimisme masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah karena pembangunan infrastruktur dianggap mampu meningkatkan mobilitas masyarakat dan distribusi barang. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga memperlancar aktivitas perdagangan dan jasa di Semarang. Menurut David T. Hill, media massa pada masa Orde Baru diarahkan untuk mendukung agenda pembangunan ekonomi

¹³⁶ Rudy Badil, *Sejarah Pers di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 145.

¹³⁷ Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru* (Jakarta: Gramedia, 1992), hlm. 233.

¹³⁸ Rudy Badil, *Sejarah Pers di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 142.

pemerintah melalui pemberitaan yang menonjolkan keberhasilan pembangunan nasional.¹³⁹ Oleh sebab itu, artikel pembangunan dalam *Suara Merdeka* turut membentuk persepsi masyarakat mengenai kemajuan ekonomi daerah.

Konten artikel ekonomi dalam *Suara Merdeka* juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan dunia usaha lokal. Banyak perusahaan, toko, dan pelaku usaha menggunakan surat kabar sebagai media promosi produk dan jasa kepada masyarakat.¹⁴⁰ Rubrik iklan menjadi salah satu bagian penting dalam surat kabar karena membantu mempertemukan produsen dan konsumen dalam aktivitas ekonomi. Iklan mengenai kendaraan, properti, elektronik, jasa pendidikan, hingga kebutuhan rumah tangga banyak ditemukan dalam halaman *Suara Merdeka* pada dekade 1990-an. Keberadaan iklan tersebut membantu memperluas aktivitas perdagangan dan mempercepat penyebaran informasi ekonomi di masyarakat. Teori komunikasi massa, media massa memiliki fungsi ekonomi melalui aktivitas promosi dan pemasaran yang dilakukan melalui iklan.¹⁴¹

Pertumbuhan *Suara Merdeka* sebagai media cetak daerah juga memberikan dampak ekonomi secara langsung terhadap masyarakat Semarang. Berkembangnya industri pers lokal menyebabkan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja dalam bidang jurnalistik, percetakan, distribusi koran, dan biro iklan.¹⁴² Kondisi tersebut menunjukkan bahwa media cetak bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga bagian dari aktivitas ekonomi perkotaan. Semakin besar oplah surat kabar yang beredar, maka semakin besar pula aktivitas ekonomi yang muncul di sekitar industri pers tersebut. Konteks ini, *Suara Merdeka* menjadi salah satu industri media yang turut mendorong perkembangan ekonomi lokal di Semarang.

¹³⁹ David T. Hill, *The Press in New Order Indonesia: Control and Accommodation* (Jakarta: Equinox Publishing, 1994), hlm. 88.

¹⁴⁰ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 63.

¹⁴¹ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa* McQuail, Edisi keenam (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 118.

¹⁴² David T. Hill, *The Press in New Order Indonesia: Control and Accommodation* (Jakarta: Equinox Publishing, 1994), hlm. 90.

Menjelang krisis ekonomi 1997–1998, *Suara Merdeka* mulai banyak memberitakan kondisi ekonomi nasional yang semakin memburuk.¹⁴³ Artikel mengenai naiknya harga kebutuhan pokok, melemahnya nilai rupiah, serta meningkatnya kesulitan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dalam pemberitaan surat kabar. Pemberitaan tersebut membantu masyarakat memahami dampak krisis ekonomi nasional terhadap kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, artikel mengenai kesulitan ekonomi masyarakat kecil juga membangun solidaritas sosial di tengah situasi krisis. Kondisi tersebut, media lokal berfungsi sebagai sumber informasi sekaligus dokumentasi sejarah mengenai krisis ekonomi nasional.

Pemberitaan mengenai kesulitan ekonomi masyarakat kecil juga memperlihatkan bagaimana *Suara Merdeka* mencoba menghadirkan realitas sosial-ekonomi masyarakat secara langsung.¹⁴⁴ Artikel mengenai pedagang kecil, buruh, dan masyarakat miskin perkotaan menunjukkan bahwa media lokal tidak hanya memuat berita resmi pemerintah, tetapi juga kehidupan masyarakat bawah yang terdampak krisis ekonomi. Kehadiran berita semacam ini membuat masyarakat lebih memahami kondisi ekonomi kelompok lain yang mengalami kesulitan hidup. Selain itu, pemberitaan tersebut juga memperlihatkan bahwa media memiliki fungsi sosial-ekonomi dalam membangun empati masyarakat terhadap kondisi ekonomi sesama warga.

Secara keseluruhan, keberadaan konten artikel dalam Surat Kabar *Suara Merdeka* memberikan dampak ekonomi yang cukup besar terhadap masyarakat Semarang selama periode 1984–1998. Dampak tersebut terlihat dalam meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kondisi ekonomi daerah, berkembangnya aktivitas perdagangan, meningkatnya perhatian terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok, serta tumbuhnya industri pers lokal sebagai bagian dari

¹⁴³ Melani Budianta, *Wacana dan Media: Kritik Budaya dalam Praktik* (Jakarta: Jalasutra, 2002), hlm. 81.

¹⁴⁴ Yulianus Indrajaya, *Pers Lokal dan Perubahan Sosial* (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2010), hlm. 93.

aktivitas ekonomi perkotaan.¹⁴⁵ Dengan demikian, *Suara Merdeka* tidak hanya menjadi media informasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam dinamika ekonomi masyarakat Semarang pada akhir masa Orde Baru.

4.3.2 Dampak Sosial Konten Artikel Surat Kabar *Suara Merdeka* Terhadap Masyarakat di Semarang

Keberadaan konten artikel dalam Surat Kabar *Suara Merdeka* selama periode 1984–1998 memberikan dampak sosial yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat Semarang. Sebagai surat kabar lokal terbesar di Jawa Tengah, *Suara Merdeka* tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga menjadi media pembentuk opini publik dan kesadaran sosial masyarakat.¹⁴⁶ Kedekatan media lokal dengan masyarakat membuat isi pemberitaan yang dimuat lebih mudah diterima dan dipercaya oleh pembaca. Kondisi tersebut menyebabkan berbagai artikel yang diterbitkan *Suara Merdeka* memiliki pengaruh terhadap cara masyarakat memahami persoalan sosial, pembangunan, budaya, dan kehidupan politik pada masa Orde Baru. Menurut Denis McQuail, media massa memiliki kemampuan membentuk persepsi masyarakat melalui proses penyebaran informasi yang dilakukan secara terus-menerus dan berulang.¹⁴⁷ Oleh sebab itu, isi pemberitaan dalam *Suara Merdeka* tidak hanya menjadi sumber informasi harian, tetapi juga menjadi bagian dari proses pembentukan pola pikir masyarakat Semarang selama periode 1984–1998.

Salah satu dampak sosial yang terlihat adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap persoalan urbanisasi dan perkembangan kota Semarang. Berbagai rubrik daerah dan sosial, *Suara Merdeka* sering memberitakan meningkatnya jumlah penduduk akibat arus perpindahan masyarakat desa menuju

¹⁴⁵ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa McQuail*, Edisi keenam (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 120.

¹⁴⁶ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa McQuail*, Edisi keenam (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 34.

¹⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 89.

kota.¹⁴⁸ Artikel-artikel tersebut menggambarkan kondisi permukiman padat, meningkatnya kebutuhan fasilitas umum, serta persoalan sosial yang muncul akibat perkembangan kota yang cepat. Pemberitaan tersebut membuat masyarakat lebih memahami dampak urbanisasi terhadap kehidupan sehari-hari, seperti kemacetan, kepadatan penduduk, dan munculnya kawasan kumuh di beberapa wilayah Semarang. Kehadiran berita semacam ini menunjukkan bahwa pers lokal memiliki fungsi penting dalam menyampaikan realitas sosial masyarakat secara langsung kepada publik. Menurut Yulianus Indrajaya, media lokal mampu menjadi “cermin sosial masyarakat daerah” karena kedekatannya dengan persoalan yang dihadapi masyarakat setempat.¹⁴⁹

Selain meningkatkan kesadaran terhadap persoalan urbanisasi, pemberitaan mengenai kondisi lingkungan sosial juga memberikan pengaruh terhadap perhatian masyarakat terhadap kualitas hidup perkotaan. Beberapa artikel, *Suara Merdeka* menggambarkan kondisi lingkungan permukiman yang kurang layak, sanitasi buruk, serta terbatasnya fasilitas air bersih di kawasan padat penduduk¹⁵⁰. Artikel tersebut tidak hanya memuat data dan laporan kondisi lapangan, tetapi juga menghadirkan suara masyarakat melalui wawancara langsung dengan warga. Kehadiran suara masyarakat dalam pemberitaan memperlihatkan bahwa *Suara Merdeka* masih menjalankan fungsi sosial pers sebagai media yang dekat dengan kehidupan rakyat. Kondisi tersebut membuat masyarakat lebih peka terhadap persoalan lingkungan dan kesehatan sosial di perkotaan. Teori Komunikasi massa, media memiliki kemampuan untuk membangun kesadaran kolektif masyarakat terhadap suatu masalah sosial melalui intensitas pemberitaan yang terus dilakukan.¹⁵¹

¹⁴⁸ Yulianus Indrajaya, *Pers Lokal dan Perubahan Sosial* (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2010), hlm. 73.

¹⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 67.

¹⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 75.

¹⁵¹ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa McQuail*, Edisi keenam (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 92.

Dampak sosial lainnya terlihat dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah. Banyak artikel dalam *Suara Merdeka* yang memuat kritik masyarakat mengenai pelayanan publik, kerusakan jalan, banjir, dan kondisi transportasi umum di Semarang.¹⁵² Pemberitaan tersebut secara tidak langsung menjadi bentuk kontrol sosial terhadap pemerintah daerah karena berbagai keluhan masyarakat dapat diketahui secara luas oleh publik. Dengan adanya pemberitaan tersebut, pemerintah daerah memperoleh tekanan moral untuk memperbaiki fasilitas publik yang dianggap bermasalah oleh masyarakat. Fungsi kontrol sosial media massa merupakan salah satu ciri penting pers modern, terutama dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah.¹⁵³ Oleh karena itu, *Suara Merdeka* tidak hanya berperan sebagai penyampai berita, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah daerah.

Bidang Pendidikan, konten artikel *Suara Merdeka* juga memberikan pengaruh sosial yang cukup besar terhadap masyarakat Semarang. Surat kabar ini secara rutin memuat berita mengenai pembangunan sekolah, kegiatan pendidikan, prestasi pelajar, hingga persoalan pendidikan di Jawa Tengah¹⁵⁴. Artikel-artikel tersebut membantu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan sebagai sarana peningkatan kualitas hidup dan pembangunan sosial masyarakat. Selain itu, pemberitaan mengenai pendidikan juga memperlihatkan bahwa media lokal memiliki perhatian terhadap perkembangan generasi muda pada masa Orde Baru. Menurut Burhan Bungin, media massa berfungsi sebagai sarana pendidikan sosial karena mampu menyebarkan nilai dan pengetahuan kepada masyarakat luas.¹⁵⁵ Oleh sebab itu, isi pemberitaan pendidikan dalam *Suara Merdeka* turut memengaruhi pola pikir masyarakat mengenai pentingnya pendidikan formal.

¹⁵² Rudy Badil, *Sejarah Pers di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 142.

¹⁵³ Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 40.

¹⁵⁴ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 99.

¹⁵⁵ Burhan Bungin, *loc.cit.*

Konten artikel budaya yang dimuat dalam *Suara Merdeka* juga memberikan dampak sosial terhadap pelestarian identitas budaya masyarakat Jawa Tengah. Berbagai artikel mengenai kesenian tradisional, wayang, budaya Jawa, tradisi daerah, dan kegiatan budaya lokal sering dimuat dalam rubrik budaya dan hiburan.¹⁵⁶ Pemberitaan tersebut membantu menjaga keberadaan budaya lokal di tengah perkembangan modernisasi dan budaya populer perkotaan. Budaya lokal merupakan bagian penting dari identitas sosial masyarakat yang harus dipertahankan. Kehadiran media lokal yang memuat artikel budaya menunjukkan bahwa pers tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi politik dan ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pelestarian budaya daerah. Menurut Onong Uchjana Effendy, media lokal memiliki kemampuan mempertahankan identitas sosial masyarakat karena kedekatannya dengan budaya daerah tempat media tersebut berkembang.¹⁵⁷

Selain memberikan pengaruh terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat, *Suara Merdeka* juga berperan dalam membentuk opini publik mengenai stabilitas nasional dan pembangunan pada masa Orde Baru. Sebagian besar konten artikel politik yang dimuat cenderung mendukung narasi pembangunan pemerintah dan menekankan pentingnya stabilitas nasional.¹⁵⁸ Hal tersebut sesuai dengan karakteristik pers pada masa Orde Baru yang diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah melalui konsep pers pembangunan. Artikel mengenai kegiatan pejabat pemerintah, pembangunan daerah, serta kegiatan Golongan Karya banyak dimuat dalam bentuk berita formal dan seremonial.¹⁵⁹ Kondisi tersebut secara tidak langsung membentuk persepsi masyarakat bahwa pembangunan dan stabilitas politik merupakan prioritas utama negara. Menurut

¹⁵⁶ Yulianus Indrajaya, *Pers Lokal dan Perubahan Sosial*, hlm. 81.

¹⁵⁷ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 102.

¹⁵⁸ David T. Hill, *The Press in New Order Indonesia: Control and Accommodation* (Jakarta: Equinox Publishing, 1994), hlm. 58.

¹⁵⁹ Dahlan R. Romli, *Pers dalam Politik Orde Baru* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 41.

Stanley J. Baran, media dalam sistem politik otoriter sering digunakan untuk memperkuat legitimasi negara dan membangun dukungan masyarakat terhadap pemerintah.¹⁶⁰

Wartawan *Suara Merdeka* juga menghadirkan laporan langsung mengenai kondisi sosial masyarakat kecil, seperti pedagang pasar, buruh, dan masyarakat pinggiran kota.¹⁶¹ Kehadiran laporan semacam ini menunjukkan bahwa surat kabar tidak sepenuhnya menjadi alat propaganda pemerintah, tetapi masih memberikan ruang terhadap realitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Artikel-artikel tersebut membantu masyarakat memahami kondisi sosial kelompok ekonomi bawah yang sering mengalami kesulitan hidup di tengah pembangunan kota. Selain itu, pemberitaan tersebut juga membangun empati sosial masyarakat terhadap kelompok yang mengalami kesulitan ekonomi maupun sosial.¹⁶²

Dampak sosial lainnya terlihat dalam pemberitaan mengenai kriminalitas dan keamanan kota. *Suara Merdeka* sering memuat berita mengenai pencurian, perjudian, kenakalan remaja, dan gangguan keamanan lainnya yang terjadi di Semarang.¹⁶³ Pemberitaan tersebut memengaruhi pola pikir masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan sosial. Semakin sering suatu peristiwa diberitakan, maka semakin besar pula perhatian masyarakat terhadap persoalan tersebut. Teori agenda setting, media memiliki kemampuan menentukan isu mana yang dianggap penting oleh masyarakat melalui intensitas pemberitaan.¹⁶⁴ Oleh karena itu, pemberitaan kriminalitas dalam *Suara Merdeka* turut memengaruhi perilaku sosial masyarakat Semarang.

¹⁶⁰ Stanley J. Baran, *Pengantar Komunikasi Massa: Melek Media dan Budaya*, Edisi keenam (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 94.

¹⁶¹ Yulianus Indrajaya, *Pers Lokal dan Perubahan Sosial* (Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2010), hlm. 77.

¹⁶² Rudy Badil, *Sejarah Pers di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 150.

¹⁶³ Stanley J. Baran, *Pengantar Komunikasi Massa: Melek Media dan Budaya*, Edisi keenam (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 98.

¹⁶⁴ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa McQuail*, Edisi keenam (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 98.

Menjelang krisis ekonomi dan berakhirnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1997–1998, *Suara Merdeka* mulai banyak memberitakan kondisi sosial masyarakat yang terdampak krisis ekonomi nasional.¹⁶⁵ Artikel mengenai meningkatnya pengangguran, kesulitan ekonomi masyarakat, serta naiknya harga kebutuhan pokok menjadi bagian penting dalam pemberitaan surat kabar pada masa tersebut. Pemberitaan tersebut membuat masyarakat semakin sadar terhadap kondisi krisis yang sedang terjadi secara nasional maupun lokal. Selain itu, artikel-artikel tersebut juga menunjukkan bahwa media lokal memiliki peranan penting dalam merekam perubahan sosial masyarakat menjelang Reformasi. Dengan demikian, keberadaan konten artikel dalam *Suara Merdeka* memberikan dampak sosial yang luas terhadap kehidupan masyarakat Semarang selama periode 1984–1998.

4.3.3 Dampak Politik Pembangunan Konten Artikel Surat Kabar *Suara Merdeka* Terhadap Masyarakat di Semarang

Konten artikel politik pembangunan yang dimuat dalam *Suara Merdeka* selama periode 1984–1998 memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap pembentukan persepsi masyarakat mengenai pembangunan yang dijalankan pemerintah. Berbagai artikel mengenai pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, transportasi, dan tata kota secara konsisten menampilkan pembangunan sebagai simbol kemajuan daerah. Pemberitaan semacam ini membantu membangun pemahaman masyarakat bahwa pembangunan fisik merupakan indikator utama keberhasilan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Posisi media dalam konteks tersebut tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai sarana yang memperkenalkan dan menyebarluaskan agenda pembangunan kepada masyarakat luas.¹⁶⁶

¹⁶⁵ Melani Budianta, *Wacana dan Media: Kritik Budaya dalam Praktik* (Jakarta: Jalasutra, 2002), hlm. 84.

¹⁶⁶ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa McQuail*, Edisi Keenam (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 92.

Dampak politik pembangunan terlihat dari terbentuknya legitimasi terhadap kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Artikel-artikel yang membahas pembangunan jalan raya, terminal, pasar, pelabuhan, dan fasilitas umum lainnya menampilkan pemerintah sebagai aktor utama dalam proses modernisasi kota. Pola pemberitaan tersebut secara tidak langsung memperkuat citra pemerintah sebagai pelaksana pembangunan yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Kondisi tersebut sejalan dengan karakter pers pembangunan pada masa Orde Baru yang menempatkan media sebagai mitra pemerintah dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional.¹⁶⁷

Pemberitaan mengenai pembangunan Terminal Terboyo merupakan salah satu contoh yang menunjukkan bagaimana *Suara Merdeka* berperan dalam menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat. Artikel “Hari Pertama di Terminal Terboyo: Semua Berjalan Tertib Meski Ada Kekurangan” tidak hanya menjelaskan perpindahan aktivitas transportasi ke terminal baru, tetapi juga menampilkan pembangunan transportasi sebagai bagian dari upaya modernisasi Kota Semarang. Kehadiran berita semacam ini membantu masyarakat memahami tujuan pembangunan yang dilakukan pemerintah serta mendorong penerimaan masyarakat terhadap perubahan tata ruang perkotaan.¹⁶⁸

Dampak lainnya terlihat pada meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya fasilitas publik dan pelayanan perkotaan. Berbagai artikel pembangunan yang dimuat dalam *Suara Merdeka* sering kali memuat informasi mengenai kondisi jalan, terminal, pasar, drainase, dan sarana transportasi umum. Penyebaran informasi tersebut membuat masyarakat lebih memahami berbagai program pembangunan yang sedang berlangsung sekaligus meningkatkan perhatian terhadap kualitas pelayanan publik. Fungsi media dalam konteks ini tidak hanya mendukung pembangunan, tetapi juga menjadi sarana komunikasi antara

¹⁶⁷ David T. Hill, *The Press in New Order Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 62–66.

¹⁶⁸ *Suara Merdeka*, “Hari Pertama di Terminal Terboyo: Semua Berjalan Tertib Meski Ada Kekurangan”, No. 08, 1985.

pemerintah dan masyarakat mengenai pelaksanaan program pembangunan daerah.¹⁶⁹

Konten artikel politik pembangunan juga berfungsi sebagai instrumen pembentukan opini publik mengenai arah pembangunan kota. Intensitas pemberitaan mengenai proyek pembangunan membuat masyarakat semakin mengenal berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan modernisasi perkotaan. Teori agenda setting menjelaskan bahwa media memiliki kemampuan untuk menentukan isu-isu yang dianggap penting oleh masyarakat melalui frekuensi dan intensitas pemberitaan. Kondisi tersebut terlihat dalam pemberitaan *Suara Merdeka* yang secara konsisten menempatkan isu pembangunan sebagai salah satu tema utama dalam berbagai rubrik pemberitaannya. Akibatnya, pembangunan menjadi salah satu isu yang memperoleh perhatian besar dari masyarakat Semarang selama periode penelitian.¹⁷⁰

Keberadaan artikel politik pembangunan dalam *Suara Merdeka* juga memberikan dampak berupa meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan. Berbagai pemberitaan mengenai kondisi fasilitas umum, pelayanan transportasi, maupun pembangunan infrastruktur sering kali memuat tanggapan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Kehadiran ruang publik semacam ini memungkinkan masyarakat mengetahui perkembangan pembangunan sekaligus memberikan penilaian terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Media dalam posisi tersebut berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sehingga pembangunan tidak hanya menjadi agenda negara, tetapi juga menjadi bagian dari perhatian publik.¹⁷¹

Secara keseluruhan, dampak politik pembangunan yang ditimbulkan oleh konten artikel *Suara Merdeka* terlihat dalam terbentuknya legitimasi terhadap

¹⁶⁹ Ratna Widyaningsih, "Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pembangunan Infrastruktur Kota," *Jurnal Sosieta*, Vol. 7, No. 1, 2017, hlm. 41.

¹⁷⁰ Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa McQuail*, Edisi Keenam (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 120.

¹⁷¹ M. Iqbal Fadillah, "Pers Lokal dan Representasi Pembangunan Kota," *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 9, No. 1, 2021, hlm. 54.

program pembangunan pemerintah, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya fasilitas publik, berkembangnya opini publik mengenai pembangunan daerah, serta munculnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan pembangunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *Suara Merdeka* tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai aktor yang turut berperan dalam proses penyebaran ideologi pembangunan dan pembentukan kesadaran masyarakat mengenai perubahan sosial yang berlangsung di Kota Semarang pada masa Orde Baru.¹⁷²

¹⁷² Bambang Setiaji, "Media Massa dan Ideologi Pembangunan Orde Baru," *Jurnal Komunikasi Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 77.

BAB 5

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Konten Artikel dalam Surat Kabar Suara Merdeka di Semarang Tahun 1984–1998*, dapat disimpulkan bahwa surat kabar *Suara Merdeka* memiliki peranan penting sebagai media massa lokal yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, tetapi juga sebagai media representasi kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan pembangunan masyarakat Semarang pada masa Orde Baru hingga menjelang Reformasi tahun 1998. Keberadaan *Suara Merdeka* menunjukkan bahwa pers daerah mampu menjadi bagian penting dalam dinamika kehidupan masyarakat, terutama dalam menyampaikan berbagai persoalan yang berkembang di tingkat lokal. Melalui berbagai artikel yang dimuat, surat kabar ini menjadi salah satu sumber informasi yang merekam perubahan sosial dan pembangunan kota Semarang selama periode penelitian.

Latar belakang munculnya konten artikel dalam *Suara Merdeka* dipengaruhi oleh kondisi politik Orde Baru yang menerapkan sistem kontrol terhadap pers melalui kebijakan stabilitas nasional dan pengawasan media massa. Pemerintah Orde Baru menempatkan pers sebagai sarana pendukung pembangunan nasional sehingga media dituntut untuk ikut menjaga stabilitas politik dan mendukung program pembangunan pemerintah. Kondisi tersebut memengaruhi pola pemberitaan media, termasuk *Suara Merdeka*, yang dalam banyak artikel menampilkan narasi pembangunan dan stabilitas sosial. Meskipun demikian,

sebagai media lokal, *Suara Merdeka* tetap berupaya menampilkan berbagai realitas sosial masyarakat Semarang melalui pemberitaan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa surat kabar tersebut tidak sepenuhnya hanya menjadi corong pemerintah, tetapi juga menjalankan fungsi informatif dan sosial bagi masyarakat daerah.

Selain faktor politik, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Semarang turut memengaruhi karakter konten artikel yang dimuat dalam *Suara Merdeka*. Pada periode 1984–1998, Semarang mengalami perkembangan perkotaan yang cukup pesat, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, perdagangan, maupun pembangunan infrastruktur. Perubahan tersebut memunculkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang kemudian menjadi perhatian media massa. Dalam konteks ini, *Suara Merdeka* hadir sebagai media yang mendokumentasikan berbagai perubahan tersebut melalui artikel-artikel yang dimuat secara rutin dalam rubrik daerah, ekonomi, sosial budaya, dan pembangunan. Dengan demikian, surat kabar ini tidak hanya menjadi media informasi, tetapi juga menjadi dokumentasi sosial mengenai perkembangan masyarakat Semarang pada masa Orde Baru.

Konten artikel ekonomi dalam *Suara Merdeka* menunjukkan bahwa surat kabar ini banyak menyoroti persoalan ekonomi masyarakat secara langsung, terutama yang berkaitan dengan harga kebutuhan pokok, kondisi pasar tradisional, distribusi barang, serta dampak krisis ekonomi menjelang runtuhnya Orde Baru. Artikel-artikel ekonomi yang dimuat memperlihatkan kondisi masyarakat kelas menengah ke bawah yang terdampak oleh kenaikan harga bahan pokok dan ketidakstabilan ekonomi nasional. Pemberitaan mengenai kenaikan harga beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan pokok lainnya menunjukkan bahwa *Suara Merdeka* berupaya menyampaikan kondisi ekonomi masyarakat secara nyata melalui laporan lapangan dan wawancara dengan pedagang maupun pembeli di pasar tradisional. Selain itu, pemberitaan ekonomi juga memperlihatkan bagaimana masyarakat Semarang menghadapi tekanan ekonomi pada masa krisis 1997–1998. Dengan demikian, konten artikel ekonomi dalam *Suara Merdeka* tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga menjadi gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat pada periode tersebut.

Dalam bidang sosial budaya, *Suara Merdeka* banyak memuat artikel yang berkaitan dengan pendidikan, kehidupan sosial masyarakat, budaya lokal, serta identitas budaya Kota Semarang. Pemberitaan mengenai wajib belajar sembilan tahun menunjukkan adanya perhatian media terhadap kebijakan pendidikan nasional dan dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, artikel mengenai Gambang Semarang, Klenteng Sam Poo Kong, dan berbagai tradisi budaya lokal memperlihatkan upaya *Suara Merdeka* dalam mempertahankan identitas budaya daerah di tengah arus modernisasi dan pembangunan kota. Melalui pemberitaan tersebut, surat kabar ini tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai sarana pelestarian budaya lokal dan pembentukan identitas sosial masyarakat Semarang. Artikel-artikel sosial budaya yang dimuat juga menunjukkan bahwa media lokal memiliki peran penting dalam menjaga hubungan antara masyarakat dengan kebudayaan daerahnya.

Sementara itu, dalam bidang politik pembangunan, *Suara Merdeka* banyak memuat artikel mengenai pembangunan infrastruktur kota, seperti pembangunan jalan tol, jalan lingkar, terminal, dan fasilitas transportasi lainnya. Pemberitaan mengenai proyek pembangunan tersebut memperlihatkan adanya pengaruh ideologi pembangunan Orde Baru yang menekankan modernisasi, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi. Dalam banyak artikel, pembangunan digambarkan sebagai simbol kemajuan kota dan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, beberapa artikel juga menunjukkan adanya berbagai persoalan yang muncul akibat pembangunan, seperti keterbatasan fasilitas umum dan ketidaksiapan infrastruktur pendukung. Hal ini menunjukkan bahwa *Suara Merdeka* tidak hanya memuat narasi pembangunan secara normatif, tetapi juga memperlihatkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, surat kabar ini memiliki fungsi sebagai media informasi sekaligus kontrol sosial terhadap kebijakan pembangunan pemerintah daerah.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa konten artikel dalam *Suara Merdeka* memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat Semarang. Dari aspek sosial, pemberitaan yang dimuat mampu membentuk opini publik dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai persoalan sosial,

pendidikan, budaya, dan pembangunan kota. Media massa menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan kondisi daerahnya sekaligus memahami berbagai kebijakan pemerintah yang sedang berlangsung. Selain itu, pemberitaan dalam *Suara Merdeka* turut memperkuat hubungan masyarakat dengan identitas lokal melalui penyebaran informasi mengenai budaya dan kehidupan sosial masyarakat Semarang.

Dari aspek ekonomi, pemberitaan mengenai harga kebutuhan pokok, pasar tradisional, serta pembangunan infrastruktur memberikan pengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Informasi mengenai kondisi pasar dan distribusi barang membantu masyarakat memahami situasi ekonomi yang sedang terjadi, terutama pada masa krisis ekonomi 1997–1998. Selain itu, pembangunan infrastruktur yang diberitakan dalam *Suara Merdeka* turut memengaruhi mobilitas masyarakat dan perkembangan aktivitas ekonomi perkotaan. Dengan demikian, surat kabar ini tidak hanya menjadi media penyebar informasi, tetapi juga memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Semarang pada masa tersebut.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa *Suara Merdeka* sebagai surat kabar lokal memiliki kontribusi penting dalam perkembangan pers daerah di Indonesia. Melalui berbagai konten artikel yang dimuat selama tahun 1984–1998, surat kabar ini menjadi media informasi, dokumentasi sosial, serta cerminan hubungan antara media, masyarakat, dan kekuasaan pada masa Orde Baru. Konten artikel yang dimuat dalam *Suara Merdeka* memperlihatkan bagaimana media lokal berusaha menjalankan fungsi jurnalistiknya di tengah sistem politik yang membatasi kebebasan pers. Oleh karena itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa kajian terhadap surat kabar lokal tidak hanya penting dalam memahami sejarah pers Indonesia, tetapi juga penting untuk melihat dinamika sosial masyarakat daerah serta hubungan media dengan kekuasaan dalam konteks sejarah Indonesia modern.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip

- Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01/Per/Menpen/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers.
- PT Suara Merdeka. Dokumen Sejarah Perusahaan (BAB II). Semarang: PT Suara Merdeka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.

Buku dan Monograf

- Abdullah, Taufik, dan Abdurrachman Surjomihardjo. Ilmu Sejarah dan Historiografi: Arah dan Perspektif. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Abdullah, Taufik. Pers dan Perubahan Sosial di Indonesia. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Alex Sobur. Etika Pers: Profesionalisme dengan Nurani. Bandung: Humaniora, 2001.
- Almond, Gabriel A., dan Sidney Verba. Budaya Politik: Civic Culture Revisited. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Ashadi Siregar. Bagaimana Meliput dan Menulis Berita untuk Media Massa. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Astraatmadja, Atmakusumah. Media Massa dan Kekuasaan. Jakarta: LP3ES, 1994.
- Astraatmadja, Atmakusumah. Pers Indonesia Baru: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab. Jakarta: Dewan Pers, 2002.
- Badil, Rudy. Sejarah Pers di Indonesia. Jakarta: Kompas, 2008.
- Baran, Stanley J. Pengantar Komunikasi Massa: Melek Media dan Budaya. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Barthes, Roland. Mitos-Mitos. Yogyakarta: Jalasutra, 2013.
- Budianta, Melani. Wacana dan Media: Kritik Budaya dalam Praktik. Jakarta: Jalasutra, 2002.
- Bungin, Burhan. Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Jakarta: Kencana, 2008.

- Crouch, Harold. *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1978.
- Effendy, Onong Uchjana. Ilmu, Teori, dan Filsafat Komunikasi. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Eisenstein, Elizabeth. *The Printing Revolution in Early Modern Europe*. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.
- Gramsci, Antonio. Catatan dari Penjara. Terj. Quintin Hoare dan Geoffrey Nowell Smith. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Herman, Edward S., dan Noam Chomsky. Menciptakan Persetujuan: Ekonomi Politik Media Massa. Jakarta: Marjin Kiri, 2016.
- Heryanto, Ariel. *State Terrorism and Political Identity in Indonesia*. London: Routledge, 2006.
- Hill, David T. *The Press in New Order Indonesia: Control and Accommodation*. Jakarta: Equinox Publishing, 1994.
- Hill, Hal. *The Indonesian Economy Since 1966*. Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- Indrajaya, Yulianus. Pers Lokal dan Perubahan Sosial. Semarang: Universitas Diponegoro Press, 2010.
- Kartodirdjo, Sartono. Pengantar Sejarah Indonesia Baru. Jakarta: Gramedia, 1992.
- Koentjaraningrat. Kebudayaan Jawa. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Kotler, Philip. Prinsip-Prinsip Pemasaran. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Krippendorff, Klaus. Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.
- Kuntowijoyo. Pengantar Ilmu Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018.
- Kurniawan Junaedhie. Ensiklopedi Pers Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Leirissa, R.Z., dkk. Sejarah Perekonomian Indonesia. Yogyakarta: Ombak, 2012.
- M. Daldjoeni. Geografi Kota dan Desa. Bandung: Alumni, 1997.
- McNair, Brian. Pengantar Komunikasi Politik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

- McQuail, Denis. *Teori Komunikasi Massa* McQuail, Edisi Keenam. Jakarta: Salemba Humanika, 2011.
- Nasution, Kacung Marijan. *Sejarah Pers Indonesia: Perspektif Politik dan Jurnalistik*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Purwanto, Bambang. *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Rahardjo, Slamet. *Sejarah Kota Semarang*. Semarang: Dinas Pariwisata Kota Semarang, 2009.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008*. Jakarta: Serambi, 2008.
- Romli, Dahlan R. *Pers dalam Politik Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- . *Pers dalam Politik Orde Baru: Kontrol dan Pembredelan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Siregar, Amir Effendi. *Pers, Negara, dan Masyarakat*. Jakarta: LP3ES, 1998.
- , Ashadi. *Pers dan Pemerintahan Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Soeprapto. *Pers Indonesia dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Intermasa, 1995.
- . *Pers Indonesia dalam Pergolakan Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995.
- Sunarlan, dkk. *Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2018.
- Surjomihardjo, Abdurrachman. *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2002.
- Winters, Jeffrey A. *Power in Motion: Capital Mobility and the Indonesian State*. Ithaca: Cornell University Press, 1996.

Majalah dan Surat Kabar

- “Gambang Semarang Layak Dijadikan Identitas Kota ATLAS.” No. 02, 26 Juli 1994. *Suara Merdeka*. Semarang.
- “Hari Pertama di Terminal Terboyo: Semua Berjalan Tertib Meski Ada Kekurangan.” No. 06, 11 Juni 1985. *Suara Merdeka*. Semarang.

- “Jalan Tol Semarang–Bawen Bukan Prioritas untuk Segera Dibangun.” No. 01, 22 September 1990. *Suara Merdeka*. Semarang.
- “Klenteng Sam Po Kong Potensial Serap Wisatawan.” No. 02, 6 Februari 1997. *Suara Merdeka*. Semarang.
- “Para Guru Diminta Siapkan Diri untuk Laksanakan Wajib Belajar.” No. 11, 3 Mei 1992. *Suara Merdeka*. Semarang.
- “Penyediaan Jalan By Pass dan Tol Dirasakan Mendesak.” No. 06, 13 Februari 1984. *Suara Merdeka*. Semarang.
- “Terminal Bis Terboyo Akhir Mei Dioperasikan.” No. 06, 15 April 1985. *Suara Merdeka*. Semarang.
- “Wajib Belajar 9 Tahun, Berhadapan dengan Kawin Muda.” No. 03, 4 Mei 1992. *Suara Merdeka*. Semarang.
- “Terjadi 172 Kasus Pelanggaran Pemilu di Jateng dan DIY.” No. 1, 21 April 1977. *Suara Merdeka*. Semarang.
- “Hari Pertama di Terminal Terboyo: Semua Berjalan Tertib Meski Ada Kekurangan.” No. 08, 1985. *Suara Merdeka*. Semarang.
- “Gambang Semarang.” No. 02, 11 September 1991. *Suara Merdeka*. Semarang.
- “IGGI Setuju Sediakan 2,1 Milyar Dollar Lagi Untuk Bantu Indonesia.” No. 4, 9 April 1977. *Suara Merdeka*. Semarang.
- “Pengunjung Pawai Sam Poo Membeludak.” No. 02, 11 Agustus 1998. *Suara Merdeka*. Semarang.
- “Jalan Lingkar Semarang Selesai.” No. 06, 23 Mei 1981. *Suara Merdeka*. Semarang.
- “Harga Kebutuhan Pokok Melonjak.” No. 13, 16 Agustus 1997. *Suara Merdeka*. Semarang.
- “Harga Kebutuhan Pokok Melonjak.” No. 14, 07 Oktober 1997. *Suara Merdeka*. Semarang.
- “Harga Kebutuhan Pokok Melonjak.” No. 14, 14 Januari 1997. *Suara Merdeka*. Semarang.

Skripsi, Tesis, dan Jurnal

- Alfian, M. "Pers Indonesia pada Masa Orde Baru." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No. 1, 2006.
- Fadillah, M. Iqbal. "Pers Lokal dan Representasi Pembangunan Kota." *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol. 9, No. 1, 2021.
- Febriani, Rina. "Pariwisata Budaya dan Identitas Kota dalam Perspektif Sejarah Sosial." *Jurnal Patanjala*, Vol. 11, No. 3, 2019.
- Handoyo, Eko. "Perkembangan Kota dan Infrastruktur Transportasi di Jawa Tengah." *Jurnal Integralistik*, Vol. 24, No. 1, 2013.
- Hidayat, Irvan. "Konten Artikel-Artikel dalam Koran Sinar Djawa dan Sinar Hindia Tahun 1917–1918." *Skripsi* pada Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Hunaini, M. Fakhri. "Modernisasi Kota dan Mobilitas Sosial Masyarakat Perkotaan." *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 11, No. 2, 2020.
- Imron, I. "Pembredelan Pers pada Masa Pemerintahan Orde Baru." *Jurnal CANDI*, Vol. 13, No. 1, 2016.
- Junaedi, Fajar. "Media Lokal dan Konstruksi Pembangunan Daerah." *Jurnal Komunikator*, Vol. 6, No. 1, 2014.
- Kistanto, Nurdien H. "Urbanisasi dan Perubahan Struktur Kota di Indonesia." *Jurnal Sabda*, Vol. 7, No. 1, 2012.
- Kunto Wijoyo. "Urbanisasi dan Perubahan Sosial di Kota-Kota Jawa." *Humaniora*, Vol. 12, No. 1, 2000.
- Kurniawan, Hendra. "Transportasi Perkotaan dan Modernisasi Kota pada Masa Orde Baru." *Jurnal Candrasangkala*, Vol. 5, No. 1, 2019.
- Kusumaningrum, Dian. "Foto Jurnalistik sebagai Sumber Sejarah Sosial Perkotaan." *Jurnal Historia Madania*, Vol. 4, No. 2, 2020.
- Kwartanada Dwi Nugroho. "Perkembangan Ekonomi Kota Semarang pada Masa Orde Baru." *Historical Studies Journal*, Vol. 21, No. 2, 2011.
- Lutfiyah, Azkiyatul. "Peran Koran Suara Merdeka terhadap Gerakan Mahasiswa di Semarang Tahun 1998." *Skripsi* pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2020.

- Luthfi, Ahmad Nashih. "Pembangunan dan Modernisasi pada Masa Orde Baru." *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 2, No. 1, 2017.
- Muhammadun. Fase Konvergensi di Suara Merdeka. *Skripsi*, Universitas Diponegoro, 2019.
- Mutmainah, Siti. "Perkembangan Infrastruktur Transportasi dan Perubahan Kota Semarang Tahun 1970–1990." *Jurnal Paramita*, Vol. 24, No. 1, 2014.
- Nursam, M. "Kebijakan Pers pada Masa Orde Baru." *Jurnal Historia*, Vol. 6, No. 1, 2018.
- Nurudin. "Pers dan Hegemoni Kekuasaan pada Masa Orde Baru." *Jurnal Komunikasi*, Vol. 9, No. 1, 2015.
- Prasetyo, Dimas. "Media Lokal dalam Wacana Pembangunan Daerah." *Jurnal Kajian Jurnalisme*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Pratiwi, Dian. "Peran Terminal dalam Perkembangan Sosial Ekonomi Wilayah Perkotaan." *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, Vol. 4, No. 2, 2016.
- Purwanto, Agus Joko. "Modernisasi Transportasi Perkotaan pada Masa Orde Baru." *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol. 13, No. 1, 2019.
- Putro, R. Widodo Dwi. "Ideologi Pembangunan Orde Baru dalam Perspektif Sejarah." *Jurnal Agastya*, Vol. 8, No. 2, 2018.
- Rahman, Aulia. "Fotografi sebagai Sumber dalam Penelitian Sejarah Sosial." *Jurnal Sejarah dan Budaya*, Vol. 14, No. 2, 2020.
- Rahmawati, Alyana Ulfa. "Kartun Politik dalam Surat Kabar Bataviaasch Nieuwsblad Tahun 1932–1942." *Skripsi* pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember, 2024.
- Salim, Agus. "Pembangunan Infrastruktur pada Masa Orde Baru dan Dampaknya terhadap Perkembangan Kota." *Jurnal Forum Ilmu Sosial*, Vol. 39, No. 2, 2012.
- Saptohadhi, S. "Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia." *Jurnal Dinamika Hukum*, 2011.
- Setiaji, Bambang. "Media Massa dan Ideologi Pembangunan Orde Baru." *Jurnal Komunikasi Indonesia*, Vol. 5, No. 2, 2016.

- Setiani, Wildan Novanda Suhri. “Iklan Kecantikan dalam Surat Kabar Soerabaijasch Handelsblad Tahun 1930–1942.” *Skripsi* pada Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Jember, 2025.
- Setiawan, Rizki. “Media Lokal dan Wacana Pembangunan Kota.” *Jurnal Kajian Media*, Vol. 2, No. 1, 2018.
- Setiyono, Budi. “Media Lokal dan Dinamika Pembangunan Daerah.” *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol. 4, No. 2, 2011.
- Sumarno. “Pers dan Wacana Pembangunan pada Masa Orde Baru.” *Jurnal ASPIKOM*, Vol. 1, No. 2, 2010.
- Suyata. “Implementasi Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Indonesia.” *Jurnal Kependidikan*, Vol. 30, No. 1, 2000.
- Syaifulloh, M. “Kebijakan Pemerintah Orde Baru terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia Tahun 1967–1998.” *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Triatmodjo, Bambang. “Perkembangan Infrastruktur Transportasi dan Pertumbuhan Kota.” *Jurnal Teknik Sipil*, Vol. 10, No. 2, 2003.
- Wasino. “Multikulturalisme dan Identitas Kota Semarang.” *Paramita: Historical Studies Journal*, Vol. 20, No. 1, 2010.
- Widyaningsih, Ratna. “Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat Akibat Pembangunan Infrastruktur Kota.” *Jurnal Sosieta*, Vol. 7, No. 1, 2017.
- Wulandari, Retno. “Akulturasi Budaya Tionghoa dan Jawa di Kota Semarang.” *Jurnal Humanika*, Vol. 22, No. 1, 2015.
- Yulianus Indrajaya. “Pers Lokal dan Representasi Budaya Masyarakat Daerah.” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 8, No. 1, 2011.
- Zuhro, R. Siti. “Pers dan Negara pada Masa Orde Baru.” *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 5, No. 1, 2008.

Wawancara

Wawancara dengan Setiawan Hendra Kelana, Semarang, 13 Juni 2026.

LAMPIRAN

Lampiran A

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1982
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1966 TENTANG
KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1967

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Presiden Republik Indonesia

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara khususnya bidang Penerangan dan Pers dipandang perlu mengadakan perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara;
4. *Bedrijfsreglementeering* Ordonnantie Tahun 1934 *Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86 tentang Penyaluran Perusahaan, sebagaimana telah diubah dan ditambah;
5. Undang-undang Nomor 4 Pnps Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2533);
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1815);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2822);
8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);

Dengan ...

LAMPIRAN B

Peraturan Menteri Penerangan Nomor 01/Per/Menpen/1984

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1984
TENTANG
DEWAN PERS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1970 tentang Dewan Pers sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan, dan oleh karenanya dipandang perlu menetapkan ketentuan yang baru tentang Dewan Pers;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2815) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2822) dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3235);

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1970 tentang Dewan Pers;

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DEWAN PERS.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Pasal 1

Dewan Pers yang selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Dewan adalah suatu wadah musyawarah non struktural yang mendampingi Pemerintah dalam membina pertumbuhan dan perkembangan Pers Nasional yang sehat dan dinamis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Dewan bertugas mendampingi Pemerintah dalam membina pertumbuhan dan perkembangan Pers Nasional agar mampu menunjang pembangunan masyarakat Pancasila.

Pasal 3

LAMPIRAN C

Surat Permohonan Ijin Penelitian Unit Redaksi *Suara Merdeka*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU BUDAYA
Jalan Kalimantan No. 37 Kampus Bumi Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember 68121
Telp. 0331 – 337188 Faximile 0331 – 332738
Laman: <https://fib.unej.ac.id> Email: fib@unej.ac.id

Nomor : 1526/DST/UN25.B6/DT/2026
Perihal : Permohonan Izin Penelitian Skripsi

20 April 2026

Kepada
Yth. Pimpinan Redaksi *Suara Merdeka*
Jl. Merak 11A Semarang (Kota Lama)

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir / skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, perlu adanya data dukung sebagai dasar dalam pembuatan skripsi. Terkait dengan hal itu kami berharap Bapak/Ibu Pimpinan berkenan memberikan izin kepada mahasiswa kami untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Adapun data mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Ahmad Zain Baihaqi
NIM : 220110301061
Prodi : Ilmu Sejarah (S1)
Judul Penelitian : "Konten Artikel dalam Surat Kabar *Suara Merdeka* di Semarang Tahun 1984- 1998"
Pelaksanaan : April 2026 - Juli 2026
No. Hp Mahasiswa : 0877-5845-2504
Data Yang Diperlukan : 1. Arsip Surat Kabar *Suara Merdeka* di Semarang Tahun 1984- 1998, Mengenai Pendidikan, Ekonomi dan Konten Pembangunan;
2. Arsip "Surat Izin Usaha Penerbitan Pers " untuk *Suara Merdeka*.

Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.



Ditandatangani oleh Dekan Bidang Akademik,

Drs. H. Setiawan, M.A.
NIP. 197806262002121002



HASIL WAWANCARA

Setiawan Hendra Kelana merupakan Pemimpin Redaksi Harian *Suara Merdeka*. Berdasarkan komunikasi yang dilakukan dengan Setiawan Hendra Kelana, diperoleh keterangan mengenai struktur redaksi dan tokoh-tokoh yang berperan dalam pengelolaan *Suara Merdeka* pada awal dekade 1980-an. Menurut Setiawan Hendra Kelana, pada sekitar tahun 1983 struktur redaksi *Suara Merdeka* telah menunjukkan pembagian tugas yang cukup jelas untuk mendukung proses produksi berita dan menjaga kualitas pemberitaan yang diterbitkan setiap hari.

Setiawan Hendra Kelana menjelaskan bahwa salah satu tokoh penting dalam redaksi *Suara Merdeka* pada masa tersebut adalah Soewarno, S.H. yang dikenal sebagai editor sekaligus redaktur senior. Soewarno memiliki peran besar dalam proses penyuntingan artikel opini serta penyusunan kebijakan redaksi. Tugas yang dijalankannya tidak hanya terbatas pada perbaikan naskah, tetapi juga mencakup pengawasan terhadap konsistensi sikap editorial yang menjadi identitas *Suara Merdeka*. Keberadaan Soewarno dinilai penting karena pada masa itu media massa harus mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan informasi masyarakat dengan berbagai dinamika politik yang berkembang pada tingkat nasional.

Selain Soewarno, Setiawan Hendra Kelana juga menyebut nama Mochtar Hidayat sebagai wartawan senior yang memiliki pengalaman jurnalistik yang luas. Dalam perkembangan *Suara Merdeka*, Mochtar Hidayat berkontribusi dalam memperkuat jaringan peliputan serta meningkatkan kualitas pemberitaan daerah. Melalui aktivitas jurnalistik yang dilakukannya, *Suara Merdeka* memperoleh berbagai informasi dari sejumlah wilayah di Jawa Tengah sehingga mampu menghadirkan pemberitaan yang beragam dan dekat dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Setiawan Hendra Kelana, keberadaan wartawan senior seperti Mochtar Hidayat menunjukkan bahwa kekuatan *Suara Merdeka* tidak hanya terletak pada kebijakan redaksinya, tetapi juga pada kemampuan para wartawan dalam membangun jaringan informasi yang luas.

Lebih lanjut, Setiawan Hendra Kelana menjelaskan bahwa dapur redaksi *Suara Merdeka* pada periode tersebut juga didukung oleh sejumlah jurnalis generasi

awal yang telah terlibat sejak masa perkembangan awal perusahaan pers tersebut. Nama-nama seperti H.R. Wahjoedi, Soelaiman, dan Retno Koestiyah merupakan bagian dari kelompok penggerak awal yang berkontribusi dalam berbagai kegiatan jurnalistik maupun operasional redaksi. Mereka terlibat dalam proses pengumpulan berita, penulisan naskah, penyuntingan materi pemberitaan, hingga koordinasi redaksional yang mendukung kelancaran penerbitan surat kabar setiap hari.

Menurut Setiawan Hendra Kelana, keberhasilan *Suara Merdeka* dalam mempertahankan eksistensinya sebagai surat kabar daerah tidak hanya ditentukan oleh figur pemimpin perusahaan, tetapi juga oleh kerja kolektif para jurnalis yang secara konsisten menjaga keberlangsungan penerbitan media tersebut. Kerja sama antara pimpinan redaksi, redaktur, dan wartawan menjadi faktor penting yang memungkinkan *Suara Merdeka* terus berkembang dan mampu menyajikan informasi yang dibutuhkan masyarakat Jawa Tengah pada masa Orde Baru.